BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 149 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025;

Mengingat...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);

Pemerintah .....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.
5. Daerah adalah Kabupaten Ende.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
7. Bupati adalah Bupati Ende.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(7) Bupati .....

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025.

(3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 7 (tujuh) Bab dengan rincian sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan
b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
f. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
g. Bab VII Penutup

(4) Isi dan Uraian RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3 .....

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2024, mengikuti tahapan penyusunan sebagai berikut:
   a. Persiapan penyusunan RKPD
   b. Penyusunan Rancangan awal RKPD
   c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
   d. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
   e. penetapan RKPD

(2) Tahapan dan proses penyusunan RKPD yang dilaksanakan berpedoman pada lampiran, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, untuk menjamin Renja Perangkat Daerah mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah RKPD serta selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;

(2) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, untuk menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;

(3) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah,untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah;

(4) Hasil pengendalian dan evaluasi wajib disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Bab III .....

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 25 juni 2024

Pj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 26 juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 26

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN ENDE 2025

ISI DAN URAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR GAMBAR		iv
DAFTAR TABEL		v
DAFTAR GRAFIK		vii
DAFTAR LAMPIRAN		viii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3	Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-3
1.4.	Maksud dan Tujuan	I-4
1.5.	Sistematika Dokumen RKPD	I-4
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1.	Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende	II-1
2.1.1.	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1.	Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.2.	Potensi Pengembangan Wilayah	II-14
2.1.1.3.	Kawasan Rawan Bencana Alam	II-16
2.1.1.4.	Demografi	II-19
2.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-20
2.1.2.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-20
2.1.2.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-25
2.1.2.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-28
2.1.3.	Aspek Pelayanan Umum	II-28
2.1.3.1.	Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-28
2.1.3.2.	Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-40
2.1.3.3	Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-47
2.1.3.4.	Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-53
2.1.3.5.	Fokus Layanan Urusan Kewilyahan	II-58
2.1.3.6.	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum	II-58
2.1.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II-59
2.1.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-59
2.1.4.2.	Fokus Fasiltas Wilayah / Infrastruktur	II-61
2.1.4.3.I	Fokus Iklim Berinvestasi	II-63
2.1.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia	II-64
2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2021	II-65
2.3.	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-137
2.3.1.	Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan	II-137
2.3.2.	Permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-138
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1.	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Sampai Tahun 2022	III-1
3.1.2.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	III-5
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-6

3.2.1.	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-6
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV-1
4.1.2.	Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT	IV-3
4.1.3.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende	IV-3
4.2.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV-6
4.2.1	Perumusan Prioritas Pembangunan	IV-6
4.2.2.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2023	IV-12
BABV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
6.1.	6.1. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	VI-1
6.1.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan idikator Kinerja kunci (IKK) Daerah.....	VI-2
6.1.2.	Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	VI-5
BAB VII PENUTUP	.....	VII-1

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE



RANCANGAN AKHIR
RKPD KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025

"PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTRIM UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF BERKELANJUTAN"

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkat, karunia dan petunjuk-Nya, sehingga Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan RKPD 2025 dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya untuk penjabaran teknis perencanaan dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tema RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025, adalah: **"PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTRIM UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF BERKELANJUTAN"**. Tema ini memiliki makna perwujudan SDM Kabupaten Ende yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, dan bermartabat melalui optimalisai penyelengaraan layanan pendidikan dan kesehatan, menurunnya angka kemiskinan ekstrem dengan strategi yang berfokus pada upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat serta pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pengintegrasian seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan lintas sektor, didukung dengan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, serta pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan saat ini.

RKPD Tahun 2025 yang menghasilkan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif untuk didanai dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ini, merupakan aktualisasi dari proses pembangunan yang bersifat politis, teknokratis, bottom up-top down dan partisipatif serta sebagai proses akhir dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten Ende pada Tahun 2024 dengan mengakomodir usulan kegiatan realistis yang telah dibahas secara berjenjang mulai dari tingkat Dusun/Lingkungan, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten maupun hasil penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Ende yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Ende.

Keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2025, sangat ditentukan oleh komitmen bersama untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab antara pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan, DPRD yang akan mengawasi seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan dan seluruh stakeholders yang ada di Kabupaten Ende serta seluruh komponen masyarakat yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan dapat turut berpartisipasi aktif dan mengawasinya, sehingga cita-cita bersama dalam "Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan, menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan", dapat terwujud. "Terwujudnya Masyarakat Ende yang Mandiri, Maju, Adil, Sejahtera, Demokratis dan Berdaya Saing dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia" " Terwujudnya Masyarakat Ende Yang Mandiri, Maju, Adil, Sejahtera, Demokratis dan Berdaya Saing dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia"

05 Juni 2024,
PJ. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

DAFTARISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GRAFIK vili

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I: PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-2

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-3

1.4. Maksud dan Tujuan I-4

1.5. Sistematika Dokumen RKPD I-4

BAB II: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende II-1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.1.1.Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1

2.1.1.2.Potensi Pengembangan Wilayah II-14

2.1.1.3.Kawasan Rawan BencanaAlam II-15

2.1.1.4.Demografi II-18

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-19

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-19

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II-25

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga II-28

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II-29

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-29

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-40

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan II-47

2.1.3.4. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan II-53

2.1.3.5. Fokus Layanan Urusan Kewilyahan II-56

2.1.3.6. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum II-56

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah II-57

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-57

2.1.4.2. Fokus Fasiltas Wilayah / Infrastruktur II-59

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi II-62

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia II-62

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2023 ..... II-63
2.2.1.Capaian Target Makro RPJMD 2019-2024 ..... II-63
2.2.2.Capaian Pelaksanaan Program II-64
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah II-116
2.3.1. Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan II-116
2.3.2. Permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II117

BAB III: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Sampai Tahun 2023 ..... III-1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah III-6
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-6
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-7

BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional IV-1
4.1.2. Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... IV-2
4.1.3. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... IV-2
4.1.4. Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT IV-3
4.1.5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2025 ..... IV-3
4.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-5
4.2.1. Sasaran Pembangunan IV-5
4.2.2. Perumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2025 ..... IV-6
4.2.3. Prioritas Kabupaten Ende Tahun 2025 ..... IV-12
4.3.4. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, Penurunan Stunting, Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi IV-14
4.3.5. Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan Produk Lokal IV-15

BAB V: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

BAB VI: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1
6.1. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah VI-1
6.1.1.Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja kunci (IKK) Daerah VI-2
6.1.2. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah VI-5

BAB VII: PENUTUP VII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alir Hubungan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya I-3

Gambar 2.1. Intervensi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (Menurunkan Beban Pengeluaran) II-24

Gambar 2.2. Intervensi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (Meningkatkan Pendapatan) II-25

Gambar 2.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2021 ..... II-61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan II-1
Tabel 2.2. Kecamatan dan Desa Pemekaran II-2
Tabel 2.3. Kategori Desa Berdasarkan Tingkat Perkembangannya II-3
Tabel 2.4. Klasifikasi Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan II-6
Tabel 2.5. Luas Wilayah menurut Ketinggian per Kecamatan II-11
Tabel 2.6. Kemiringan Tanah (Lereng) dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Ende II-11
Tabel 2.7. Persentase Luas Wilayah menurut TeksturTanah per-Kecamatan II-12
Tabel 2.8. Daerah Aliran Sungai dan Mata Air di Kabupaten Ende II-12
Tabel 2.9. Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende II-13
Tabel 2.10. Zonasi Ancaman Gempa di Kabupaten Ende II-16
Tabel 2.11 Wilayah Ancaman Tsunami/Gelombang Pasang di Kabupaten Ende II-17
Tabel 2.12 Jumlah Penduduk, Ratio, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Ende Tahun 2010-2022 ..... II-19
Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Kabupaten Ende Menurut Kelompok Umur Tahun 2021 - 2023 ..... II-19
Tabel 2.14 Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ende kurun waktu 2021-2023 ..... II-20
Tabel 2.15 Laju Pertumbuhan (%) Sektor Ekonomi 2019-2023 ..... II-20
Tabel 2.16 Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Ende ADHB Kurun Waktu 2017 –2023 ..... II-21
Tabel 2.17 PDRB Pengeluaran ADHK 2016-2023 ..... II-21
Tabel 2.18 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Ende, 2019-2023 ..... II-22
Tabel 2.19 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ende 2010-2023 ..... II-23
Tabel 2.20 Tingkat Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 ..... II-24
Tabel 2.21 Perkembangan IPM Kabupaten Ende 2015-2023 ..... II-25
Tabel 2.22 Angka Partisipasi Kasar SD/MI,SMP/MTs Tahun 2016-2023 ..... II-25
Tabel 2.23 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs Tahun 2016-2023 ..... II-25
Tabel 2.24 Persentase Penduduk Kabupaten Ende Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki, 2015–2022 ..... II-25
Tabel 2.25 Angka Kerja Kabupaten Ende Tahun 2019-2023 ..... II-26
Tabel 2.26 Komposisi Penduduk Kabupaten Ende yang Bekerja Kerja Menurut Lapangan Usaha 2020-2023 ..... II-26
Tabel 2.27 Tingkat Partisipasi Angka Kerja di Kabupaten Ende Tahun 2019-2023 ..... II-27
Tabel 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ende Tahun 2019-2023 ..... II-27
Tabel 2.29 Ringkasan Capaian Indikator RPJMD Urusan Pendidikan II-31
Tabel 2.30 Capaian Indikator Kinerja Isnpektorat Daerah II-56
Tabel 2.31 Rata-rata Pengeluaran Perkapita per bulan (Rp) di Kabupaten Ende Tahun 2009-2023 ..... II-58
Tabel 2.32 Hasil Analis Shift Share (SS) Kabupaten Ende dengan Wilayah Referensi Provinsi NTT (2016) II-59
Tabel 2.33 Kondisi Jalan dan Alat Transportasi di Kabupaten Ende II-60
Tabel 2.34 Persentase Penduduk menurut Penggunaan dan Kepemilikan Telepon Seluler Tahun 2021 ..... II-60
Tabel 2.35 Banyaknya Penginapan, Kamar dan Tempat Tidur di Kabupaten Ende Tahun 2016-2018 ..... II-62
Tabel 2.36 Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik di Kabupaten Ende Tahun 2019-2021 ..... II-62

Tabel 2.37 Jumlah Pelangan Listrik Menurut Kecamatan Tahun 2021 ..... II-63
Tabel 2.38 Persentase Penduduk Kabupaten Ende 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2018-2022 ..... II-64
Tabel 2.39 Ratio Beban Ketergantungan di Kabupaten Ende Tahun 2014-2022 ..... II-64
Tabel 2.40 Target Makro RPJMD 2019-2024 dan Capaiannya sampai dengan Tahun 2023 ..... II-64
Tabel 2.41 Capaian Kinerja Masing-masing Misi RPJMD 2019-2024 (kondisi s/d tahun 2023) II-65
Tabel 2.42 Capaian Kinerja masing-masing Misi RPJMD 2019-2024 menurut Perangkat Daerah kondisi sampai dengan Tahun 2023 ..... II-67
Tabel 2.43 Capaian Kinerja Sasaran masing-masing Misi RPJMD 2020-2024 ..... II-70
Tabel 2.44 Pencapaian Target SDGs 1 di Kabupaten Ende Tahun 2019/2023 ..... II-97
Tabel 2.45 Identifikasi Permasalahan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah II-103
Tabel 2.66 Identifikasi Permasalahan Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah II-105
Tabel 3.1 Presentase Realisasi Pendapatan Tahun 2023 terhadap Target RPMJ 2019-2024 ..... III-7
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Pendapatan pada Penetapan APBD Tahun 2020-2023 dan Target Pendapatan Tahun 2023-2024 ..... III-8
Tabel 3.3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah pada Penetapan APBD Tahun 2020-2023 ..... III-9
Tabel 3.4 Realisasi dan Alokasi Belanja Daerah Tahun 2020-2023 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024 ..... III-15
Tabel 3.5 Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2024 ..... III-16
Tabel 3.6 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 ..... III-18
Tabel 3.7 Realisasi Pembiayaan Tahun 2020-2023 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024 ..... III-19
Tabel 3.8 Skema Alokasi Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Ende Tahun 2024 ..... III-20
Tabel 4.1. Hubungan Visi Misi RPJMD 2019-2024 dengan arahan RPJP2005-2025 ..... IV-4
Tabel 4.2. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende IV-5
Tabel 4.3. Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Kabupaten Ende pada tahun 2024 ..... IV-6
Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Langsung Tahun 2025 per Misi V-2
Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Tahun 2025 ..... VI-2
Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 ..... VI-3
Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah Tahun 2025 ..... VI-4
Tabel 6.4. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan (Wajib, Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan) Tahun 2025 ..... VI-6

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun keatas yang Mengakses Internet Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2021 ..... II-61
Grafik 2.2. Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (kondisi s/d tahun 2022) II-64
Grafik 5.1. Proyeksi Proporsi BLTahun 2025 per Misi V-2
Grafik 6.1. Capaian Kinerja Per Misi Pembangunan Kabupaten Ende kondisi sampai dengan Tahun 2023.. VI-1

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN ENDE TAHUN 2025

Lampiran 2: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN USULAN MASYARAKAT MELALUI PIDES PIKEL KABUPATEN ENDE TAHUN 2025

Lampiran 3: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN ENDE TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende merupakan rencana kerja pemerintah tahunan yang diawali dengan Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD dan Rancangan Akhir RKPD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende untuk menjadi RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025. Secara substansi memuat rancangan prioritas pembangunan, rancangan kerangka makro ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, rencana kerja dan pendanaan suatu daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 berpedoman pada RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, RKPD Provinsi NTT, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 Ayat (2) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, tahapan pembangunan di Kabupaten Ende pada Tahun 2025 merupakan tahun pertama **pelaksanaan RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.** Sejalan dengan kedudukan perencanaan serta memerhatikan isu dan perkembangan terkini dirumuskan **Tema Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2025, yaitu: "PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTRIM UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF BERKELANJUTAN".** Tema ini mengandung makna bahwa **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia,** memiliki makna perwujudan SDM Kabupaten Ende yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, dan bermartabat melalui optimalisai penyelengaraan layanan pendidikan dan kesehatan. Bidang pendidikan, (meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, karakter serta prestasi olahraga). Bidang kesehatan (peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan tata kelola penduduk, terutama penurunan angka stunting dan gizi buruk serta AKI dan AKB), yang pada akhimya menghasilkan Generasi Muda Kabupaten Ende yang sehat, cerdas dan berkarakter dalam menghadapi era industry 4.0dan era society 5.0. **Pengentasan Kemiskinan Ekstrim,** memiliki makna menurunnya angka kemiskinan ekstrem dengan strategi yang berfokus pada upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat serta pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pengintegrasian seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan lintas sektor, didukung dengan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, serta pemberdayaan masyarakat. **Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan,** memiliki makna pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan saat ini.

Dengan diterbitkannya Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, menjadi babak baru bagi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Nomenklatur yang semula hanya pada level Program dan Kegiatan, kini menjadi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pengelolaan data perencanaan pembangunan kini harus menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disediakan oleh Kemendagri.

Memerhatikan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 73-103), **Penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 dilaksanakan dalam 6 (enam) tahapan,**yaitu: 1) persiapan penyusunan, 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD, 3) Penyusunan Rancangan RKPD, 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD, 5) Perumusan Rancangan Akhir, dan 6) Penetapan RKPD dengan Peraturan Bupati Ende. **Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD** ini merupakan tahap kedua setelah tahapan persiapan penyusunan. Pada **Tahapan persiapan penyusunan RKPD** meliputi kegiatan pembentukan tim penyusun, orientasi RKPD, penyusunan agenda kerja, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen RKPD ini, untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan akhir Renja Perangkat Daerah untuk selanjutnya dilakukan fasilitasi ke Gubernur Provinsi NTT, dan hasil rekomendasi Gubernur dijadikan bahan penyempurnaan menjadi RKPD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan **Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende** Tahun 2025 ini, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6398);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

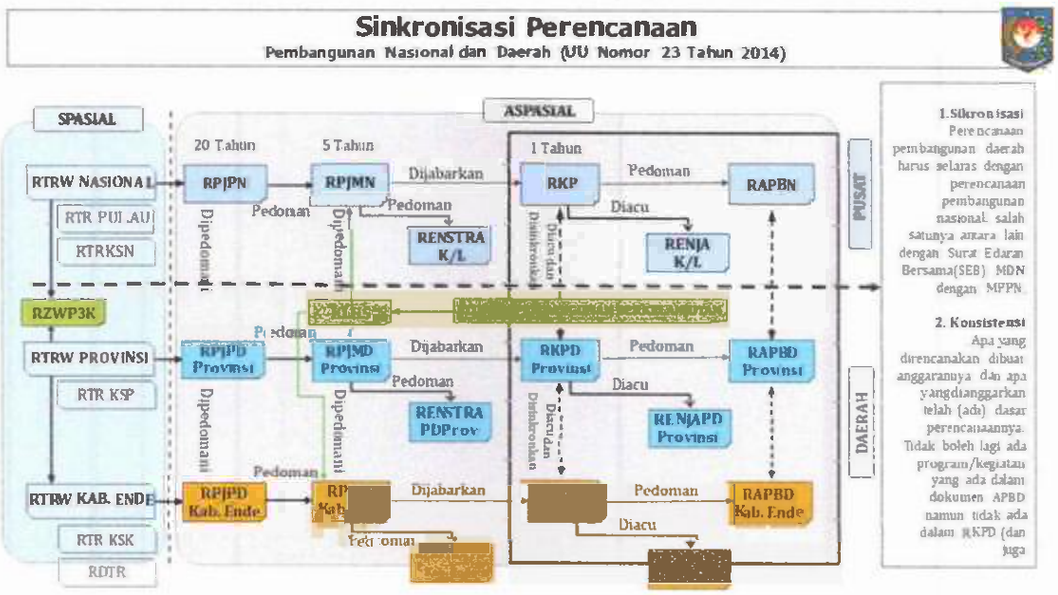
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengetasan Kemiskinan Ekstrem;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ende;

27. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 merupakan penjabaran dari **RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026**, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Ende Tahun 2005-2025. Dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakan provinsi dan nasional, memerhatikan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, rancangan RKPD Provinsi NTT Tahun 2025, Rancangan tekhnokratik RPJPN Tahun 2025-2045 dan Rancangan RKP Tahun 2025. Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan, disinergikan dengan Perda Nomor 1 tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2023-2042, RTRW Provinsi NTT dan RTRW Nasional. Keseluruhan dokumen perencanaan tersebut diatas dalam konsep perencanaan dan penganggaran terpadu, diharmonisasikan dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), untuk selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan keseluruhan kebijakan pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2025.

Gambar 1.1 Bagan Alir Hubungan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



1.4. Maksud dan Tujuan

1. **Maksud**

   RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjamin keberlangsungan antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta menjaga kesinambungan dan sinergi keseluruhan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025.

2. **Tujuan**

   a. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
   b. Acuan dalam pelaksanaan fasilitisi dan harmonisasi kepada Gubernur Provinsi NTT terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2025

RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I **Pendahuluan**, memuat latar belakang penyusunan, landasan hukum, hubungan antar dokumen, sistematika serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

BAB II **Gambaran Umum Kondisi Daerah**, memuat gambaran umum kondisi Kabupaten Ende, evaluasi pelaksanaan RKPD 2022 dan 2023, Realisasi RPJMD dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III **Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah.

BAB IV **Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPD 2025-2026**, dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025.

BAB V **Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**, memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai fungsi Perangkat Daerah.

BAB VI **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, memuat indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah

BAB VII **Penutup**, menjelaskan keseluruhan proses penyusunan dan penegasan terkait tindak lanjut pelaksanaan RKPD 2025.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH



Bagianini secara substansi menggambarkan Kondisi Umum Kabupaten Ende, Capaian Kinerja Pembangunan dan Permasalahan yang masih dihadapi, Uraian bagian ini menjadi penting, karena merupakan basis data/informasi bagi perumusan program dan kegiatan.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. *Luas dan Batas Wilayah Administrasi*

Kabupaten Ende merupakan salah satu dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki wilayah seluas 2085,19km^2, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah Timur : Kabupaten Sikka
- Sebelah Selatan : Laut Sawu
- Sebelah Barat : Kabupaten Nagekeo

Secara administrasi wilayah Kabupaten Ende terdiri atas **21 Kecamatan, 255 Desa, 23 Kelurahan, dan 893 dusun/lingkungan**. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Wewaria (14,05%), diikuti Maukaro (10,39 %), Kotabaru (10,33 %) dan Nangapanda (8,99%), sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ende Tengah (0,27%). Berdasarkan jenis pemerintahan, terdapat 2 (dua) kecamatan yang seluruh wilayahnya merupakan kelurahan yaitu Kecamatan Ende Selatan dan Ende Tengah, 10 (sepuluh) kecamatan yang seluruh wilayahnya merupakan Desa dan 9 (sembilan) kecamatan memiliki unsur pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Tabel 2.1 Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan

No.	Kecamatan	Nama Ibukota	Jarak ke Ibukota Kab. (km)	Luas wilayah (km^2)	%	Jumlah Desa	Kel.	Dusun
1	Wewaria	Welamosa	53,00	292,94	14.05	22	-	73
2	Maukaro	Maukaro	97,00	216,66	10.39	11	-	35
3	Kotabaru	Kotabaru	117,00	199,70	9.58	13	-	38
4	Nangapanda	Ndorurea	29,00	190,31	9.13	28	1	89
5	Ende	Nangaba	9,00	164,99	7.91	32	-	91
6	Maurole	Maurole	84,00	155,14	7.44	13	-	39
7	Detusoko	Detusoko	33,00	144,27	6.92	20	1	74
8	Detukeli	Watunggere	57,00	112,29	5.39	13	-	41
9	Lepembusu Kelisoke	Peibenga	58,00	150,88	7.24	14	-	41
10	Ndona	Ndona	8,00	93,52	4.48	12	2	37
11	Wolowaru	Bokasape	65,00	64,53	3.09	16	1	57
12	Lio Timur	Watuneso	92,00	53,93	2.59	12	1	48
13	Ndona Timur	Demulaka	45,00	52,84	2.53	7	-	21
14	Kelimutu	Woloara	52,00	54,03	2.59	9	-	30
15	Wolojita	Wolojita	72,00	39,77	1.91	5	1	24
16	Ndori	Maubasa	87,00	26,71	1.28	10	-	29
17	Ende Timur	Wolowona	4,55	19,63	0.94	3	3	24
18	Ende Selatan	Tetandara	1,49	19,57	0.94	-	5	24
19	Ende Utara	Kotaraja	0,02	17,52	0.84	6	4	39
20	Pulau Ende	Rendoraterua	17,87	10,22	0.49	9	-	26
21	Ende Tengah	Paupire	3,50	5,75	0.28	-	4	13
		Total		**2.085,19**	**100**	**255**	**23**	**893**

Sumber Data : Ende Dalam Angka 2024, Data Desa Kelurahan DPMD (Olahan Bappeda)

Pada Tahun 2019, telah dipersiapkan proses pemekaran Desa untuk diusulkan ke pusat, yaitu sebanyak 9 Desa di 7 Kecamatan dan sampai dengan saat ini masih berstatus Desa Persiapan dan sedang dalam proses pengusulan ke tingkat Provinsi dan Pusat, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kecamatan dan Desa Pemekaran

Kecamatan	Desa Persiapan	Desa Induk
Wolojita	Waga	Pora
Kelimutu	Woloara Barat	Woloara
Wolowaru	Mbuliweragheta	Nakambara
Wewaria	Mautenda Selatan	Mautenda
Nangapanda	Maurongga	Raporendu
	Rendorua	Raporendu
	Tanarangga	Bheramari dan Jegharangga
Kotabaru	Kotabaru Tengah	Kotabaru
Ende	Tomberabu III	Tomberabu I

Sumber Data: DPMD Kabupaten Ende 2020

2. Letak, Kondisi Geografis dan Pembagian Wilayah Pelayanan

a. Posisi Astronomis

Kabupaten Ende terletak disebelah selatan khatulistiwa pada koordinat 121°21'6,44" sampai dengan koordinat 122° 1'28, 1604" Bujur Timur dan 08°55'28,35" sampai dengan 08°26'4,10" Lintang Selatan.

b. Posisi Geostrategik

Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Ende mempunyai posisi strategis karena beberapa alasan antara lain:

1) **Terletak di tengah-tengah Pulau Flores**, yang merupakan salah satu dari 3 pulau besar di provinsi NTT, diapit 5 (lima) Kabupaten di bagian barat, yaitu: Kabupaten Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat, dan 2 (dua) Kabupaten di bagian Timur, yaitu : Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur. Pada awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Provinsi Bali, NTB dan NTT masih dalam bentuk wilayah Nusa Tenggara, Kabupaten Ende merupakan Pusat Pemerintahan Flores.

2) Merupakan **jalur utama pelayaran khususnya di wilayah NTT dan bagian selatan Indonesia**, karena mempunyai akses langsung pelayaran laut menuju Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi dan Pulau Timor, serta Pulau Sumba di alur pelayaran Laut Sawu.

3) Kabupaten Ende berada pada **lintasan tujuan wisata utama Bali-Lombok-Flores**, dengan *focalpoint* keberadaan Danau Tiga Warna Kelimutu sebagai salah satu destinasi Pariwisata Flores.

4) Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Kabupaten Ende menjadi perhatian tersendiri karena merupakan tempat pengasingan Presiden Soekarno pada tahun 1934-1938, dan diyakini merupakan **tempat permenungan gagasan cemerlang Falsafah Negara Pancasila.**

c. Kondisi/Kawasan

Secara geografis dan topografis, kondisi kawasan yang ada di Kabupaten Ende, terdiri dari:

1) Wilayah Pedalaman

Wilayah pedalaman di Kabupaten Ende meliputi 163 Desa/Kelurahan, yang tersebar pada 15 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende, Ende,Ndona, Detusoko, Wewaria, Wolowaru, Wolojita, Maurole, Maukaro, LioTimur, Kotabaru, Kelimutu, Ende Utara, dan Kecamatan Ende Timur.

2) Wilayah Terpencil

Wilayah terpencil di Kabupaten Ende meliputi 90 desa, yang tersebar pada 13 kecamatan, yaitu: KecamatanNangapanda, Ende, Ndona, Wewaria, Wolowaru, Maurole, Maukaro, Lio Timur, Kotabaru, Detukeli, Ndona Timur, Ndori, dan Kecamatan Lepembusu Kelisoke.

3) Kawasan Pesisir/Kepulauan

Keberadaan kawasan pesisir yang ada di Kabupaten Ende terdiri dari wilayah pesisir bagian utara dan selatan, yaitu:

- Kawasan Pesisir Utara,meliputi: Kecamatan Maukaro, Maurole, Wewaria dan Kotabaru.
- Kawasan Pesisir Selatan, meliputi: Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Utara, Ende Selatan, Ndona, Wolojita, Wolowaru, Ndori, Lio Timur dan Pulau Ende.
- Selain kawasan pesisir di Kabupaten Ende terdapat satu pulau kecil, yaitu: Pulau Ende.

4) Kawasan Pegunungan

Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Ende merupakan pegunungan dan terdapat 2

(dua) gunung berapi aktif, yaitu: Gunung Iya dan Gunung Kelimutu serta merupakan areal kawasan hutan lindung dengan keberadaan Taman Nasional Kelimutu dan Hutan Kemang Boleng yang berada pada wilayah bagian tengah pegunungan yang ada di Kabupaten Ende.

Dilihat dari Tingkat Perkembangannya, dari 255 Desa yang ada di Kabupaten Ende dikategorikan sebagai: **1) Desa Sangat Tertinggal,** sebanyak 6 Desa atau sebesar 2,35%; **2) Desa Tertinggal**, sebanyak 174 Desa atau sebesar 68,23 %; **3) Desa Berkembang**, sebanyak 70 Desa atau sebesar 27,45%, dan **4) Desa Maju**, sebanyak 5 Desa atau sebesar 1,96%, dengan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Kategori Desa Berdasarkan Tingkat Perkembangannya

KECAMATAN	DESA SANGAT TERTINGGAL	DESA TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU
1) Ende Timur		1) Desa Kedebodu	1) Desa Ndungga	
		2) Desa Tiwutewa		
2) Nangapanda		1) Desa Watumite	1) Desa Tendarea	1) Desa Ondorea
		2) Desa Kerirea	2) Desa Jegharangga	
		3) Desa Zozozea	3) Desa Rapowawo	
		4) Desa Tiwerea	4) Desa Nggorea	
		5) Desa Sanggarhorho	5) Desa Raporendu	
		6) Desa Ndeturea	6) Desa Bheramari	
		7) Desa Ondorea Barat	7) Desa Ndeturea I	
		8) Desa Romarea	8) Desa Penggajawa	
		9) Desa Timbazia	9) Desa Mbobhenga	
		10) Desa Anaraja	10) Desa Tanazozo	
		11) Desa Malawaru	11) Desa Embuzozo	
		12) Desa Tenda Ondo		
		13) Desa Jemburea		
		14) Desa Uzuzozo		
		15) Desa Tendambepa		
		16) Desa Kekandere		
3) Pulau Ende		1) Desa Aejeti	1) Desa Puutara	
		2) Desa Rorurangga	2) Desa Paderape	
		3) Desa Redodori	3) Desa Ndoriwoi	
		4) Desa Kazokapo	4) Desa Rendoraterua	
		5) Desa Rengamenge		
4) Ende		1) Desa Tinabani	1) Desa Wajakea Jaya	
		2) Desa Embu Nggena	2) Desa Tonggopapa	
		3) Desa Nakuramba	3) Desa Rukuramba	
		4) Desa Embutheru	4) Desa Tomberabu II	
		5) Desa Wawonato	5) Desa Riaraja	
		6) Desa Nembo Ramba	6) Desa Mbotutenda	
		7) Desa Ndetundora I		
		8) Desa Uzuramba		
		9) Desa Wolokaro		
		10) Desa Randorama		
		11) Desa Jejaraja		
		12) Desa Randotonda		
		13) Desa Wologai		
		14) Desa Ndetundora III		
		15) Desa Worhopapa		
		16) Desa Ndetundora II		
		17) Desa Ranoramba		
		18) Desa Peozakaramba		
		19) Desa Uzuramba Barat		
		20) Desa Wologai II		
		21) Desa Raburia		
		22) Desa Tomberabu I		
		23) Desa Ja Moke Asa		
		24) Desa Emburia		
		25) Desa Tendambonggi		
		26) Desa Nuaja		
5) Ndona	1) Desa Kekasewa	1) Desa Wolotopo	1) Desa Manulondo	1) Desa Nanganesa
	2) DesaWolokota	2) Desa Ngalupolo	2) Desa Wolotopo Timur	
		3) Desa Ngaluroga	3) Desa Puutuga	

KECAMATAN	DESA SANGAT TERTINGGAL	DESA TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU
		4) Desa Nila		
		5) DesaKelikiku		
		6) Desa Reka		
6) Detusoko		1) Desa Randoria	1) Detusoko Barat	
		2) Desa Wolomasi	2) Desa Wolotolo	
		3) Desa Ranga	3) Desa Wolotolo Tengah	
			4) Desa Roa	
			5) Desa Saga	
			6) Desa Niowula	
			7) Desa Wolofeo	
			8) Desa Nua One	
			9) Desa Wologai	
			10) Desa Dile	
			11) Desa Ndito	
			12) Desa Sipiiena	
			13) Desa Turunalu	
			14) Desa Wologai Tengah	
			15) Desa Wolomage	
			16) Desa Rateroru	
			17) Desa Golulada	
7) Wewaria		1) Desa Mautenda	1) Desa Welamosa	
		2) Desa Mautenda Barat	2) Desa Mukusaki	
		3) Desa Wewaria		
		4) Desa Tanali		
		5) Desa Detubela		
		6) Desa Fataatu Timur		
		7) Desa Aelipo		
		8) Desa Ekoae		
		9) Desa Aemuri		
		10)Desa Ratewati		
		11)Desa Mbotulaka		
		12)Desa Numba		
		13)Desa Kelitembu		
		14)Desa Ratewati Selatan		
		15)Desa Ekolea		
		16)Desa Ae Ndoko		
		17) Desa Nuangenda		
		18)Desa Fataatu		
		19)Desa Waka		
		20)Desa Wolooja		
8) Wolowaru	1) Desa Likanaka	1) Desa Bokasape Timur	1) Desa Jopu	
		2) Desa Mbuliloo	2) Desa Lisedetu	
		3) Desa Rindiwawo		
		4) Desa Wolokoli		
		5) Desa Mbuliwaralau		
		6) Desa Mbuliwaralau Utara		
		7) Desa Nualise		
		8) Desa Wolosoko		
		9) Desa Liselowobora		
		10)Desa Nakambara		
		11)Desa Niramesi		
		12)Desa Tana Lo'o		
		13) Desa Lise Pu'u		
9) Wolojita		1) Desa Tenda	1) Desa Negela	
		1 Desa Wiwipemo		
		2 Desa Pora		
		3 Desa Nuamulu		
10) Maurole		1) Desa Ranokolo	1) Desa Aewora	1) Desa Maurole
		2) Desa Detuwulu	2) Desa Mausambi	2) Desa Watukamba
		3) Desa Otogedu	3) Desa Ranokolo Selatan	
		4) Desa Woloau	4) Desa Keliwumbu	
		5) Desa Ngalukoja		
		6) Desa Niranusa		
		7) Desa Uludala		

KECAMATAN	DESA SANGAT TERTINGGAL	DESA TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU
11) Maukaro		1) Desa Kebirangga Selatan		1) Desa Kebirangga
		2) Desa Kamubheka		
		3) Desa Magekapa		
		4) Desa Boafeo		
		5) Desa Nabe		
		6) Desa Mundinggasa		
		7) Desa Kolikapa		
		8) Desa Kebirangga Tengah		
		9) Desa Natanangge		
		10) Desa Kobaleba		
12) Lio Timur	1) DesaTanaroga	1) Desa Woloara		
		2) Desa Detupera		
		3) DesaWololela A		
		4) DesaLiabeke		
		5) DesaFatamari		
		6) DesaNua Lima		
		7) Desa Hobatua		
		8) DesaBu Tanalagu		
		9) Desa Wolosambi		
		10) Desa Ranggatalo		
		11) Mbewawora		
13) Kotabaru		1) Desa Tou	1) Desa Kotabaru	
		2) DesaNdondo	2) Desa Loboniki	
		3) Desa Nioponda	3) Desa Tou Timur	
		4) Desa Hangalande		
		5) Desa Tou Barat		
		6) Desa Liselande		
		7) Desa Rangalaka		
		8) Desa Pise		
		9) Desa Neotonda		
		10) Desa Nuanaga		
14) Kelimutu		1) Desa Nduaria	1) Desa Koanara	
		2) Desa Nuamuri	2) Desa Woloara	
		3) Desa Nuamuri Barat	3) Desa Waturaka	
		4) Desa Detuena	4) Desa Pemo	
		5) Desa Wolokelo		
15) Detukeli		1) Desa Nggesa	1) Desa Detukeli	
		2) Desa Kebesani	2) Desa Nggesabiri	
		3) Desa Wolomuku	3) Desa Watunggere Marilonga	
		4) DesaWatunggere	4) Desa Jeo Du'a	
		5) Desa Nida		
		6) Desa Maurole Selatan		
		7) Desa Detumbewa		
		8) Desa Kanganara		
		9) Desa Unggu		
16) Ndona Timur	1) Desa Kurulimbu Selatan	1) Desa Kurulimbu		
		2) Desa Sokoria		
		3) Desa Demulaka		
		4) Desa Roga		
		5) Desa Sokoria Selatan		
		6) Desa Nggiwa		
17) Ndori	1) Desa Mole	1) Desa Maubasa Timur	1) Desa Maubasa	
		2) Desa Wonda		
		3) Desa Lungaria		
		4) Desa Aebara		
		5) Desa Ratemangga		
		6) Desa Maubasa Barat		
		7) Desa Serandori		
		8) Desa Kelisamba		
18) Ende Utara			1) Desa Gheoghoma	
			2) Desa Borokanda	
			3) Desa Watusipi	
			4) Desa Mbomba	

KECAMATAN	DESA SANGAT TERTINGGAL	DESA TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU
			5) Desa Embundoa	
			6) Desa Raterua	
19) Lepembusu Kelisoke		1) Desa Mukureku	1) Desa Nggumbelaka	
		2) Desa Tiwusora	2) Desa Wologai Timur	
		3) Desa Ndikosapu	3) Desa Ndenggarongge	
		4) Desa Taniwoda	4) Desa Kuru	
		5) Desa Tanalangi	5) Desa Kurusare	
		6) Desa Detuara		
		7) Desa Isekuru		
		8) Desa Rutujeja		
		9) Desa Mukureku Sa'ate		
TOTAL	6 Desa Sangat Tertinggal	174 Desa Tertinggal	70 Desa Berkembang	5 Desa Maju

Sumber: DPMD, Indeks Desa Membangun Tahun 2020 Kabupaten Ende

d. Pembagian Wilayah Pelayanan

Pembagian Wilayah Pelayanan berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor 65/KEP/HK/2015 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan di Kabupaten Ende, sebagai berikut:

Tabel 2.4. Klasifikasi Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan

NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KLASIFIKASI DESA		
		DALAM KOTA	PEDALAMAN	TERPENCIL
1.	NANGAPANDA		Pedalaman	
	1) Kelurahan Ndorurea		Pedalaman	
	2) Desa Ondorea		Pedalaman	
	3) Desa Nggorea		Pedalaman	
	4) Desa Raporendu		Pedalaman	
	5) Desa Bheramari		Pedalaman	
	6) Desa Kerirea			Terpencil
	7) Desa Tendarea			Terpencil
	8) Desa Tendambepa			Terpencil
	9) Desa Rapowawo		Pedalaman	
	10) Desa Watumite			Terpencil
	11) Desa Zozozea		Pedalaman	
	12) Desa Ndorurea I		Pedalaman	
	13) Desa Ndeturea		Pedalaman	
	14) Desa Sanggarhorho		Pedalaman	
	15) Desa Tiwerea			Terpencil
	16) Desa Jegharangga		Pedalaman	
	17) Desa Penggajawa		Pedalaman	
	18) Desa Ondorea Barat		Pedalaman	
	19) Desa Uzuzozo			Terpencil
	20) Desa Timbazia		Pedalaman	
	21) Desa Mbobhenga		Pedalaman	
	22) Desa Malawaru			Terpencil
	23) Desa Anaraja		Pedalaman	
	24) Desa Kekandere		Pedalaman	
	25) Desa Tanazozo		Pedalaman	
	26) Desa Tenda Ondo			Terpencil
	27) Desa Jemburea			Terpencil
	28) Desa Embuzozo		Pedalaman	
	29) Desa Romarea			Terpencil
2.	PULAU ENDE		Pedalaman	
	1) Desa Roruangga		Pedalaman	
	2) Desa Puutara		Pedalaman	
	3) Desa Aejeti		Pedalaman	
	4) Desa Paderape		Pedalaman	
	5) Desa Ndorywoy		Pedalaman	
	6) Desa Rendoraterua		Pedalaman	
	7) Desa Redodoru		Pedalaman	
	8) Desa Kazo Kapo		Pedalaman	

NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KLASIFIKASI DESA		
		DALAM KOTA	PEDALAMAN	TERPENCIL
	9) Desa Renga Menge		Pedalaman	
3.	**ENDE**		**Pedalaman**	
	1) Desa Rukuramba		Pedalaman	
	2) Desa Riaraja		Pedalaman	
	3) Desa Mbotutenda			Terpencil
	4) Desa Wologai			Terpencil
	5) Desa Ndetundora I		Pedalaman	
	6) Desa Ndetundora II		Pedalaman	
	7) Desa Tomberabu I		Pedalaman	
	8) Desa Tomberabu II			Terpencil
	9) Desa Nakuramba		Pedalaman	
	10) Desa Wolokaro		Pedalaman	
	11) Desa Ja Mokeasa			Terpencil
	12) Desa Emburia		Pedalaman	
	13) Desa Randotonda		Pedalaman	
	14) Desa Raburia			Terpencil
	15) Desa Tinabani			Terpencil
	16) Desa Ndetundora III		Pedalaman	
	17) Desa Uzuramba			Terpencil
	18) Desa Tonggopana		Pedalaman	
	19) Desa Embutheru		Pedalaman	
	20) Desa Nua Ja		Pedalaman	
	21) Desa Wawonato			Terpencil
	22) Desa Jejaraja			Terpencil
	23) Desa Nemboramba		Pedalaman	
	24) Desa Embu Ngena		Pedalaman	
	25) Desa Rhandorama		Pedalaman	
	26) Desa Tendambonggi		Pedalaman	
	27) Desa Wologai Dua			Terpencil
	28) Desa Worhopapa		Pedalaman	
	29) Desa Ranoramba		Pedalaman	
	30) Desa Peozakaramba		Pedalaman	
	31) Desa Uzuramba Barat			Terpencil
	32) Desa Wajakea Jaya		Pedalaman	
4.	**ENDE SELATAN**	**Kota**		
	1) Kelurahan Paupanda	Kota		
	2) Kelurahan Rukunlima	Kota		
	3) Kelurahan Mbongawani	Kota		
	4) Kelurahan Tetandara	Kota		
	5) Kelurahan Tanjung	Kota		
5.	**NDONA**	**Kota**	**Pedalaman**	
	1) Kelurahan Lokoboko	Kota		
	2) Kelurahan Onelako	Kota		
	3) Desa Nanganesa	Kota		
	4) Desa Manulondo	Kota		
	5) Desa Wolotopo		Pedalaman	
	6) Desa Wolotopo Timur		Pedalaman	
	7) Desa Ngaluroga		Pedalaman	
	8) Desa Ngalupolo		Pedalaman	
	9) Desa Kekasewa			Terpencil
	10) Desa Nila			Terpencil
	11) Desa Puutuga		Pedalaman	
	12) Desa Wolokota			Terpencil
	13) Desa Kelikiku		Pedalaman	
	14) Desa Reka		Pedalaman	
6.	**DETUSOKO**		**Pedalaman**	
	1) Kelurahan Detusoko		Pedalaman	
	2) Desa Nuaone		Pedalaman	
	3) Desa Ranga		Pedalaman	
	4) Desa Wolomage		Pedalaman	
	5) Desa Golulada		Pedalaman	
	6) Desa Rateroru		Pedalaman	
	7) Desa Dile		Pedalaman	
	8) Desa Roa		Pedalaman	
	9) Desa Wolotolo		Pedalaman	
	10) Desa Wolotolo Tengah		Pedalaman	
	11) Desa Randoria		Pedalaman	
	12) Desa Wolomasi		Pedalaman	
	13) Desa Saga		Pedalaman	

NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KLASIFIKASI DESA		
		DALAM KOTA	PEDALAMAN	TERPENCIL
	14) Desa Nd.to		Pedalaman	
	15) Desa Niowula		Pedalaman	
	16) Desa Wolofeo		Pedalaman	
	17) Desa Sipijena		Pedalaman	
	18) Desa Detusoko Barat		Pedalaman	
	19) Desa Wologai		Pedalaman	
	20) Desa Wologai Tengah		Pedalaman	
	21) Desa Turunalu		Pedalaman	
7.	**WEWARIA**		**Pedalaman**	
	1) Desa Mukusaki		Pedalaman	
	2) Desa Acmuri		Pedalaman	
	3) Desa Ekoae		Pedalaman	
	4) Desa Wewaria		Pedalaman	
	5) Desa Fataatu Timur		Pedalaman	
	6) Desa Fataatu		Pedalaman	
	7) Desa Weiamosa		Pedalaman	
	8) Desa Nuangenda		Pedalaman	
	9) Desa Detubela		Pedalaman	
	10) Desa Tanali		Pedalaman	
	11) Desa Ratewati		Pedalaman	
	12) Desa Mautenda Barat			Terpencil
	13) Desa Mbotulaka			Terpencil
	14) Desa Mautenda		Pedalaman	
	15) Desa Kelitembu		Pedalaman	
	16) Desa Numba			Terpencil
	17) Desa Aelipo			Terpencil
	18) Desa Ratewati Selatan			Terpencil
	19) Desa Waka			Terpencil
	20) Desa Wolooja			Terpencil
	21) Desa Ekolea		Pedalaman	
	22) Desa Aendoko		Pedalaman	
8.	**WOLOWARU**		**Pedalaman**	
	1) Kelurahan Bokasape		Pedalaman	
	2) Desa Mbuliwaralau		Pedalaman	
	3) Desa Mbuliloo		Pedalaman	
	4) Desa Jopu		Pedalaman	
	5) Desa Rindiwawo		Pedalaman	
	6) Desa Lisedetu		Pedalaman	
	7) Desa Mbuliwaralau Utara		Pedalaman	
	8) Desa Bokasape Timur		Pedalaman	
	9) Desa Nualise		Pedalaman	
	10) Desa Liselowobora		Pedalaman	
	11) Desa Likanaka			Terpencil
	12) Desa Wolokoli		Pedalaman	
	13) Desa Wolosoko		Pedalaman	
	14) Desa Niramesi			Terpencil
	15) Desa Nakambara		Pedalaman	
	16) Desa Tana Lo'o		Pedalaman	
	17) Desa Ise Pu'u		Pedalaman	
9.	**WOLOJITA**		**Pedalaman**	
	1) Kelurahan Wolojita		Pedalaman	
	2) Desa Nuamulu		Pedalaman	
	3) Desa Nggela		Pedalaman	
	4) Desa Pora		Pedalaman	
	5) Desa Tenda		Pedalaman	
	6) Desa Wiwipemo		Pedalaman	
10.	**MAUROLE**		**Pedalaman**	
	1) Desa Maurole		Pedalaman	
	2) Desa Mausambi		Pedalaman	
	3) Desa Watukamba		Pedalaman	
	4) Desa Aewora		Pedalaman	
	5) Desa Keliwumbu		Pedalaman	
	6) Desa Ranokolo		Pedalaman	
	7) Desa Ranokolo Selatan		Pedalaman	
	8) Desa Otogedu			Terpencil
	9) Desa Detuwulu			Terpencil
	10) Desa Woloau		Pedalaman	
	11) Desa Ngalukoja		Pedalaman	
	12) Desa Niranusa		Pedalaman	

NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KLASIFIKASI DESA		
		DALAM KOTA	PEDALAMAN	TERPENCIL
	13) Desa Uludala		Pedalaman	
11.	**MAUKARO**		**Pedalaman**	
	1) Desa Kamubheka		Pedalaman	
	2) Desa Kebirangga		Pedalaman	
	3) Desa Kebirangga Selatan			Terpencil
	4) Desa Nabe		Pedalaman	
	5) Desa Kobaleba		Pedalaman	
	6) Desa Boafeo			Terpencil
	7) Desa Magekapa		Pedalaman	
	8) Desa Mundinggasa		Pedalaman	
	9) Desa Kolikapa		Pedalaman	
	10) Desa Kebirangga Tengah		Pedalaman	
	11) Desa Natanangge		Pedalaman	
12.	**LIO TIMUR**		**Pedalaman**	
	1) Kelurahan Watuneso		Pedalaman	
	2) Desa Hobatuwa		Pedalaman	
	3) Desa Wolosambi		Pedalaman	
	4) Desa Woloaro		Pedalaman	
	5) Desa Detupera			Terpencil
	6) Desa Wololele A			Terpencil
	7) Desa Liabeke		Pedalaman	
	8) Desa Fatamari			Terpencil
	9) Desa Ranggatalo		Pedalaman	
	10) Desa Nualima		Pedalaman	
	11) Desa Tanaroga		Pedalaman	
	12) Desa Bu Tanalagu			Terpencil
	13) Desa Mbewawora			Terpencil
13.	**KOTA BARU**		**Pedalaman**	
	1) Desa Kotabaru		Pedalaman	
	2) Desa Tou		Pedalaman	
	3) Desa Tou Timur		Pedalaman	
	4) Desa Loboniki		Pedalaman	
	5) Desa Hangalande			Terpencil
	6) Desa Ndondo		Pedalaman	
	7) Desa Niopanda			Terpencil
	8) Desa Tiwusora			Terpencil
	9) Desa Tou Barat		Pedalaman	
	10) Desa Liselande			Terpencil
	11) Desa Rangalaka		Pedalaman	
	12) Desa Pise			Terpencil
	13) Desa Neotonda		Pedalaman	
	14) Desa Nuanaga		Pedalaman	
14.	**KELIMUTU**		**Pedalaman**	
	1) Desa Nduaria		Pedalaman	
	2) Desa Nuamuri		Pedalaman	
	3) Desa Nuamuri Barat		Pedalaman	
	4) Desa Woloara		Pedalaman	
	5) Desa Koanara		Pedalaman	
	6) Desa Pemo		Pedalaman	
	7) Desa Waturaka		Pedalaman	
	8) Desa Detuena		Pedalaman	
	9) Desa Wolokelo		Pedalaman	
15.	**DETUKELI**			**Terpencil**
	1) Desa Maurole Selatan			Terpencil
	2) Desa Detumbewa			Terpencil
	3) Desa Nggesa			Terpencil
	4) Desa Watunggere			Terpencil
	5) Desa Nida			Terpencil
	6) Desa Kanganara			Terpencil
	7) Desa Kebesani			Terpencil

NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KLASIFIKASI DESA		
		DALAM KOTA	PEDALAMAN	TERPENCIL
	8) Desa Detukeli			Terpencil
	9) Desa Wolomuku			Terpencil
	10) Desa Unggu			Terpencil
	11) Desa Nggesa Biri			Terpencil
	12) Desa Watunggere Marilonga			Terpencil
	13) Desa Jeo Du'a			Terpencil
16.	**NDONA TIMUR**			**Terpencil**
	1) Desa Kurulimbu			Terpencil
	2) Desa Sokoria			Terpencil
	3) Desa Demulaka			Terpencil
	4) Desa Roga			Terpencil
	5) Desa Kurulimbu Selatan			Terpencil
	6) Desa Ngguwa			Terpencil
	7) Desa Sokoria Selatan			Terpencil
17.	**NDORI**			**Terpencil**
	1) Desa Wonda			Terpencil
	2) Desa Maubasa			Terpencil
	3) Desa Serandori			Terpencil
	4) Desa Kelisamba			Terpencil
	5) Desa Maubasa Timur			Terpencil
	6) Desa Mole			Terpencil
	7) Desa Lunggaria			Terpencil
	8) Desa Aebara			Terpencil
	9) Desa Ratemangga			Terpencil
	10) Desa Maubasa Barat			Terpencil
18.	**ENDE UTARA**	**Kota**		
	1) Kelurahan Kotaratu	Kota		
	2) Kelurahan Kotaraja	Kota		
	3) Kelurahan Roworena	Kota		
	4) Kelurahan Roworena Barat	Kota		
	5) Desa Borokanda	Kota		
	6) Desa Watusipi		Pedalaman	
	7) Desa Gheoghoma	Kota		
	8) Desa Mbomba	Kota		
	9) Desa Embundoa	Kota		
	10) Desa Raterua	Kota		
19.	**ENDE TENGAH**	**Kota**		
	1) Kelurahan Potulando	Kota		
	2) Kelurahan Onekore	Kota		
	3) Kelurahan Kelimutu	Kota		
	4) Kelurahan Paupire	Kota		
20.	**ENDE TIMUR**	**Kota**		
	1) Kelurahan Mautapaga	Kota		
	2) Kelurahan Rewarangga	Kota		
	3) Kelurahan Rewarangga Selatan	Kota		
	4) Desa Ndungga		Pedalaman	
	5) Desa Tiwutewa		Pedalaman	
	6) Desa Kedebodu		Pedalaman	
21.	**LEPEMBUSU KELISOKE**			**Terpencil**
	1) Desa Wologai Timur			Terpencil
	2) Desa Nggumbelaka			Terpencil
	3) Desa Mukureku			Terpencil
	4) Desa Kuru			Terpencil
	5) Desa Ndenggarongge			Terpencil
	6) Desa Ndikosapu			Terpencil

NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KLASIFIKASI DESA		
		DALAM KOTA	PEDALAMAN	TERPENCIL
	7) Desa Tanalangi			Terpencil
	8) Desa Taniwoda			Terpencil
	9) Desa Detuara			Terpencil
	10) Desa Kuru Sare			Terpencil
	11) Desa Lise Kuru			Terpencil
	12) Desa Rutu Jeja			Terpencil
	13) Desa Mukereku Sa Ate			Terpencil
JUMLAH DESA & KELURAHAN		25	163	90

Sumber Data : Keputusan Bupati Ende Nomor 65/KEP/HK/2015

3. *Topografi*

Kondisi topografi Kabupaten Ende terdiri atas perbukitan dan pegunungan yang menempati wilayah tengah dan selatan, sementara dataran rendah dengan sedikit perbukitan berada di wilayah utara. Secara keseluruhan terdapat 20,60% wilayah Kabupaten Ende (421km^2) berada pada ketinggian lebih dari 500 meter diatas permukaan laut (dpl). Kecamatan dengan tinggi rata-rata terbesar adalah Ndona Timur (1.148m dpl), dan yang paling rendah adalah Ende Selatan (306 m dpl).

Tabel 2.5. Ketinggian Rata rata dari Permukaan Laut (dpl) dan % Luas Wilayah menurut Ketinggian per Kecamatan

No.	Kecamatan	Tinggi Rata-rata Dari Permukaan Laut (m)	% Luas Wilayah berdasarkan Kategori Ketinggian DPL				Total Luas Wilayah (km^2)
			0–25 m	25–100 m	100–500 m	>500 m	
1	Nangapanda	441	0,71	15,55	50,91	32,83	213,17
2	Pulau Ende	229	-	-	-	-	63,03
3	Maukaro	589	-	-	-	-	102,6
4	Ende	589	1,78	7,73	45,80	44.69	179,5
5	Ende Selatan	306					12,65
6	Ende Timur	351	1 003	1971	384	64	38,76
7	Ende Tengah	317					7,43
8	Ende Utara	351	1 003	1971	384	64	48,55
9	Ndona	698	7,80	10.58	31,44	50,18	106,47
10	Ndona Timur	1148	7,80	10.58	31,44	50,18	40,24
11	Wolowaru	777	-	0,51	72,77	26,72	66,84
12	Wolojita	847	-	26,90	71,77	1,39	32,9
13	Lio Timur	814	-	14,08	75,62	10,30	46,79
14	Kelimutu	988					58,94
15	Ndori	319					5,94
16	Maurole	587	9,9	12.15	33.6	44.33	155,94
17	Kotabaru	783	7,80	10,58	31,44	40.18	179,81
18	Detukeli	911	-	8,08	12,16	90,24	198,81
19	Lepembusu Kelisoke	913					136,2
20	Detusoko	891	-	5,46	36,62	57,92	194,07
21	Wewaria	506	-	25,47	52,61	21,91	157,95

Sumber: BPS, Ende Dalam Angka 2024 dan Bappeda Kab. Ende 2024

Berdasarkan kemiringan tanah (lereng), sebagian besar wilayah Kabupaten Ende (58,40% atau ±1.195 km^2) berada pada kemiringan diatas 40%. Data kemiringan tanah masing-masing kecamatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6. Kemiringan Tanah (Lereng) dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Ende

No	Kecamatan	Kemiringan Tanah (lereng) – Slope (%)							
		0- slope		3-12% slope		12-40% slope		>40% slope	
		%	Luas (km^2)	%	Luas (km^2)	%	Luas (km^2)	%	Luas (km^2)
1	Nangapanda	5,20	11,08	6,56	13,98	83.81	178,66	4,43	9,44
2	Pulau Ende	5,50	3,47	7,01	4,42	5.34	3,37	82,15	51,78

No	Kecamatan	Kemiringan Tanah (lereng) – Slope (%)							
		0- slope		3-12% slope		12-40% slope		>40% slope	
		%	Luas (km^2)	%	Luas (km^2)	%	Luas (km^2)	%	Luas (km^2)
3	Maukaro	2,30	2,36	4,12	4,23	23.55	24,16	70,03	71,85
4	Ende	2,41	4,33	8,49	15,24	8.68	15,58	80,42	144,35
5	Ende Selatan	6,60	0,83	22,08	2,79	36.11	4,57	35,21	4,45
6	Ende Timur	4,71	1,83	15,26	5,91	17.58	6,81	62,45	24,21
7	Ende Tengah	7,97	0,59	34,44	2,56	22.62	1,68	34,97	2,60
8	Ende Utara	4,21	2,04	15,23	7,39	13.03	6,33	67,53	32,79
9	Ndona	0,41	0,44		0,00	22.73	24,20	76,86	81,83
10	Ndona Timur	0,28	0.11		0,00	21.31	8.58	78,41	31,55
11	Wolowaru	-	0,00	3,38	2,26	17.73	11,85	78,89	52,73
12	Wolojita	-	0,00	3,43	1,13	22.32	7,34	74,25	24,43
13	Lio Timur	-	0,00	3,28	1,53	17.40	8,14	79,32	37,11
14	Kelimutu	-	0,00	5,11	3,01	26.20	15,44	68,89	40,60
15	Ndori	-	0,00	2,94	0,17	29.76	1,77	67,30	4,00
16	Maurole	3,94	6,14	5,78	9,01	42.72	66,62	47,56	74,17
17	Kotabaru	0,33	0,59	5,62	10,11	46.59	83,77	47,46	85,34
18	Detukeli	6,60	13,12	8,21	16,32	17.45	34,69	67,74	134,67
19	Lepembusu Kelisoke	1,32	1,80	4,28	5,83	12.39	16,88	82,01	111,70
20	Detusoko	3,21	6,23	6,14	11,92	40.58	78,75	50,07	97,17
21	Wewaria	3,61	5,70	6,49	10,25	40.30	63,65	49,60	78,34
Total Luasan (km^2)		**60,67**		**128,08**		**662,84**		**1195,12**	
% TerhadapTotal Wilayah		**2,96**		**6,26**		**32,39**		**58,40**	

Sumber: Ende Dalam Angka 2024 dan Bappeda Kab. Ende 2024

4. *Geologi*

Pembagian wilayah Kabupaten Ende menurut kedalaman tanah efektif terbagi atas: 52,96 % wilayah memiliki kedalaman tanah efektif 0–30 cm; dan 11,32% memiliki kedalaman tanah efektif 30–60 cm; serta 30,22% memi liki kedalaman tanah efektif 60–90 cm; sementara itu 5,5% wilayah kedalaman tanah efektif diatas 90 cm. Jenis tanah di Kabupaten Ende di dominasi tanah mediteran dengan bentuk wilayah volcano, dengan tekstur tanah yang terdiri atas 22,99% tekstur tanah sedang, 57,11% tekstur tanah kasar, 3,70% tekstur tanah halus dan sisanya sebesar 16,90% tidak dikategorikan.

Tabel 2.7. Persentase Luas Wilayah menurut Tekstur Tanah per-Kecamatan

No.	Kecamatan	Jenis Tekstur			Total Luas Wilayah (km^2)
		Sedang	Kasar	Halus	
1	Nangapanda	35.13	33.69	31.18	213.17
2	PulauEnde	35.28	33.71	31.01	63.03
3	Maukaro	33.05	34.19	32.67	102.6
4	Ende	50.09	49.91	-	179.5
5	EndeSelatan	49.92	50.08	-	12.65
6	EndeTimur	49.89	50.11	-	38.76
7	EndeTengah	50.14	49.86	-	7.43
8	EndeUtara	49.90	50.10	-	48.55
9	Ndona	49.67	50.33	-	106.47
10	Ndona Timur	40.64	50.36	-	40.24
11	Wolowaru	49.70	50.30	-	66.84
12	Woloji.ta	49.71	50.29	-	32.9
13	Lio Timur	49.71	50.29	-	46.79
14	Kelimutu	49.63	50.37	-	58.94
15	Ndori	49.71	50.29	-	5.94
16	Maurole	50.00	50.00	-	155.94
17	Kotabaru	50.00	50.00	-	179.81
18	Detukeli	50.00	50.00	-	198.81
19	Lepembusu Kelisoke	33.42	33.55	33.03	33.62
20	Detusoko	33.30	33.56	33.14	194.07
21	Wewaria	33.35	33.61	33.04	157.95

Sumber: Ende Dalam Angka 2024 (Kantor Pertanahan Kabupaten Ende)

5. *Hidroiogi*

Hutan lindung sepanjang bagian tengah wilayah, menyebabkan banyaknya sebaran daerah aliran sungai (DAS) dan mata air di Kabupaten Ende. Beberapa DAS besar antara lain Kali Nangapanda, Kali Nangaba, Kali Wolowona, Kali Loworea, Kali Ndondo, dan Kali Lowo Lande, hampir setiap tahun

mengalami banjir. Mata air tersebar pada beberapa wilayah dengan debit berkisar 4-17 liter/detik. Beberapa Mata Air yang ada, diantaranya : Mata Air Woloare, Aekipa, Aepana, Nangapanda, Ae Ino, Seke Mele, Aewanda, Aemuri, Kena Fiko dan Lio Lo'o telah dimanfaatkan oleh Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) untuk pemenuhan kebutuhan, air bersih masyarakat Kota Ende, Kecamatan Nangapanda, Detusoko, Wolowaru dan Kecamatan Maurole. Beberapa mata air dalam debit yang lebih kecil dimanfaatkan untuk fasilitas air bersih perdesaan.

Tabel 2.8. Daerah Aliran Sungai dan Mata Air di Kabupaten Ende

No	Kecamatan	Nama Sungai (DAS)	Nama Mata Air (debit-liter/detik)	Keterangan
1	Nangapanda	Lowo Nangapanda	Mata Air Nangapanda(10)	PDAM Nangapanda
2	Pulau Ende			
3	Maukaro	Lowo Bengge, Ae Moiumbai, Rowo		
4	Ende	Lowo Nangaba		PDAM/ IKK Nangaba
5	Ende Selatan			
6	Ende Timur	Lowo Wolowona	Mata Air Aewanda	
7	Ende Tengah			
8	Ende Utara	Manungae	Mata air Woloare (4),Mata air Aemuri (5)	PDAM Kota Ende
9	Ndona	Lowo Wolotopo dan Ngalupolo	Mata air aepana (19),Mata air Aekipa (12)	PDAM Kota Ende dan Ndona
10	Ndona Timur	Lowo Aebai, LowoRia		
11	Wolowaru	Lowo Ae Bela, Lowo Ae Hepo	Mata Air Lia Lo'o(7),Seke Mele(-)	PDAM Wolowaru
12	Wolojita	Lowo Aebai		
13	Lio Timur	Lowo Lise		
14	Kelimutu	Lowo Aebara, Lowo Ria	Mata air Moni (4)	
15	Ndori	Lowo Ria		
16	Maurole	Lowo bajo	Mata Air Ae Ino(7)	PDAM Maurole
17	Kotabaru	Lowo Ndondo, Lowo Lande		
18	Detukeli	Lowo Laka, Lowo Pemoria		
19	Lepembusu Kelisoke	Lowo Lise, Lowo Pombo		
20	Detusoko	Lowo Ria	Mata Air Kena Fiko	PDAM Detusoko
21	Wewaria	Lowo Rea		

Sumber: Ende Dalam Angka 2024

6. *Klimatologi*

Kabupaten Ende beriklim tropis agak kering, dengan suhu berkisar antara 22,5–34^{0}C. Curah hujan berkisar antara 0-549 mm/tahun, dengan tingkat intensitas hujan sedang. Jumlah hari hujan sebanyak 128 hari, dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari. Kelembaban udara rata-rata sebesar 80,4 gr/m^3, dengan rata-rata kelembaban minimum sebesar 68,7gr/m^{3}dan maksimum sebesar 89 gr/m^3.

7. *Penggunaan Lahan*

Penggunaan lahan di KabupatenEnde diarahkan dengan memerhatikan Rencana Pola Ruang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031 dan hasil peninjauan kembali. Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Ende, meliputi: Kawasan Lindung seluas 77.669,33 ha (37,95%) dan Kawasan Budidaya seluas 126.990,72 ha (62,05%), dengan rincian luas masing-masing penggunaan lahan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende

NO	Penggunaan Lahan	Luas (km^2)	%
I	**Kawasan Lindung**	**77,669.33**	**37,95**
	1 Kawasan Hutan Lindung	31,689.95	15.48

NO		Penggunaan lahan	Luas (km^2)	%
		* Hutan Lindung	24,193.34	11.82
		* Cagar Alam	1,958.24	0.96
		* Taman Nasional	5,538.37	2.71
	2	Kawasan yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	33,295.46	16.27
		* Kawasan Resapan Air	26,236.67	12.82
		* Sempadan Pantai	1,971.28	0.96
		* Sempadan Sungai	4,484.47	2.19
		* Hutan Bakau (Mangrove)	603.04	0.29
	3	Kawasan Perlindungan Setempat	12,683.92	6.20
		* Kawasan Rawan Bencana Gunung Api	390.91	0.19
		* Kawasan Perlindungan SetempatTerhadap GerakanTanah	12,293.01	6.01
II	Kawasan Budidaya		**126,990.72**	**62.05**
	1	Daerah Permukiman	12,935.72	6.32
	2	Kawasan Kebun Campuran	14,365.98	7.02
	3	Lahan Penggembalaan	9,279.23	4.53
	4	Pertanian Lahan Basah	1,935.55	0.95
	5	Pertanian Lahan Kering	38,236.64	18.68
	6	Hutan Produksi		
		* Hutan Produksi	*35,290.94*	17.24
		* Hutan ProduksiTerbatas	*6,150.63*	3.01
		* Hutan Produksi Konversi	*1,186.03*	0.58
	7	Pertambangan	*7.610*	3.72
		TOTALI+II	**204,660.05**	**100**

Sumber: RTRW Kabupaten Ende 2011-2031

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Ende didasarkan pada karakteristik Kabupaten Ende, dan diarahkan sesuai strategi dan kebijakan pemanfaatan pola ruang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031.

Potensi sektor menurut Rencana Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Ende meliputi 5 (lima) Wilayah Pengembangan, sebagai berikut:

a) Wilayah Pengembangan I (WP I)

Wilayah Pengembangan I, meliputi: Kecamatan Ende, Ende Tengah, Ende Timur dan Ende Utara dan Ende Selatan. **Wilayah ini memiliki potensi pengembangan pada sektor pariwisata, perikanan dan industri.** Potensi spesifik pada wilayah ini antara lain Situs Bung Karno dan peninggalan sejarah tugu Flores dan taman kota, serta panorama pantai dengan wisata kuliner. Pengembangan potensi perikanan diarahkan sebagai pusat pengumpul hasil penangkapan untuk wilayah perairan pantai selatan dengan ketersediaan dermaga pendaratan ikan dan pabrik es di Kecamatan Ende Selatan. Sektor industri kecil difokuskan pada pengembangan usaha tenun ikat dan makanan. Di wilayah ini terdapat komoditas pertanian yang memiliki nilai rasa khas yaitu ubi kayu nuabosi yang dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan Kabupaten Ende, selain pengembangan komoditas kelapa dan kopi, dan pemeliharaan usaha ternak kecil.

b) Wilayah Pengembangan II (WP II)

Wilayah Pengembangan II, meliputi: Kecamatan Detusoko, Detukeli, Lepembusu Kelisoke, Ndona Timur dan Ndona, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Detusoko. **Wilayah ini memiliki potensi yang dikembangkan pada sektor pariwisata, industri rumah tangga (pembuatan souvenir), pertambangan, perkebunan dan pertanian.** Potensi spesifik pada wilayah ini meliputi lahan persawahan dengan keunikan pematangnya (sawah bertingkat), wisata permandian air panas Detusoko, pengembangan industri rumah tangga minuman dari buah-buahan, perkampungan adat Wolotopo dan Wologai, serta Mumi di Desa Wologai Kecamatan Detusoko. Potensi pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan adalah sayur-sayuran dan buah, tanaman biofarma (jahe), kopi, jambu mente, kemiri. Dalam rangka mendukung pengembangan industri, terdapat potensi pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi di Mutubusa Desa Sokoria Kecamatan Ndona Timur.

c) Wilayah Pengembangan III (WP III)

Wilayah Pengembangan III, meliputi: Kecamatan Wolowaru, Wolojita, Kelimutu, Lio Timur, Ndori, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Wolowaru. **Wilayah ini memiliki potensi pada sektor pariwisata,**

pertanian, industri dan pertambangan. Potensi spesifik pada wilayah ini adalah kawasan Taman Nasional Kelimutu dengan keunikan danau tiga warnanya, didukung potensi perkampungan adat dan industri tenun ikat khas dan souvenir, pengembangan agrowisata pada kawasan sekitar Taman Nasional Kelimutu, serta pasar tradisonal di Nduaria Kecamatan Kelimutu. Pada sektor industri berpotensi dikembangkan kawasan industri pengolahan kacang mete, dan kakao. Potensi perkebunan yang dapat dikembangkan adalah kopi dan kakao.

d) Wilayah Pengembangan IV (WP IV)

Wilayah Pengembangan IV, meliputi: Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende dan Maukaro, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Nangapanda. **Wilayah ini memiliki potensi pada sektor pertambangan, pariwisata, perkebunan, dan perikanan.** Potensi spesifik wilayah yang mempunyai prospek antara lain batu hijau (Zeolit) dipesisir pantai selatan Kecamatan Nangapanda, industri agro berbasis pengelolaan hasil perikanan dan kelautan, serta wisata peninggalan benteng Portugis di Pulau Ende. Sektor pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah kakao, kopi, kelapa dan cengkeh, serta areal sawah di Kecamatan Maukaro yang dapat dikembangkan menjadi pusat produksi padi sawah di Kabupaten Ende. Pada sektor pariwisata dapat dikembangkan wisata pantai/bahari pantai Jagapo di Desa Kobaleba, Pantai Maukaro, dan Danau Alam Tiwu Lewu di desa Kebirangga Tengah Kecamatan Maukaro.

e) Wilayah Pengembangan V (WP V)

Wilayah Pengembangan V, meliputi: Kecamatan Maurole, Wewaria, Kotabaru dengan Pusat WP adalah Kecamatan Maurole. **Wilayah pengembangan ini mempunyai potensi pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan.** Potensi spesifik wilayah ini antara lain padi sawah mengingat ketersediaan jaringan irigasi teknis yang cukup memadai, jambu mente, serta potensi pengembangan ternak sapi, kerbau dan kuda. Pada sektor pariwisata di kembangkan wisata pantai seperti Enabara dan pantai Maurole, serta Danau Alam Tiwusora dan Danau Bou. Wilayah ini berpotensi dalam pengembangan industri berbasis pertanian dan perkebunan, mengingat ketersediaan suplai energi listrik (PLTU Ropa) dan berada pada jalur jalan strategis nasional Pantura Flores.

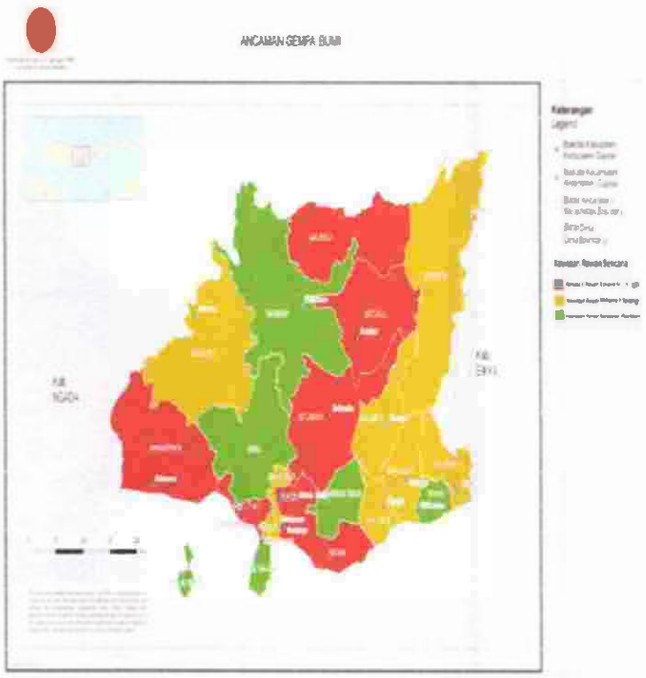
Pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Ende tersebut diatas sejalan dengan kebijakan pengembangan wilayah nasional, Provinsi NTT, serta Kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo sebagai kabupaten yang berbatasan langsung, yang meliputi:

a. Dalam skala wilayah nasional, **Kota Ende merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW),** yang didukung kebijakan pengembangan Bandara Haji Hasan Aroeboesman sebagai Bandar Udara Pengumpul Skala Tersier, serta termasuk dalam Kawasan Andalan Ende-Maumere, dan Kawasan Lindung Nasional Kelimutu;
b. Dalam skala regional Provinsi NTT, termasuk dalam **Wilayah Pengembangan II,** dengan fokus pengembangan pada kawasan pesisir dan kota pelabuhan, dengan arahan fungsi sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan, pelayanan transportasi, pelayanan pariwisata dan agribisnis;
c. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Sikka, di wilayah Kecamatan Mego yang diarahkan pada pengembangan hutan produksi, serta Kecamatan Magepanda dengan arahan pengembangan dibidang pertanian, dan peternakan (lahan penggembalaan), yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan di wilayah Kecamatan Lio Timur dan Kotabaru;
d. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Nagekeo, diwilayah Kecamatan Wolowae yang diarahkan pada pengembangan kawasan hutan lindung di Desa Tendatoto, dan kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, kebun campuran di Desa Tendakinde, yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan di wilayah Kecamatan Nangapanda dan Maukaro.

2.1.1.3. Kawasan Rawan Bencana Alam

a) Gempa Bumi

Kabupaten Ende dikenal sebagai salah satu lokasi rawan gempa di Indonesia. Daerah ini mempunyai pertumbuhan penduduk yang cepat, termasuk bangunan yang ada, khususnya di Kota Ende dan sekitarnya. Sejumlah gempa bumi yang merusak telah menghantam daerah ini antara lain gempa bumi Maumere tahun 1989 dan 1992. Gempa bumi di Kabupaten Ende umumnya diakibatkan oleh saling bergeseknya tepian zona sub duksi atau jaiur patahan *(fiault)* aktif. Intensitas maksimum suatu gempa bumi dianggap merusak yang dapat dicatat didaerah ini adalah antara skala VIIIdan IX- (MMI) Scale.



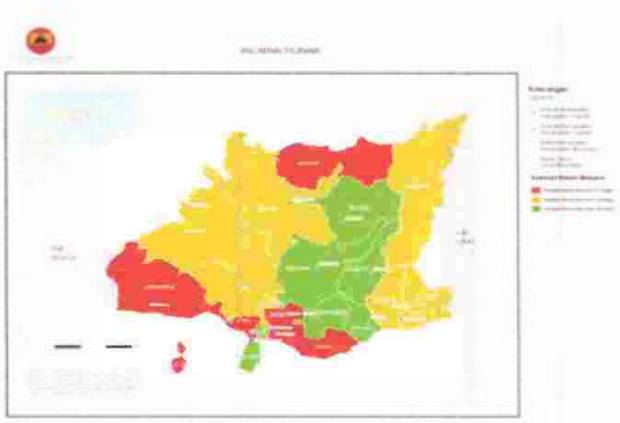
Tabel 2.10 Zonasi Ancaman Gempa di Kabupaten Ende

Zonasi	Wilayah Kecamatan	Gambaran Bahaya Gempa Bumi
Bahaya Gempa sangat Tinggi	Ende, Ndona, Detusoko, Wewaria, Maurole, dan Detukeli	Goncangan tanah kuat, patahan gempa, gerakan tanah (jatuhan tanah dan batuan), retakan tanah dan lukuifaksi
Bahaya Gempa Tinggi	Nangapanda, Maukaro, Ende dan Ende Utara	Goncangan tanah kuat, patahan gempa, gerakan tanah (jatuhan tanah dan jatuhan batuan, jatuhan bahan rombakan, lincuran rombakan), retakan tanah dan likuifaksi
Bahaya/kerentanan gempa Sedang	Maukaro, Ende, Detusoko, Wewaria, Maurole,	Goncangan tanah sedang, retakan tanah dan patahan gempa, serta likuifaksi
Bahaya Gempa Sedang-Rendah	Ende Utara, Ende Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ndona, Ndona Timur, Wolowaru, Wolojita, Lio Timur, Ndori, Detusoko,Kelimutu,	Goncangan tanah, gerakan tanah (jatuhan batuan, rayapan tanah, glinciran rombakan)
Bahaya Gempa Rendah	Nangapanda, Maukaro, Ende, Ende Utara, Ende Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ndona, Ndona Timur, Wolowaru, Wolojita, Lio Timur,	Goncangan tanah, retakan tanah dan gerakan tanah

Sumber: RTRW Kabupaten Ende 2011-2031

b) Tsunami dan Gelombang Pasang

Potensi rawan bencana tsunami/gelombang pasang terjadi pada hampir seluruh wilayah pesisir pantai Kabupaten Ende. Tsunami terkait erat dengan tingginya ancaman gampa bumi di Kabupaten Ende. Wilayah yang mempunyai potensi bencana tsunami/gelombang pasang di Kabupaten Ende antara lain.



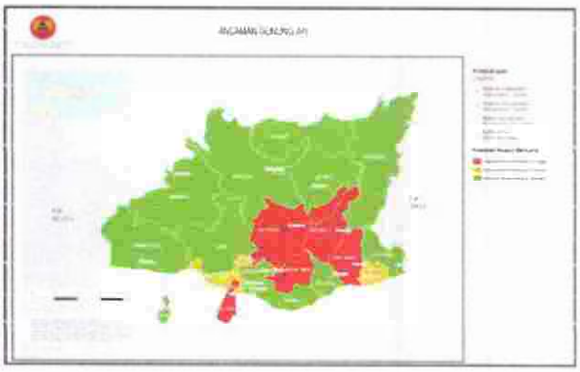
Tabel 2.11 Wilayah Ancaman Tsunami/Gelombang Pasang di Kabupaten Ende

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Nangapanda	Desa Bheramari, Raporendu Ondorea, Ondorea Barat, Kelurahan Ndorurea, Ndorurea I, Nggorea, Penggajawa.
2	Pulau Ende	Desa Puutara, Roruranggа, Rendoraterua, Aejeti, Ndoriwoy, Redodori dan Paderape
3	Ende	Desa Rukuramba
4	Ende Selatan	Kelurahan Rukun Lima, Kelurahan Mbongawani, Tetandara, Paupanda dan KelurahanTanjung
5	Ende Utara	Kelurahan Kota Raja, Kota Ratu, Desa Borokanda, dan Desa Gheogoma
6	Ende Timur	Kelurahan Mautapaga
7	Ndona	Desa Nanganesa, Wolotopo, Wolotopo Timur, Ngalupolo, Reka, Nila, Desa Kekasewa, Ngaluroga
8	Wewaria	Desa Aemuri, Desa Mukusaki, Desa Ekoae, dan Desa Wewaria
9	Maukaro	Desa Magekapa, Desa Kobaleba, Desa Kebirangga, dan Desa Nabe
10	Maurole	Desa Aewora, Watukamba, Ranakolo, Ranakolo Selatan, Maurole, Mausambi, dan Keliwumbu
11	Kotabaru	Desa Loboniki dan Desa Kotabaru
12	Wolowaru	Desa Mbuliwaralau
13	Lio Timur	Desa Hobatua
14	Ndori	Desa Maubasa, Desa Maubasa Timur dan Desa Serandori

Sumber: RTRW Kabupaten Ende 2011-2031

c) **Letusan Gunung Berapi**

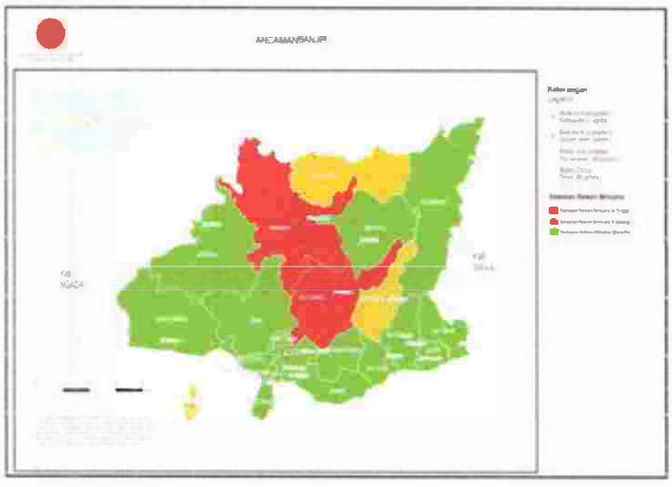
Terdapat dua gunung api aktif di Kabupaten Ende yaitu Gunung Iya dan Gunung Kelimutu, yang memberi ancaman pada wilayah sekitarnya, yaitu: Kecamatan Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Utara, Ende Timur, Ndona Timur, Detusoko, Wolowaru, Kelimutu dan Wolojita;



d) **Debris Flow**

Debris Flow adalah campuran air dan tanah, bongkahan batu dan kerikil yang turun meluncur melalui celah-celah aliran. Penyebab terjadinya *debris flow* selalu dipicu oleh turun hujan yang sangat lebat mengikuti alur jurang, anak sungai dan dasar aliran. Dengan kondisi topografi wilayah dan banyaknya alur jurang, anak sungai dan dasar aliran, seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Ende berpotensi mengalami *debris flow*, kecuali Kecamatan Ende Tengah;

e) **Banjir**

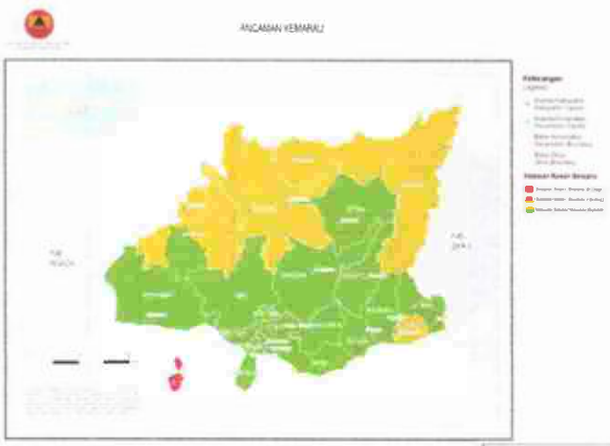


Banjir adalah peningkatan debit air di atas kondisi normal yang melebihi daya tampung badan alirnya (sungai dan anak sungai) karena terjadinya hujan yang sangat lebat dan akhirnya melanda daerah yang dekat dengan sungai dan terletak bagian bawah. Sebagian besar sungai berpotensi banjir, terutama kali Wolowona, kali Nangaba, kali Nangapanda, dan Kali Loworea.

f) **Tanah Longsor**

Dengan keadaan topografi merupakan perbukitan dan pegunungan, sebagian besar wilayah Kabupaten Ende merupakan daerah rawan longsor. Bahaya ancaman longsor yang dominan adalah longsoran pada badan jalan. Ancaman terhadap perumahan relatif kecil, namun perlu mendapat perhatian sebagai akibat pertumbuhan permukiman yang tidak dikendalikan secara baik, seperti beberapa lokasi diwilayah Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah.

g) **Kekeringan**



Kekeringan sering terjadi di wilayah Kabupaten Ende yang merupakan daerah *semiarid* yakni musim hujan lebih pendek dan musim kemarau lebih panjang. Musim hujan berlangsung selama 3-4 bulan (desember- maret) dan musim kemarau langsung selama 8-9 bulan (April- November). Berdasarkan hasil analisis, kecamatan dengan ancaman kekeringan tinggi adalah Kecamatan Pulau Ende, kecamatan dengan ancaman kekeringan sedang meliputi Kecamatan Wewaria, Maukaro, Maurole, Kotabaru, dan Ndori dan kecamatan dengan ancaman kekeringan rendah antara lain Kecamatan Nangapanda, Ende Timur, Ende Selatan, Ende Utara, dan Kecamatan Ende.



h) **Angin Ribut**

Angin sering terjadi tiap tahun diwilayah Kabupaten Ende. Berdasarkan hasil analisis, seluruh kecamatan di Kabupaten Ende tergolong dalam ancaman angin ribut rendah. Daerah yang pernah mengalami angin ribut antara lain Kecamatan Detukeli, Wewaria, Wolojita, Pulau Ende, Kelimutu, Ende, dan Kecamatan Maurole.



i) **Abrasi**

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Abrasi sering terjadi di wilayah Kabupaten Ende khususnya di wilayah sepanjang pesisir pantai. Daerah yang sering mengalami abrasi antara lain Kecamatan Ndori, Nangapanda, Ndona, Maukaro, Kotabaru, Maurole, Lio Timur, Ende, Ende Selatan, dan Ende Utara.

2.1.1.4. Demografi

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Publikasi BPS Ende (*Ende Dalam Angka Tahun 2024*), **menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Ende sampai akhir tahun 2023 mencapai 278.581 jiwa terdiri atas 136.536 jiwa penduduk laki-laki dan 142.045 penduduk perempuan.** Jika dibanding dengan data hasil Sensus Penduduk 2021 (SP 2021), terjadi peningkatan sebesar 6.503 jiwa dari keadaan 272.078 jiwa pada

tahun 2021.

Secara kewilayahan penduduk Kabupaten Ende terkonsentrasi di daerah perkotaan (±27,33%), terutama di Kecamatan Ende Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa perkotaan masih merupakan daya tarik utama bagi penduduk, baik dari desa maupun masyarakat luar wilayah untuk mencari pekerjaan, bersekolah, serta aktifitas kegiatan lain. Realitas perkembangan fasilitas pendidikan (tinggi), serta usaha jasa dan perdagangan turut mempengaruhi perkembangan penduduk di Kota Ende. Penduduk terbesar berada di Kecamatan Ende Selatan sebanyak **26.481** jiwa, disusul Kecamatan Ende Tengah sebanyak **24.142** jiwa dan Nangapanda sebanyak **23.703** jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Ndona Timur, yaitu sebanyak **5.106** jiwa.

Dengan luas wilayah 2.067,75 km², tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Ende Tahun 2023 adalah sebesar 133,60 jiwa/km². Kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Ende Tengah (4.198,61 jiwa/km2), sedangkan yang paling jarang adalah Kecamatan Lepembusu Kelisoke dengan tingkat kepadatan 36,09 jiwa/km². Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan (*sexratio*) keadaan Tahun 2023 adalah sebesar 96,12%.

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk, Rasio jenis Kelamin, Kepadatan Penduduk Tahun 2021 – 2023

KECAMATAN	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk	% Penduduk
01. Nangapanda	23.703	99,72	8,51	8,51
02. Pulau Ende	8.863	95,52	3,18	3,18
03. Maukaro	8.000	101,16	2,87	2,87
04. Ende	18.001	94,61	6,46	6,46
05. Ende Selatan	26.481	93,14	9,51	9,51
06. Ende Timur	19.736	92,77	7,08	7,08
07. Ende Tengah	24.142	92,38	8,67	8,67
08. Ende Utara	18.562	96,22	6,66	6,66
09. Ndona	14.262	95,75	5,12	5,12
10. Ndona Timur	5.106	102,78	1,83	1,83
11. Wolowaru	16.606	93,18	5,96	5,96
12. Wolojita	6.361	93,34	2,28	2,28
13. Lio Timur	8.191	96,90	2,94	2,94
14. Kelimutu	7.228	91,47	2,60	2,60
15. Ndori	5.968	91,53	2,14	2,14
16. Maurole	11.807	93,68	4,24	4,24
17. Kotabaru	10.632	98,28	3,82	3,82
18. Detukeli	6.948	98,12	2,49	2,49
19. Lepembusu Kelisoke	5.445	94,95	1,96	1,96
20. Detusoko	14.621	106,22	5,25	5,25
21. Wewaria	17.918	102,01	6,43	6,43
2022	273.553	95,80	131,19	100
2021	272.078	95,85	131,76	100
2020				
2019				

Sumber Data: BPS, Kabupaten Ende Dalam Angka 2022, 2023 dan 2024

Sebanyak 47,35% dari total jumlah penduduk Kabupaten Ende adalah penduduk usia produktif/dewasa (15-49 tahun). Proporsi ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022) yang sebesar 53,44%.

Gambaran jumlah penduduk menurut kelompok umur sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Kabupaten Ende Menurut Kelompok Umur Tahun 2021- 2023

Kelompok Umur	Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023			
	L	P	Total	%	L	P	Total	%	L	10802	Total	%
0–410	10,824	10,248	21,072	7.74%	10,773	10,206	20,979	7.67%	10,824	10,412	21,236	7.62%
5–912	12,955	12,334	25,289	9.29%	12,947	12,325	25,272	9.24%	12,131	11,510	23,641	8.49%
10–14	12,163	11,319	23,482	8.63%	12,213	11,419	23,632	8.64%	12,762	11,993	24,755	8.89%
15–19	11,843	11,290	23,133	8.50%	11,759	11,183	22,942	8.39%	11,873	11,132	23,005	8.26%
20–24	12,371	11,926	24,297	8.93%	12,165	11,692	23,857	8.72%	12,166	11,731	23,897	8.58%
25–29	11,720	11,289	23,009	8.46%	11,832	11,304	23,136	8.46%	12,206	11,797	24,003	8.62%

30–34	10,482	10,491	20,973	7.71%	10,668	10,600	21,268	7.77%	10,961	10,802	21,763	7.81%
35–39	9,471	10,045	19,516	7.17%	9,558	10,110	19,668	7.19%	9,896	10,132	20,028	7.19%
40–44	8,541	9,727	18,268	6.71%	8,635	9,800	18,435	6.74%	8,965	9,815	18,780	6.74%
45–49	7,642	9,038	16,680	6.13%	7,731	9,158	16,889	6.17%	8,027	9,306	17,333	6.22%
50–54	6,665	8,174	14,839	5.45%	6,766	8,299	15,065	5.51%	7,011	8,450	15,461	5.55%
55–59	5,670	7,068	12,738	4.68%	5,761	7,205	12,966	4.74%	5,972	7,434	13,406	4.81%
60–64	4,465	5,752	10,217	3.76%	4,534	5,897	10,431	3.81%	4,846	6,170	11,016	3.95%
65–69	3,395	4,336	7,731	2.84%	3,460	4,455	7,915	2.89%	3,611	4,755	8,366	3.00%
70–74	2,459	2,945	5,404	1.99%	2,504	3,027	5,531	2.02%	2,571	3,230	5,801	2.08%
75+	2,490	2,940	5,430	2.00%	2,542	3,025	5,567	2.04%	2,714	3,376	6,090	2.19%
Total	133,156	138,922	272,078	100%	133,848	139,705	273,553	100%	136,536	142,045	278,581	100%

Sumber Data: BPS, Kabupaten Ende Dalam Angka 2024

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. **Pertumbuhan Produk Dosmestik Regional Bruto**

Besaran produksi barang dan jasa di Kabupaten Ende yang ditunjukan dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sampai dengan keadaan Tahun 2023 mencapai 7,374 Trilyun Rupiah, dimana didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar kurang lebih 2,336 Trilius atau 31,69%, diikuti Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, reparrasi mobil dan sepeda motor sebesar kurang lebih 1,193 Miliar (16,18%).

Sementara itu Berdasarkan Harga Konstan (ADHK) 2010, angka PDRB Kabupaten Ende mengalami kenaikan dari Rp.4,162 Miliar pada tahun 2021 menjadi Rp.4,291 Miliar di Tahun 2022 dan menjadi Rp.4,457 Miliar pada Tahun 2023.

Laju pertumbuhan ekonomi kurun waktu 2019–2023 sangat fluktuatif, dimana pada Tahun 2019 ekonomi bertumbuh sebesar 5,08%, menurun drastis menjadi -1,33% pada Tahun 2020 akibat pandemi Covid 19, kemudian perlahan naik kembali menjadi 2,13% pada tahun 2021, tahun 2022 naik menjadi 3,09% dan di tahun 2023 kembali naik menjadi 3,87%.

Tabel 2.14. Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ende kurun waktu 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Nilai PDRB (dalam miliar)			
▪ Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	6.314.75	6.792,62	7.374,38
▪ Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010	4.162,98	4.291,79	4.457,69
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (%)	**2,13**	**3,09**	**3,87**

Sumber: BPS, Kabupaten Ende Dalam Angka 2024, PDRB Kab. Ende 2019-2023

*)angka sementara

**)angka sangat sementara

Tabel 2.15.Laju Pertumbuhan (%) Sektor Ekonomi 2019-2023

	Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,57	2,49	5,14	5,06	4,60
B.	Pertambangan dan Penggalian	5,40	-1,89	0,49	1,68	2,46
C.	Industri Pengolahan	13,41	-4,32	-0.87	9,95	8,47
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,33	10,83	1,46	6,75	11,29
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,46	6,98	6,50	4,01	2,79
F.	Konstruksi	4,04	-9,88	2,17	-0,79	4,25
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,13	-6,22	2,27	7,41	5,64
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,35	-12,60	0,79	3,93	2,69
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,96	-24,94	3,72	17,05	15,34
J.	Informasi dan Komunikasi	4,28	12,29	5,48	4,42	5,12
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,55	9,39	2,80	1,05	1,96
L.	Real Estate	-0,23	-0,90	0,87	0,79	3,84
M.	Jasa Perusahaan	2,54	-40,46	-17,29	3,93	5,56
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,65	4,46	-1,44	-1,68	0,25

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
P. Jasa Pendidikan	4,03	2,12	-1,92	-0,76	1,60
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,54	4,44	5,28	2,09	4,28
R. Jasa lainnya	8,14	-17,19	-3,53	0,72	3,99
Laju Pertumbuhan PDRB	**5,08**	**-1,33**	**2,13**	**3,09**	**3,87**

Sumber: BPS, Kabupaten Ende Dalam Angka Tahun 2024, Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten 2019–2023

Sektor utama di Kabupaten Ende yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 31,69% pada Tahun 2023, bertumbuh 0,19% dari tahun lalu. Selanjutnya **sektor Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil/Sepeda Motor** mengalami pertumbuhan sebesar 16,19, sedangkan **Lapangan Usaha Konstruksi** yang jika dibandingkan tahun lalu mengalami penurunan sebesar 9,11%.

Tabel 2.16. Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Ende ADHB Kurun Waktu 2017 – 2023

Sektor		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A.	**Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	27,84	28,29	**28,26**	**29,50**	**30,71**	**31,50**	**31,69**
B.	Pertambangandan Penggalian	1,35	128	1,26	1,25	1,22	1,19	1,14
C.	Industri Pengolahan	1,50	1,48	1,60	1,56	1,56	1,63	1,79
D.	Pengadaan Listrikdan Gas	0,07	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah/ Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06
F.	Konstruksi	10,62	10,68	**10,63**	**9,59**	**9,53**	**9,25**	**9,11**
G.	**Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil/Sepeda Motor**	15,95	14,84	**15,30**	**14,81**	**14,81**	**15,55**	**16,19**
H.	Transportasi dan Pergudangan	6,75	6,74	6,66	5,64	5,48	5,69	5,86
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,35	0,36	0,35	0,27	0,26	0,29	0,32
J.	Informasi dan Komunikasi	4,69	4,55	4,45	5,00	5,08	4,96	4,82
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,01	3,99	3,93	4,29	4,42	4,48	4,29
L.	Real Estate	2,94	2,83	2,63	2,61	2,50	2,54	2,65
M, N.	Jasa Perusahaan	0,42	0,40	0,38	0,24	0,20	0,19	0,19
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,63	9,78	**9,90**	**10,36**	**9,88**	**9,08**	**8,70**
P.	Jasa Pendidikan	10,67	10,50	**10,33**	**10,78**	**10,36**	**9,76**	**9,32**
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,71	1,72	1,74	1,92	1,97	1,88	1,95
R, S, T,U	Jasa lainnya	2,45	2,42	2,44	2,05	1,91	1,88	1,85
PDRB (ADHB)		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS, Kabupaten Ende Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan PDRB Pengeluaran terlihat bahwa selama periode 2019-2023, PDRB Kabupaten Ende, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) dan pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar.

Tabel 2.17. PDRB Pengeluaran ADHK 2019-2023

Komponen	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN (miliar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	2.959,85	2.904,15	2,951,76	3.019,17	3.109,95
Konsumsi LNPRT	11.4,90	110,79	115,66	119,66	124,35
Konsumsi Pemerintah	983,06	874,69	836,00	768,20	784,91
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.117,79	1.923,68	2.007,87	1.994,26	2.110,29
Perubahan Inventori	31,31	34,28	35,02	34,97	34,09
Ekspor Barang dan Jasa	-2.075,70	-1.771,37	-1.783,32	-1.664,46	-1,705,91

Komponen	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN (miliar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Produk Domestik Regional Bruto	4.131,22	4,076,21	4.162,98	4.291,79	4.457,69

Sumber: Publikasi Website BPS Ende (Ende Dalam Angka 2024)

2. Laju inflasi

Data Inflasi Kabupaten Ende untuk Tahun 2021-2023 tidak dipublikasikan, sehingga mengacu pada inflasi provinsi secara keseluruhan. Sesuai data publikasi BPS untuk Provinsi NTT dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka Tahun 2024 Inflasi Provinsi NTT unt kurun waktu dari tahun 2021-2023 sangat fluktuatif yaitu tahun 2021 sebesar 1,67, 2022 sebesar 6,65 dan ditahun 2023 sebebesar 2,142.

3. PDRB Perkapita

Publikasi BPS "Kabupaten Ende Dalam Angka 2024" menunjukan adanya trend kenaikan PDRB Perkapita di Kabupaten Ende dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada Tahun 2019, PDRB perkapita ADHB adalah sebesar Rp. 22.293,- Angka ini kemudian sedikit menurun menjadi Rp.22.126,- di Tahun 2020, tetapi kembali mengalami peningkatan menjadi Rp.22.13,- di Tahun 2021 dan Rp.24.63,- di Tahun 2022 dan pada Tahun 2024 mencapai Rp.26.47. Sementara untuk harga konstan, PDRB Perkapita ADHK pada Tahun 2019 tercatat sebesar Rp.15.082,- dan sedikit mengalami penurunan menjadi Rp.14.845,- di Tahun 2020 kemudian kembali meningkat menjadi Rp.15.25,- di Tahun 2021 dan menjadi Rp.15.56,- di Tahun 2022, serta meningkat lagi pada Tahun 2022 menjadi Rp.16.00,-.

Tabel 2.18. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Ende, 2016-2020

Nilai PDRB/GRDP (Juta Rupiah/Million rupiahs)					
	2019	2020	2021	2022	2023
ADHB/ at current price	6.106.571	6,075.666	6.314,75	6.792,62	7.374,38
ADHK/ at 2010 Constant Price	4.131.297	4,076.360	4.162,98	4.291,79	4.457,69
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Juta Rupiah/Million rupiahs)					
ADHB/ at current price	22,293	22.126	23,13	24,63	26,47
ADHK/ at 2010 Constant Price	15,082	14.845	15,25	15,56	16,00
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (persen)/Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price (percent)	4,74	-1.57	2,76	2,03	2,83
Jumlah Penduduk (ribu orang)/Population (Thousand People)	**274**	**270**	**272**	**274**	**274**
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ PopulationGrowth (Percent)	**0,34**	**0.24**	**1,15**	**0,59**	**1,04**

Sumber: BPS, Ende Dalam Angka 2024.

4. Indeks Gini

Pendapatan penduduk pada suatu daerah pada umumnya tidaklah merata. Perbedaan pendapatan ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Suatu metode dalam mengukur ketimpangan pendapatan yaitu Indeks Gini. Indeks Gini merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Adapun kriteria dalam menentukan ketimpangan adalah sebagai berikut:

- $0<G\leq 0,35$ menunjukkan ketimpangan rendah
- $0,35<G<0,50$ menunjukkan ketimpangan sedang
- $G\geq 0,50$ menunjukkan ketimpangan tinggi

Besarnya indeks gini Kabupaten Ende dilihat dengan pendekatan Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 mencapai 0,325. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai level rendah. Semakin rendah indeks gini suatu wilayah/daerah maka pemerataan pendapatan diharapkan akan semakin merata. Indeks Gini Kabupaten Ende pada tahun 2022 sebesar 0,306. Besaran tersebut lebih rendah dibandingkan besaran Indeks Gini Provinsi NTT, yang berarti bahwa pemerataan pendapatan Kabupaten Ende menunjukkan ketimpangan sedang.

5. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari

sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (52 komoditi) dan bukan makanan (51 komoditi perkotaan dan 47 komoditi perdesaan) yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi **Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan**. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor. Berdasarkan data susenas, diketahui jumlah penduduk miskin Kabupaten Ende cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2010 sebesar 51.700 (23,01%), selanjutnya pada Tahun 2015 penduduk miskin kembali meningkat pada angka 23,49%. Pada Tahun 2018 prosentase penduduk miskin Kabupaten Ende mengalami peningkatan sebesar 24,20%, sementara kondisi pada Tahun 2019 jumlah penduduk Miskin di Kabupaten Ende mengalami penurunan menjadi 63.450 (23,18%) dan terus mengalami peningkatan pada Tahun 2020 sebesar 23,76% dan kembali mengalami lonjakan tahun 2021 sebesar 24,13%. Tahun 2022 jumlah penduduk miskin Kabupaten Ende mengalami penurunan sebesar 23,00% dan kembali mengalami penurunan ditahun 2023 yaitu sebesar 22,86%.

Tabel 2.19 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ende 2010-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp /kap/bulan)		Jumlah Penduduk Miskin (000)		Persentase Penduduk Miskin(%)	
	Ende	NTT	Ende	NTT	Ende	NTT
2010	182.800	193.298	51,7	1.021	23,01	21,77
2011	206.900	198.553	56,4	1.013	21,65	21,23
2012	230.100	222.507	54,5	1.000	20,37	20,41
2013	255.800	251.080	55,3	1.007	20,71	20,24
2014	286.030	268.536	54,74	992	20,37	19,60
2015	291.770	307.224	63,23	1.160,53	23,49	22,58
2016	315.909	322.947	64,65	1.149,92	23,89	22,19
2017	341.219	343.396	65,11	1.150.790	23,95	21,85
2018	358.986	354.898	66,01	1.142.167	24,20	21,35
2019	363.508	373.922	63,45	1.129.460	23,18	20,62
2020	392.591	403.005	65.22	1.153,76	23.76	20,90
2021	428.328	415.116	66.38	1.169,31	24.13	20,99
2022	473.403	460.823	63,40	1.131,62	23,00	20,05
2023	518.939	507.203	63,10	1.141,11	22,86	19,96

Sumber: BPS, Ende Dalam Angka 2024 dan Provinsi NTT Dalam Angka 2024

- **Kemiskinan Ekstrim**

  a. **Pengertian Kemiskinan Ekstrem**

  Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem – setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan *"absolute poverty measure"* yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menggunakan definisi tersebut, pada tahun 2023 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 1,12 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang didasarkan pada data Susenas yang dirilis secara berkala oleh BPS, yang pada Maret 2023 adalah 9,36 persen.

  b. **Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Ende**

  Data BPS pada tahun 2023, kondisi Kabupaten Ende memiliki tingkat miskin ekstrem sebesar 13,53 persen dengan besaran jumlah Penduduk Miskin Ekstrem 37.130 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem di Ende tersebut merupakan bagian dari penduduk miskin sebesar 22,86 persen atau 63,10 ribu jiwa. Sementara itu,, tingkat kemiskinan ekstrem di provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,93 persen atau sebanyak 19,96 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Timur tersebut merupakan bagian dari penduduk miskin sebesar 19,96 persen atau 1,14 juta jiwa.

Tabel 2. 20 Tingkat Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023

KETERANGAN	ENDE	NUSA TENGGARA TIMUR	INDONESIA
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (persen)	13,53	3,93	1,12
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribu jiwa)	37.130	19,96	3,3 juta
Tingkat Kemiskinan (persen)	22,86	19,96	9,36
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	63,10	1,14 juta	25,90 juta

Sumber: Susenas Maret 2023, BPS

c. Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yakni dengan menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Gambar 2.1 Intervensi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (Menurunkan Beban Pengeluaran)



Gambar 2.2 Intervensi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (Meningkatkan Pendapatan)



2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan komposit indikator Angka Harapan Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup dan Pengeluaran Riil Yang Disesuaikan. IPM Kabupaten Ende terus mengalami peningkatan dimana keadaan terakhir Tahun 2023 sebesar 68,63 menduduki rangking 2 IPM Kabupaten/Kota se-NTT. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan IPM tahun 2020.

Tabel 2.21. Perkembangan IPM Kabupaten Ende 2015-2023

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Usia Harapan Hidup	64,37	64,42	64,48	64,75	n/a	n/a	65,43	65,76	66,12
Angka Harapan Lama Sekolah	13,73	13,74	13,75	13,76	n/a	n/a	13,79	13,81	13,82
Rata2 Lama Sekolah	7,37	7.38	7.63	7.79	n/a	n/a	8.03	8.09	8,20
Pengeluaran Riil Perkapita	8678.65	8.801	8.841	8.995	n/a	n/a	8.021	9.413	9.739
IPM Ende	**65,54**	**65,74**	**66,11**	**66,62**	**67,20**	**67,04**	**67,30**	**67,97**	**68,63**
IPM NTT	62,67	63,13	63,73	64,39	65,23	66,93	67,02	67,63	68,40

Sumber: Publikasi BPS NTT dan Ende Dalam Angka 2024

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan APM di Kabupaten Ende untuk semua tingkat pendidikan cenderung fluktuatif kurun 2016-2023. Data APK dan APM Kabupaten Ende kurun waktu 2016-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.22. Angka Partisipasi Kasar SD/MI,SMP/MTs Tahun 2016-2023

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	APK SD/MI	112,96	110,18	112,73	102,34	104,26	102,97	102,47	110,54
2	APKSMP/MTs	96,52	84,51	86,93	93,52	87,00	99,71	99,71	87,71
4	APM SD/MI	92,20	92,26		87,38	90,86	91	91	95,86
5	APM SMP/MTs	64,01	62,70		67,50	66,41	69,45	69,45	69,55

Sumber: LKPJ Kab. Ende Tahun 2024 da Ende Dalam Angka Tahun 2024

3. Angka Putus Sekolah

Selama kurun waktu Tahun 2016-2023 APSSD/MI,SMP/MTs mengalami fluktuasi. Data menunjukan pada Tahun 2023 Angka Putus Sekolah (APs) pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,12, sementara itu untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga sama sebesar 0,12.

Tabel. 2.23. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs Tahun 2016-2023

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	APS SD/MI	0,03	0,02	0,17	0,061	0,00	0,03	0,08	0,12
2.	APS SMP/MTs	0,07	0,06	0,17	0,14	0,00	0,01	0,08	0,12

Sumber: LKPJ Kab.Ende Tahun 2023

4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Hasil pendidikan merupakan hasil yang diperoleh dari adanya proses belajar-mengajar sebagai bagian dari proses pendidikan, yang dapat ditunjukkan dari jumlah penduduk yang berhasil tamat atau jumlah lulusan menurut jenjang pendidikan tertentu. Data Susenas menunjukan pada Tahun 2022 di Kabupaten Ende masih banyak penduduk yang tidak punya ijazah yaitu sebanyak 23,61%.

Tabel. 2.24. Persentase Penduduk Kabupaten Ende Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki, 2015 – 2023

No.	Ijazah Tertingg Yang Dimiliki	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tidak Punya	30,01	34,81	31,77	33,39	25,00	28,30	25,82	23,61
2	Sekolah Dasar	28,02	30,77	26,38	30,29	27,70	26,53	25,76	25,81
3	SMP	13.42	9,81	15,80	13,98	13.52	16,74	17.66	20.72
4	SMA dan SMK	14,87	16,60	17,31	15,29	23,02	19,68	19,44	17,73
5	Diploma I/II	0,60	0,78	0,90	0,41	0,26	0,43	0,45	0,57
6	Diploma III	2,15	0,91	1,60	1,21		1,26	2,15	1,96
7	Diploma IV/S1/S2/S3	6,95	6,34	6,24	5,48	0,82	7,06	8,73	8,89

5. **Angka Kematian Bayi**

Angka kematian Bayi (berumur kurang dari 1 tahun) di Kabupaten Ende masih cukup tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dimana pada tahun 2015 terdapat 69 orang bayi yang meninggal kurang dari 1 tahun dari 4.527 jumlah bayi yang lahir hidup. Pada Tahun 2016 terjadi 74 orang bayi yang meninggal kurang dari 1 tahun dari 3.693 jumlah bayi yang lahir hidup. Sementara pada Tahun 2017 dari 6.201 bayi yang lahir, 57 orang diantaranya meninggal dalam usia kurang dari 1 tahun dan pada tahun 2018 dari 4.196 bayi yang lahir, 13 orang diantaranya meninggal dalam usia kurang dari 1 tahun dan pada tahun 2019 jumlah bayi yang meninggal meningkat menjadi 45 orang dari 4.199 jumlah bayi yang lahir hidup. Sedangkan Tahun 2020 angka kematian bayi sebanyak 51 orang bayi dari 4.347 jumlah kelahiran hidup. Pada tahun 2021 Angka Kematian Bayi Menurun menjadi sebesar 3/1000 kelahiran Hidup. Pada Tahun 2022 jumlah kematian bayi kembali meningkat menjadi 52 kasus.

6. **Angka Kematian Ibu Melahirkan**

Kasus kematian Ibu adalah Jumlah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan nifas. Khusus pada indikator ini kematian ibu yang terjadi sebagai akibat dari kelainan atau resiko kehamilan, persalinan dan nifas. Pada tahun 2022 kasus kematian ibu yang terjadi sebanyak 10 kasus.

7. **Angkatan Kerja**

Pada Tahun 2023, total jumlah penduduk usia kerja (PUK) di Kabupaten Ende adalah sebanyak 209.528 orang dengan rincian 156.503 orang angkatan kerja dan 53.025 orang bukan angkatan kerja. Lebih dari 50% dari total PUK adalah perempuan, sedangkan sisanya PUK berjenis kelamin laki-laki.

Tabel. 2.25. Angka Kerja di Kabupaten Ende Tahun 2019-2023

Jenis Kelamin	Tahun									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Laki-laki	68.460	49,87	75.079	51,05	79375	50,04	77.222	49,80	77.838	49,74
Perempuan	68.813	50,13	71.997	48,95	79258	49,96	77.842	50,20	78.665	50,26
L+P	**137.273**	**100**	**147.076**	**100**	**158.633**	**100**	**155.065**	**100**	**156.503**	**100**

Sumber: BPS, Kabupaten Ende Dalam Angka 2024

Tabel. 2.26. Komposisi Penduduk Kabupaten Ende yang Bekerja Kerja Menurut Lapangan Usaha 2020-2023

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun											
		2020			2021			2022			2023		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1.	Sektor Primer (Pertanian)	24,13	19,37	43,51	38,63	29,87	44,33	36.294	32.039	68.333	36.258	32.945	69.203
2.	Sektor Sekunder (Industri Pengolahan, Listrik & Air minum, dan Bangunan)	8,04	14,87	22,91	13,12	21,07	22,13	12.828	20.933	33.761	9.452	16.841	26.293
3.	Sektor Tersier (Perdagangan, Angkutan, Keuangan dan Jasa)	18,96	14,62	33,58	25,62	26,19	33,53	26.473	23.304	49.777	30.725	26.226	56.951

Sumber: BPS, Kabupaten Ende Dalam Angka 2024

Data Sakernas juga menunjukan bahwa dari keseluruhan Angkatan Kerja pada Tahun 2023 sebagian besar menekuni sektor Primer 45,39% yang sedikit mengalami peningkatan, diikuti sektor tersier yang juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 37,36% dan sektor sekunder sebesar 17,25%.

8. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

TPAK diperoleh dengan cara membandingkan antara jumlah Angkatan Kerja (AK) dan Penduduk Usia Kerja (PUK). TPAK di Kabupaten Ende secara keseluruhan pada Tahun 2019–2023 mengalami fluktuasi. Dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 data menunjujukan bahwa TPAK Kabupaten Ende selalu mengalami peningkatan hanya saja pada Tahun 2023 mengalami penurun dari 75,53%

ditahun 2022 menjadi 74,69%.

Tabel. 2.27. Tingkat Partisipasi Angka Kerja di Kabupaten Ende Tahun 2019-2023

Jenis kelamin	TPAK (persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-laki	80,12	80,11	79,37	81,73	76,98
Perempuan	66,51	65,49	79,13	70,25	72,566
L+P	**71,65**	**72,22**	**75,40**	**75,53**	**74,69**

Sumber : Kabupaten Ende dalam Angka 2024

9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah rasio antara jumlah penganggur terbuka terhadap angkatan kerja. Data BPS mengindikasikan angka TPT di Kabupaten Ende sebesar 2,06 pada keadaan Tahun 2022, dan meningkat menjadi 2,59% di Tahun 2023. Secara umum, angka pengangguran yang relatif rendah (di bawah 10%) tidak bisa dijadikan indikator bahwa tidak ada masalah dalam pasar kerja.

Tabel. 2.28. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ende Tahun 2019-2023

Jenis kelamin	TPT (persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-laki	1,99	1,42	2,00	02,11	1,80
Perempuan	3,87	1,53	2,12	20,01	3,37
L+P	**2,98**	**2,95**	**2,01**	**2,06**	**2,59**

Sumber : BPS, Sakernas 2019-2023, Kabupaten Ende dalam Angka 2024

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

a. SeniBudaya

Sejalan dengan pengembangan di Bidang Pariwisata, budaya lokal di Kabupaten Ende terus dilestarikan, dibina dan dikembangkan. Setiap tahun rutin dilaksanakan even tetap yaitu **Upacara Pati Ka Du'a Bapu Ata Mata didanau Kelimutu**. Kegiatan ini dilaksanakan pada pertengahan bulan Agustus setiap tahun, dan melibatkan 20 komunitas adat yang bermukim disekitar kawasan Taman Nasional Kelimutu. Pengembangan situs/cagar budaya juga terus mengalami peningkatan. Sampai tahun 2023 terdapat 20 situs/cagar budaya yang intensif dibina yakni Perkampungan megalithik Wolotopo, Kampung Unggu Kanganara, Mumi Kaki More Wolondopo, Rumah Pengasingan Bung Karno, Rumah adat Bhisu One Jopu, Rumah adat Wiwipemo, Sa'o Ria Raja Nggaji-Wolojita, Museum Tenun Ikat, Museum Bahari, Situs Kampung Adat Kanganara, Makam Ibu Amsi, Kampung Adat Detukeli, Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kantor Camat Ende Utara, Kantor Detasemen POM Ende, Kantor Kodim Ende, Gedung Imaculata, Situs Gereja Kathedral Ende serta Masjid A-Rabitha. Untuk pengembangan sanggar seni, terus dilakukan pendampingan dan bantuan peralatan musik tradisional bagi sanggar seni, yang diikutsertakan pada event baik skala lokal maupun nasional. Jumlah sanggar seni budaya yang ada di Kabupaten Ende yang dibina sampai tahun 2023, sebanyak 74 kelompok. Pembinaan sanggar-sanggar ini diarahkan untuk melestarikan dan keikutsertaannya pada event-event pariwisata dan kebudayaan, seperti : **Upacara Adat Pati Ka Du'a Bapu Ata Mata**, **Festival Flobamora Rayon II Flores-Lembata**, **Festival Pesta Danau Kelimutu**, **Sail Indonesia dengan titik singgah di Kecamatan Maurole, Gebyar Wisata Nusantara di TMII** dan **Jambore Pariwisata Tingkat Provinsi**.

b. Olahraga

Dalam rangka pengembangan olah raga sepak bola telah ditingkatkan fasilitas Stadion Marilonga, baik kapasitas stadion, maupun pemasangan lampu yang memungkinkan dilaksanakan pertandingan pada malam hari. Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga melaksanakan kegiatan O2SN dalam rangka pembinaan olahraga bagi siswa SD dan SMP.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

1. **Rata-rata Kompetensi Literasi SD**

Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2023 (https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id), rata-rata kompetensi literasi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada Tahun 2022 yakni 1,17, yang merupakan nilai kemampuan literasi SD hasil Asesmen Nasional Tahun 2022. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator Perubahan RPJMD 2019 – 2024 Tahun 2023 yaitu 1,81 maka baru mencapai 64,64% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata kompetensi literasi SD masih dibawah kompetensi minimum, yakni dengan angka 2 dari skala 3.

2. **Rata-rata Kompetensi Literasi SMP**
   Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2023 (https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id), rata-rata kompetensi literasi pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2022 yakni 1,45, yang merupakan nilai kemampuan literasi SMP hasil Asesmen Nasional Tahun 2022. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator Perubahan RPJMD 2019 – 2024 Tahun 2023 yaitu 1.95 maka baru mencapai 74,36% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata kompetensi literasi SMP masih dibawah kompetensi minimum, yakni dengan angka 2 dari skala 3.
3. **Rata-rata Kompetensi Numerasi SD**
   Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2023 (https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id), rata-rata kompetensi literasi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada Tahun 2022 yakni 0,71, yang merupakan nilai kemampuan literasi SD hasil Asesmen Nasional Tahun 2022. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator Perubahan RPJMD 2019 – 2024 Tahun 2023 yaitu 1,64 maka baru mencapai 43,29% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata kompetensi numerasi SD masih dibawah kompetensi minimum, yakni dengan angka 2 dari skala 3.
4. **Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP**
   Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2023 (https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id), rata-rata indeks karakter pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada Tahun 2022 yakni 1,51, yang merupakan indeks karakter SD hasil Asesmen Nasional Tahun 2022. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator Perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 2,29 maka baru mencapai 65,94% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata Indeks Karakter SD telah berada di kategori berkembang.
5. **Rata-rata Indeks Karakter SD**
   Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2023 (https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id), rata-rata indeks karakter pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada Tahun 2022 yakni 1,51, yang merupakan indeks karakter SD hasil Asesmen Nasional Tahun 2022. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator Perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 2,29 maka baru mencapai 65,94% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata Indeks Karakter SD telah berada di kategori berkembang.
6. **Rata-rata Indeks Karakter SMP**
   Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2023 (https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id), rata-rata indeks karakter pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2022 yakni 1,61, yang merupakan indeks karakter SD hasil Asesmen Nasional Tahun 2022. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator Perubahan RPJMD 2019 – 2024 Tahun 2023 yaitu 2,28 maka baru mencapai 70,61% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata Indeks Karakter SMP telah berada di kategori berkembang.
7. **Rata-rata Siswa yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
   Presentasi siswa yang mengikuti Pendidikan Usia Dini (PAUD) pada jenjang PAUD pada Tahun 2023 yaitu 50,65%. Ini merupakan hasil perbandingan dari jumlah siswa jenjang PAUD terhadap jumlah anak usia 4-6 tahun di Kabupaten Ende.
8. **Rasio Guru Berbanding Murid SD/MI**

Rasio Guru berbanding Murid SD/MI pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2023 yaitu 593,86 per 10.000 Murid SD/MI, yang merupakan perbandingan jumlah Guru jenjang SD/MI yang berstatus PNS dengan jumlah seluruh tenaga guru jenjang SD/MI.

9. **Rasio Guru berbanding Murid SMP/MTs**

   Rasio Guru berbanding Murid SMP/MTs pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2023 yaitu 563,37 per 10.000 Murid SMP, angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator Perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 746,93, maka baru mencapai 75,42% dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja program ini menggambarkan untuk 10.000 murid SMP dilayani oleh 563 guru PNS.

10. **Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SD/MI**

    Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk berusia Sekolah SD/MI pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/MI pada Tahun 2023 yaitu 1075,93 SD per 10.000 penduduk. Ini merupakan hasil perbandingan dari perkalian Jumlah SD dengan 10.000 penduduk terhadap Jumlah Penduduk Usia 7-12.

11. **Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SMP/MTs.**
    Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk berusia Sekolah SMP/MTs pada pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/MTs pada Tahun 2023 yaitu 5285,41 SMP per 10.000 penduduk. Ini merupakan hasil perbandingan dari perkalian Jumlah SMP dengan 10.000 penduduk terhadap Jumlah Penduduk Usia 13-15.

12. **Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI**

    Angka Partisipasi Kasar SD/MI pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2023 yaitu 100,30%, yang merupakan hasil perbandingan Jumlah siswa SD/Mi dengan Jumlah Penduduk Usia SD (7-12 tahun).

13. **Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs**

    Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2023 yaitu 84,33%, yang merupakan hasil perbandingan dari jumlah siswa SMP dengan jumlah usia jenjang pendidikan SMP.

14. **Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**

    Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A pada jenjang pendidikan sekolah dasar/MI pada tahun 2023 yaitu 89,39%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Siswa SD yang Berusia 7-12 tahun terhadap Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun.

15. **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs**

    Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/MTs pada tahun 2023 yaitu 66,78%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Siswa SMP Usia 13-15 Tahun dengan Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun

16. **Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI**

    Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar /MI pada tahun 2023 yaitu 93,65%, yang merupakan hasil perbandingan dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang sekolah dasar terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

17. **Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs**

    Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs Paket B pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama pada tahun 2023 yaitu 74,23%, yang merupakan hasil perbandingan dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang sekolah menengah pertama terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

18. **Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs**

    Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs pada jenjang pendidikan sekolah SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2023 yaitu 92,38%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Siswa Tingkat 1/Kelas 7 Jenjang SMP terhadap Jumlah Lulusan SD pada Tahun 2023.

19. **Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI**

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI pada jenjang pendidikan sekolah Dasar pada tahun 2023 yaitu 0,12%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Siswa SD yang Putus Sekolah dengan Jumlah Siswa SD/MI.

20. **Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI**

    Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2023 yaitu 0,12%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Siswa SMP yang Putus Sekolah dengan Jumlah Siswa SMP/MTs.

21. **Guru SD/MI yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**

    Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2023 yaitu 83,74%, yang merupakan hasil perbandingan dari jumlah Guru SD yang berpendidikan S1/D4 terhadap jumlah seluruh Guru SD.

22. **Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**

    Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2023 yaitu 92,76%, yang merupakan hasil perbandingan dari jumlah Guru SMP yang berpendidikan S1/D4 terhadap jumlah seluruh Guru SMP.

23. **Tenaga Kependidikan SD/MI yang Mengikuti Diklat Kompentensi**

    Tenaga Kependidikan SD/MI yang Mengikuti Diklat Kompetensi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2023 yaitu 0%, yang merupakan perbandingan jumlah tenaga kependidikan jenjang SD yang telah mengikuti Diklat Kompetensi dengan jumlah seluruh tenaga kependidikan jenjang SD.

24. **Tenaga Kependidikan SMP/MTs yang Mengikuti Diklat Kompentensi**

    Tenaga Kependidikan SMP/MTs yang Mengikuti Diklat Kompetensi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2023 yaitu 0%, yang merupakan perbandingan jumlah tenaga kependidikan jenjang SMP/MTs yang telah mengikuti Diklat Kompetensi dengan jumlah seluruh tenaga kependidikan jenjang SMP/MTs.

25. **Presentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan**

    Presentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan pada tahun 2023 yaitu 44,52%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan dengan Jumlah Warisan Budaya yang Ada. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator Perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 18,31%, maka mencapai 243,15% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa semua warisan budaya yang ada di Kabupaten Ende telah dilestarikan.

26. **Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional yang dilestarikan**

    Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional yang dilestarikan pada tahun 2023 yaitu 100%, yang merupakan hasil perbandingan Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dengan Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional yang Ada. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indicator RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 65,22%, maka telah mencapai 153,33% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa 5 jenis kesenian yang ada di Kabupaten Ende semuanya telah dilestarikan.

27. **Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan**

    Cakupan Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2023 yaitu 21,74%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan dengan Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dimiliki Daerah. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indicator RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 100%, maka telah mencapai 21,74% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa Cakupan Cagar Budaya di Kabupaten Ende yang telah dilestarikan sebesar 21,74% dari total 115 Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Ende.

Tabel 2.29 Ringkasan Capaian Indikator RPJMD Urusan Pendidikan

No.	Indikator Kinerja Program	Data Awal Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2023		Capaian s.d 2023 terhadap Target (%)	Target Akhir RPJMD 2024
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Rata-rata Kompetensi Literasi SD	0	1,81	1,17	64,64%	1,91
2	Rata-rata Kompetensi Literasi SMP	0	1,95	1,45	74,36%	2,05
3	Rata-rata Kompetensi Numerasi SD	0	1,64	0,71	43.29%	1,74
4	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP	0	1,96	0,87	44,39%	2,06
5	Rata-rata Kompetensi Karakter SD	0	2,29	1,51	65,94%	2,39
6	Rata-rata Kompetensi Karakter SMP	0	2,28	1,61	70,61%	2,38
7	Persentase Siswa yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	60,86%	91,20%	50,65%	55,54%	94,20%
8	Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah SD/MI	110,00	107,53	1075,93	1000,58%	107,53
9	Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs	54,00	50,11	5285,41	105,48%	50,11
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	104%	109%	100,30%	92,02%	108%
11	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	85%	85,40%	84,33%	98,75%	84,63%
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	90,86%	98,17%	89,39%	91.06%	98,59%
13	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	90,86%	73,21%	66,78%	91,21%	98,59%
14	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	93,55%	96,86%	93,65%	96,69%	96,91%
15	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	79,87%	85,84%	74,23%	86,48%	91,69%
16	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP	89,36%	100,00%	92,38%	92,38%	100,00%
17	Angka Putus Sekolah Sekolah Dasar	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%
18	Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah Pertama	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%
19	Guru SD yang berkualifikasi S1/D4	70,99%	80,99%	83,74%	103,40%	85,99%
20	Guru SMP yang berkualifikasi S1/D4	82,42%	92,42%	92,76%	100,37%	97,42%
21	Tenaga Kependidikan SD yang mengikuti Diklat Kompetensi	14,50%	40,99%	0,00%	0,00%	47,61%

Sumber: LKPJ Bupati Ende Tahun 2023

2. Kesehatan

1) **Presentasi Ketersediaan Obat dan Vaksin**

Pada tahun 2023, target Data presentase ketersediaan Obat dan Vaksin dipelayanan Kesehatan (Puskesmas) adalah 100% dengan capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukan bahwa jumlah ketersediaan obat dan vaksin pada Puskesmas dalam kondisi yang baik dan tercukupi untuk obat esensialnya.

2) **Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif.**

Pada tahun 2023 target jumlah pelayanan kesehatan usia produktif sebesar 100%. Jumlah Usia produktif yang dilayani dalam periode tahun 2023 sebesar 160.300 pasien dari 185.477 total usia produktif di Kabupaten Ende, sehingga capaian pelayanan kesehatan usia produktif tahun 2023 sebesar 86.43%.

3) **Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat**
Pada tahun 2023 Target Jumlah Murid SD dan Setingkat yang di periksa kesehatannya oleh nakes atau tenaga terlatih sebesar 100 %. Capaian target tahun 2023 sebesar 57,58 % dimana sebanyak 19.772 orang Jumlah Murid SD dan Setingkat yang mendapat pemeriksaan kesehatan dari 30.867 Orang. Dari realisasi tersebut, cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat belum semua diperiksa.

4) **Cakupan Kepesertaan JKN.**
Target tahun 2023 kepesertaan JKN adalah 93 %, capaian kinerja tahun 2023 sebesar 77,49 % dimana dari 216.667 Jiwa yang memiliki kartu JKN dengan jumlah penduduk Kabupaten Ende sebanyak 279.592 Jiwa.

5) **Cakupan Fasilitas Kesehatan Terakreditasi**
Sebanyak 25 puskesmas di kabupaten Ende sudah terakreditasi dari total 26 puskesmas (96,15%) untuk Tahun 2023.

6) **Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin**
Pada tahun 2023, Target pelayanan masyarakat miskin di Kabupaten Ende sebesar 100 %. Capaian tahun 2023 sebesar 100% dimana sebanyak 673 yang mendapatkan pelayanan dari total 673 jumlah seluruh masyarakat miskin yang dirujuk.

7) **Presentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar Pekerja**
Pada tahun 2023 sebanyak 26 Puskesmas di kabupaten Ende melaksanakan atau menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dasar pekerja dari 26 Puskesmas, jadi cakupannya menjadi 100% dari target sebesar 95%. Sehingga capaiannya sebesar 105% melampaui target.

8) **Jumlah Pos UKK di Setiap Wilayah Puskesmas**
Pada Tahun 2023 target Jumlah Pos UKK di setiap Wilayah sebesar 9,35 %, realisasi sebesar 9,35% dimana 26 desa memiliki pos UKK dari 278 desa/kelurahan sehingga capaian kinerja sebesar 100 %.

9) **Presentase Puskesmas Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar Kelompok Olahraga**
Target puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar kelompok olahraga tahun 2023 sebesar 75%. pada tahun 2023 semua puskesmas di Kabupaten Ende sudah melaksanakan atau menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar kelompok olahraga, sehingga cakupannya 100%.

10) **Presentase Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi (Obat, Makan dan Kosmetik)**
Target sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi tahun 2023 sebesar 75% dengan realisasi 52,70% dimana 39 sarana produksi yang memenuhi syarat dari jumlah seluruh sarana sebanyak 74. Hal ini menunjukan bahwa sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi belum mencapai target sehingga perlu ditingkatkan pengawasan.

11) **Cakupan Rumah Tangga yang ber-PHBS**
Target Rumah Tangga ber-PHBS tahun 2023 sebesar 43,72% dengan realisasi sebesar 48,75% dimana jumlah rumah tangga ber-PHBS sebanyak 24.936 dari jumlah seluruh rumah sebanyak 51.154 rumah tangga. Hal ini menunjukkan cakupan rumah tangga yang ber-PHBS sudah melampaui target atau sebesar 111,5 %..

12) **Cakupan SDM yang Mempromosikan Kesehatan**
Target SDM yang mempromosikan kesehatan tahun 2023 sebesar 97,70% dengan realisasi 96,25% dimana 334 strata dilakukan promosi kesehatan dari jumlah seluruh strata sebanyak 347 strata. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan SDM yang mempromosikan kesehatan belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 98,52%.

13) **Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan**
Pada tahun 2023 target Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 96,26% dimana terdapat 335 balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan difasilitas kesehatan puskesmas, dari total balita gizi buruk yaitu 348 jiwa. Hal ini

menunjukkan bahwa cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

14) **Presentasi Balita Gizi Buruk**
Balita Gizi buruk adalah balita yang dengan berat badan dibawah garis merah pada KMS (Kartu Menuju Sehat). Pada Tahun 2023 Target Jumlah Balita dengan Gizi Buruk sebesar 0,46 %, Capaian Kinerja tahun 2023 sebesar 3,91 % dimana terdapat 713 orang Balita dengan Gizi yang ditangani dari total 18.225 Balita yang ditangani.

15) **Prevalensi Balita Gizi Kurang**
Target Jumlah Balita dengan Gizi Kurang Tahun 2023 sebesar 14,09% dengan realisasi sebesar 7,39 % dimana 1.347 orang balita Gizi Kurang dari Total balita 18.225 orang . Hal ini menunjukan kasus gizi kurang tidak mencapai target dan berarti baik dan tidak melewati batas toleransi.

16) **Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada awal dibawah dua tahun/Baduta**
Tahun 2023 Angka Prevalensi stunting pada bayi dua tahun (BADUTA) mencapai 10,28 % dimana sebanyak 2.663 orang Baduta stunting dari total 25.903 orang baduta. Angka ini melewati batas toleransi yang di targetkan 9,3%.

17) **Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita**
Angka prevalensi stunting pada bayi lima tahun (BALITA) mencapai 1,44% (262 balita stunting dari total 18.225 balita yang ditimbang). Angka ini tidak melewati batas toleransi yang ditargetkan pada stunting balita yaitu 9,3 %.

18) **Prosentase Desa yang melaksanakan STBM**
Angka prevalensi stunting pada bayi lima tahun (BALITA) mencapai 1,44% (262 balita stunting dari total 18.225 balita yang ditimbang). Angka ini tidak melewati batas toleransi yang ditargetkan pada stunting balita yaitu 9,3 %.

19) **Meningkatnya Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan**
Target jumlah sarana air minum yang memenuhi syarat tahun 2023 sebesar 64,30% dengan realisasi 50% (14.847 jumlah sarana air minum yang diperiksa dan memenuhi syarat kesehatan dari total 29.694 jumlah seluruh sarana air minum).

20) **Meningkatnya Sarana Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan / Minuman yang Memenuhi Syarat**
Target jumlah sarana sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman yang memenuhi syarat tahun 2023 sebesar 97,48% dengan realisasi 100% (367 jumlah sarana sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman yang memenuhi syarat kesehatan dari total 367 jumlah seluruh sarana sanitasi).

21) **Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Imunization (UCI)**
Target jumlah desa/kelurahan dengan universal child immunization (UCI) tahun 2023 sebesar 99% dengan capaian target sebesar 71,94% (200 desa dari total 278 kelurahan/desa). Hal ini menunjukkan bahwa belum mencapai target dan perlu dipacu untuk jadi perhatian dan intervensi.

22) **Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi ≤ 24 Jam**
Target jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam dalam periode tertentu sebesar 100% dengan capaian tahun 2023 sebesar 0%. hal ini menunjukkan tidak ada desa/kelurahan yang mengalami KLB.

23) **Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD**
Target jumlah penemuan penderita penyakit DBD yang ditangani sesuai SOP tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Penderita penyakit DBD yang ditemukan dan ditangani sesuai SOP sebanyak 57 orang dari total 57 orang penderita DBD ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus DBD di Kabupaten Ende semua diatasi dan mencapai target.

24) **Cakupan Balita Pneomonia yang Ditangani**

Target jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani tahun 2023 sebesar 37,51%, sementara hasil penanganan penyakit pneumonia tahun 2023 sebesar 53,16% (724 orang balita pneumonia dari total 1.362 perkiraan balita dengan pneumonia). Hal ini menunjukkan bahwa belum mencapai target dan perlu dilakukan pengawasan dan intervensi.

25) **Presentasi Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Rubeia**
Target anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak rubella tahun 2023 sebesar 98% dengan realisasi sebesar 80,25% (3.843 anak yang diimunisasi campak rubella dari total 4.789 jumlah bayi). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 anak yang diimunisasi campak rubella sudah mencapai target dan tetap mendapat perhatian dan pengawasan.

26) **Tingkat Prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)**
Angka prevalensi tuberculosis mencapai 2561 perseratus ribu dimana 7.159 adalah pasien TBC BTA+ yang ditemukan dan ditangani dari 279.592 jumlah penduduk. Angka ini tidak melewati batas toleransi yang ditargetkan yaitu 466,9 perseratus ribu.

27) **Presentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapat PelayananDeteksi Dini HIV/AIDS sesuai Standar.**

Target jumlah kasus HIV/AIDS yang diberikan pelayanan sesuai standar pelayanan sebesar 100% di tahun 2023. Jumlah orang yang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebanyak 5.783 (74,31%) dari total jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada disuatu wilayah kerja 7.782. Angka ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan belum mencapai target..

28) **Non Polio AFP Rate per 100.000 pendudu**
Cakupan penemuan kasus AFP Non Polio yang ditemukan tahun 2023 sebesar 29.083/100.000 penduduk. Pada tahun 2023 tidak ada kasus non polio AFP yang ditemukan..

29) **Cakupan Pelanyanan Kesehatan Penderita Hipertensi**
Target jumlah pelayanan penderita hipertensi pada tahun 2023 sebesar 88%. Penderita hipertensi yang dilayani dalam periode tahun 2023 sebesar 93,07% yaitu total pasien hipertensi yang dilayani 64.070 dari 68.842 total pasien penderita hipertensi di Kabupaten Ende..

30) **Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasen Baru) Penyakit TBC BTA**
Target jumlah penemuan baru penderita TBC BTA+ yang ditemukan dan diobati tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% (487 orang penderita baru TBC BTA+ yang ditemukan dan diobati dari total 487 orang seluruh penderita TBC BTA+ yang ditemukan). Hal ini berarti pencapaian tercapai 100%.

31) **Angka Kejadian Malaria**
Target jumlah kasus malaria yang terjadi tahun 2023 sebesar 0,45 perseribu penduduk dengan realisasi sebesar 0,215 perseribu penduduk yaitu 6 jumlah penderita malaria positif dari total 279.592 jiwa penduduk.

32) **Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**
Target jumlah pelayanan penderita diabetes melitus pada tahun 2023 sebesar 90%. Penderita diabetes mellitus yang dilayani dalam periode tahun 2023 sebesar 96,61% yaitu total pasien diabetes mellitus yang dilayani 2.677 dari 2.771 total pasien penderita hipertensi di Kabupaten Ende. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan sudah melewati target yang ditentukan.

33) **Cakupan Penderita Diare yang Ditangani**
Target jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan tahun 2023 sebesar 47,11%. Capaian target tahun 2023 sebesar 32,50% yaitu 1.745 yang penanganan penderita diare dari jumlah 5.369 total perkiraan penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa belum mencapai target.

34) **Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat**
Target jumlah penderita orang dengan gangguan jiwa berat yang datang dan dilayani di sarana kesehatan tahun 2023 sebesar 92%, capaian target tahun 2023 sebesar 100% yaitu 965 orang yang penanganan penderita gangguan jiwa berat dari jumlah 965 total penderita orang dengan gangguan jiwa berat yang datang dilayani di sarana kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa sudah mencapai target.

35) **Rasio Tenaga Dokter per satuan Penduduk**
Ratio tenaga dokter yang dimaksud adalah yang memberikan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas. Target rasio tenaga dokter tahun 2023 sebesar 0,205 per 1000 penduduk.

Pencapaian target tahun 2023 sebesar 0,204% dengan jumlah dokter sebanyak 57 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 279.592 pada tahun 2023.

36) **Rasio Tenaga Paramedis**

Rasio tenaga paramedis yang dimaksud adalah yang memberikan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas. Target rasio tenaga paramedis tahun 2023 sebesar 2,42 per 1000 penduduk. Pencapaian target tahun 2023 sebesar 2.665 per 1000 dengan jumlah paramedis sebanyak 745 dari total jumlah penduduk sebanyak 279.592 orang pada tahun 2023.

37) **Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk**

Target Ratio puskesmas terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Ende adalah 0,01 per 1000 penduduk. Capaian kinerja terhadap ratio puskesmas per satuan penduduk yaitu 0,093 dimana 26 puskesmas dibanding dengan 279.592 jiwa. Artinya sudah melewati standar, bahwa 1 puskesmas dapat melayani 10.647 jiwa penduduk. Pada tahun 2023 ada peningkatan status dari pustu menjadi puskesmas yaitu Puskesmas Mukusaki, walaupun sudah melebihi standar akan tetapi kendala yang dihadapi adalah letak geografis dari Kabupaten Ende itu sendiri yang membuat akses pelayanan kesehatan menjadi sulit.

38) **Rasio Pustu per Satuan Penduduk**

Data tahun 2023 menunjukkan bahwa target ratio puskesmas pembantu 0,01 per 1000 penduduk dengan jumlah pustu 56 unit dengan hasil 0,20 per 1000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa ratio puskesmas pembantu sudah melebihi target dari jumlah puskesmas 26 unit.

39) **Operasionalisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama**

Pada tahun 2023 Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama telah dianggarkan dan dilaksanakan kegiatannya.

40) **Cakupan Pelayanan Anak Balita**

Target jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan sesuai standar minimal 8 kali tahun 2023 sebesar 99% (20.509 balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali dari 26.250 jumlah seluruh sasaran anak balita). Capaian target tahun 2023 sebesar 78,13%. hal ini menunjukkan bahwa belum mencapai target dan perlu dilakukan pengawasan dan intervensi.

41) **Pelayanan Kesehatan pada Lanjut Usia**

Target jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan sesuai standar minimal 8 kali tahun 2023 sebesar 99% (20.509 balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali dari 26.250 jumlah seluruh sasaran anak balita). Capaian target tahun 2023 sebesar 78,13%. hal ini menunjukkan bahwa belum mencapai target dan perlu dilakukan pengawasan dan intervensi.

42) **Meningkatnya Kualitas Hygiene Sanitasi tempat Pengelolaan Makanan/Minuman**

Target jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi 100% dimana 367 jumlah sarana yang memenuhi syarat kesehatan dari total 367 jumlah seluruh TPM, Angka ini sudah mencapai target yang ditentukan.

43) **Menurunnya Kasus Kematian ibu**

Batas toleransi tahun 2023 adalah 3 kasus kematian ibu. Jumlah kasus kematian ibu sebanyak 8 kasus, yaitu terdiri dari kematian ibu hamil 1 orang dari total 2.959 ibu hamil yang mendapatkan pelayanan dan kematian ibu nifas 7orang dari total 3.682 ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan. Angka kematian ibu ini termasuk tinggi dari batas toleransi yaitu 3 Orang dan hal tersebut tetap dalam pengawasan dan intervensi dari semua sektor terkait..

44) **Cakupan Kompilasi Kompilasi Kebidanan yang Ditangani**

Target tahun 2023 adalah 100%. Jumlah kasus komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif sebesar 245. Pencapaian tahun 2023 sebesar 100% dari 245 kasus komplikasi yang ditemukan dan ditangani secara definitif.

45) **Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, yang memiliki Kompetensi Kebidanan.**

Target jumlah ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2023 sebesar 100%. Jumlah ibu bersalin 3.682 dari 5.043 sasaran ibu

bersalin. Capaian target tahun 2023 sebesar 73,01%. Dari cakupan tersebut belum mencapai target yang ditetapkan dan akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti dalam pelayanan.

46) **Cakupan K4**
Target jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal K4 tahun 2023 seebsar 87,72%. Capaian tahun 2023 sebesar 56,01% (2.959 orang ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 dari 5.283 sasaran ibu hamil). Hal ini menunjukkan bahwa cakupan kunjungan ibu hamil K4 belum mencapai target yang akan menjadi perhatian serius kedepannya sebab indikator ini merupakan indikator SPM.

47) **Cakupan Pelayanan Nifas**
Target jumlah kunjungan ibu nifas yang telah mendapatkan 3 kali pelayanan nifas sesuai standar sebesar 100% pada tahun 2023. Capaian tahun 2023 sebesar 73,09% (3.686 total ibu nifas mendapat pelayanan 3 kali dari 5.043 sasaran ibu nifas tahun 2023). Hal ini menunjukkan bahwa cakupan kunjungan ibu nifas belum mencapai target dan akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti dalam pelayanan..

48) **Angka Kelangsungan Hidup Bayi**
Batas toleransi angka kelangsungan hidup bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada tahun 2023 sebesar 3,43 per 1000 kelahiran hidup. Capaian tahun 2023 sebesar 11,97 per 1000 kelahiran hidup (23 orang bayi dari 1.922 jumlah kelahiran hidup). Hal ini menunjukkan bahwa angka kelangsungan hidup bayi masih batas normal, tidak melewati batas toleransi.

49) **Angka Kematian Neonatus**

Batas toleransi angka kematian neonatal (bayi 0-28 hari) sebesar 3,43 per 1000 kelahiran hidup (9 orang bayi yang meninggal kurang dari 0-28 hari dari 1.922 jumlah kelahiran hidup). Capaian tahun 2023 sebesar 4,68 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan bahwa kematian sangat tinggi pada masa neonatal dari batas toleransi dan sangat perlu dilakukan pengawasan dan intervensi.

50) **Pelayanan Kesehatan Neonatus**

Target pelayanan kesehatan neonatus yang memperoleh pelayanan sesuai standar tahun 2023 sebesar 98% (2.747 orang bayi yang berkunjung untuk memperoleh pelayanan kesehatan 4 kali dan lengkap dari 4.803 jumlah sasaran bayi baru lahir). Capaian tahun 2023 sebesar S7,19%. hal ini menunjukkan bahwa sudah mencapai target pelayanan kesehatan bayi baru lahir lengkap.

51) **Cakupan Kunjungan Bayi**
Target jumlah pelayanan bayi yang memperoleh pelayanan sesuai standar tahun 2023 sebesar 100% (3.493 orang bayi yang berkunjung untuk memperoleh pelayanan kesehatan 4 kali dan lengkap dari 3.657 jumlah seluruh bayi baru lahir). Capaian tahun 2023 sebesar 95,52%. Hal ini menunjukkan bahwa belum mencapai target pelayanan kesehatan bayi baru lahir lengkap dan sangat perlu dilakukan pengawasan dan intervensi.

52) **Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani**
Target jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan sesuai standar sebesar 100% (185 orang bayi dengan komplikasi yang ditangani dari 185 jumlah seluruh bayi dengan komplikasi yang ditangani). Capaian tahun 2023 sebesar 100% seluruh bayi dengan komplikasi yang ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa neonatal dengan komplikasi yang ditangani mencapai target dan perlu dilakukan pengawasan dan intervensi.

Pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, selain disediakan di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes, juga disediakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende. Ukuran kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan di RSUD dapat dilihat melalui capaian indikator, antara lain:

1) **Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS)**
Capaian indikator Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) sebesar 96,85%. Capaian ini jika dibandingkan dengan target pada Perubahan RPJMD Tahun 2023 yaitu sebesar 98,28% maka belum mencapai target.

2) **Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV/AIDS**
Capaian indikator Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV sebesar 89,16%. Capaian ini jika dibandingkan dengan target pada Perubahan RPJMD Tahun 2023 yaitu sebesar 97,43% maka belum melampaui target atau pencapaiannnya sebesar 91,51%.

3) **Bed Occupancy Rate (BOR)**

Indikator ini untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit / prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Prosentase capaian BOR Tahun 2023 sebesar 45,67%. Angka ini jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja Perubahan RPJMD Tahun 2023 yaitu 69,76%, maka belum mencapai target yang ditetapkan . Dengan demikian capaian indikator BOR jika dibandingkan dengan standar Nasional Kementrian Kesehatan RI yaitu 65,47%. Maka masih dibawah rentang nilai porsentase tersebut atau dapat dikatakan bahwa tingkat pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu di RSUD Ende masih rendah.

4) **Average Length of Stay (ALOS)**

Rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dan mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan pengamatan yang lebih lanjut. Average Long of Stay (ALOS) Tahun 2023 yaitu sebanyak 3,26 hari dan turun 0,03 hari dari Tahun 2022 yaitu 3,32 hari. Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD pencapaian indikator ALOS pada Tahun 2023 sebanyak 3,98 hari, maka belum mencapai target yang ditetapkan sebanyak 0,66 hari. Pencapaian ini juga apabila disandingkan dengan angka ideal yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan RI yaitu sebanyak 6-9 hari, maka pencapaian tersebut masih dibawah standar yang ditetapkan atau dapat dikatakan bahwa rata lama seorang di rawat belum mencapai angka ideal yang ditetapkan.

5) **Bed Turn Over (BTO)**

Yaitu Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode satu tahun). Indikator ini untuk mengukur tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur. BTO RSUD Ende Tahun 2023 yaitu sebanyak 25,63 kali. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 62,96 kali, maka mengalami penurunan 12,4 kali. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2020 sebanyak 69,61 kali, maka belum mencapai target yang ditetapkan sebanyak 19,05 kali. Pencapaian angka indikator tersebut diatas jika disandingkan dengan angka ideal yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI yaitu berkisar antara 40 – 50 kali, maka melampaui dari angka ideal yang ditetapkan tersebut artinya bahwa frekuensi penggunaan tempat tidur pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende lebih tinggi dari target nasional.

6) **Turn Over Interval (TOI)**

Indikator ini menunjukkan rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat berikutnya. Indikator ini juga menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Pencapaian indikator pada Tahun 2023 sebanyak 14,43 hari. Jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2022 sebanyak 5,98 hari, maka naik 8,45 hari. Pencapaian ini juga apabila dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebanyak 1,56 hari, maka melampaui target yang ditetapkan. Dan apabila disandingkan dengan angka ideal yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan RI yaitu kisaran 1-3 hari, maka pencapaian ini berada di atas angka ideal yang ditetapkan tersebut. Disampaikan bahwa pada indikator ini untuk interpretasinya dilakukan terbalik artinya bahwa semakin kecil interval tempat tidur tidak ditempati maka dari prespektif BLUD dapat disampaikan bahwa tingkat pengggunaan tempat tidur semakin tinggi.

7) **Gross Death Rate (GDR)**

Angka kematian umum untuk setiap 1.000 penderita/pasien keluar (hidup+mati). Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan ditinjau dari jumlah pasien meninggal secara keseluruhan di rumah sakit. Indicator Gross Death Rate (GDR) pada Tahun 2023 sebesar 82,91%, Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada indikator Perubahan RPJMD Tahun 2023 yaitu sebesar 38,52‰, maka melampaui target yang ditetapkan tersebut. Pencapaian ini masih dalam batas toleransi karena masih dibawah nilai Gross Death Rate yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Deprtemen Kesehatan RI Tahun 2005 yaitu <45 per 1000 penderita keluar.

8) **Net Death Rate (NDR)**

Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk 1.000 penderita/ pasien keluar (hidup+mati). Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Pencapaian indikator Net Death Rate (NDR) Tahun 2023 sebesar 82,91%. Jika

dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada indikator Perubahan RPJMD Tahun 2023 sebesar 210,84‰, maka belum mencapai target yang ditetapkan. Perlu disampaikan bahwa secara nasional untuk indikator Net Death Rate (NDR) ini, perhitungan dilakukan terhadap 1.000 orang pasien. Nilai ini telah melampaui batas toleransi karena berada di atas nilai Net Death Rate yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Tahun 2005 yaitu kurang dari < 25‰ penderita keluar.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- **Pekerjaan Umum**

Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum terkait dengan penyediaan prasarana jaringan jalan dan jembatan, drainase dan ketersediaan irigasi teknis. Gambaran kondisi capaian layanan sebagaimana disajikan sebagai berikut.

1. **Persentase jalan dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)**
   Panjang jalan Kabupaten Ende 815 Km Berdasarkan SK Bupati Ende Nomor 161/KEP/HK/2018 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Di Kabupaten Ende ada 97 ruas jalan yang tersebar di 21 kecamatan dalam kabupaten. Pada Tahun 2023 dilakukan survei, Pemeliharaan , Rehabilitasi dan Rekonstruksi jalan sepanjang 407,12 Km Jalan dalam kondisi baik sehingga realisasinya sebesar 49,95%..
2. **Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembangunan Aliran Air Tidak Tersumbat.**
   Indikator ini diukur dengan menggunakan formula Panjang drainae yang dikerjakan di bagi Total panjang drainase yang seluruhnya. Pada Tahun 2023 target panjang drainase 83.431,1 M yang sudah dikerjakan 46.330,7 M (55,53 %).
3. **Prosentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor.**
   Pada Tahun 2023 jumlah lokasi Pembangunan Turap diwilayah Jalan Penghubung, Sungai Rawan Longsor sebanyak 285 sedangkan lokasi rawan lonsgsor sebanyak 557 (51,17%).
4. **Proposi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaaan dan Perdesaan.**
   Indikator ini di ukur dengan menggunakan Formula Jumlah Rumah Tangga Terakses Air Minum di bagi jumlah Rumah Tangga Seluruhnya. Pada Tahun 2023 Dinas PUPR sudah memiliki Dokumen Rispam sehingga sesuai data Dokumen tersebut Jumlah Rumah sebanyak 64.117 dan Rumah yang sudah terakses Air Minum Layak 36.341 SR/Rumah (56,68%).
5. **Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik.**
   Indikator ini diukur dengan menggunakan Formula Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik per Total Luas irigasi kabupaten. Pada Tahun 2023 Luas Irigasi dalam Kondisi baik yang dikerjakan hanya peningkatan dan rehabilitasi Saluran Irigasi Primer dan Sekunder pada Luasan yang sama, setelah dihitung oleh Bidang Pengairan tidak bertambah luasan dan capaian Luas tetap seperti Tahun 2022 yaitu seluas 2.621 Ha sedangkan total luas irigasi kabupaten 4.876 Ha (53,75%).
6. **Presentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik**
   Indikator ini diukur dengan menggunakan Formula Panjang Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik di bagi panjang Lingkungan Seluruhnya. Pada Tahun 2023 panjang jalan lingkungan 63.227M (67,01%) sedangkan panjang Lingkungan Seluruhnya 94.358,47 M.
7. **Prosentase perencanaan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang sesuai regulasi yang berlaku**
   Indikator ini diukur dengan menggunakan formula Jumlah ketaatan RTRW dan RDTR dibagi Jumlah total kesesuaian ruang yang dikeluarkan. Pada Tahun 2023 Jumlah ketaatan RTRW sebanyak 681 Keterangan Kesesuaian Ruang dari Jumlah total keterangan kesesuaian ruang yang dikeluarkan 723 rekomendasi (94,19%).
8. **Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan**
   indikator ini diukur dengan menggunakan formula jumlah Luas RTH publik yang tersedia di akhir tahun Pencapaian SPM dibagi Luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan. Tahun 2023 tidak ada penambahan Luas Ruang Terbuka Hijau, Luas RTH publik yang tersedia sebanyak 4,05 ha dibagi Luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia sebanyak 289,016 ha (1,40%).

- **Penataan Ruang**

  Urusan Penataan Ruang memegang peranan penting dalam pengendalian pembangunan yang sesuai dengan peruntukkannya. Keadaan sampai Tahun 2023 menunjukan bahwa **ratio Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan sebesar 1,46 persen**. Hal ini menggambarkan bahwa masih sangat banyak bangunan yang belum memiliki IMB. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan akan terus diperkuat upaya koordinasi antara Dinas PU, Bappeda dan KPTSP. Sementara itu untuk **penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH),** tidak ada penambahan Luasan RTH Publik. Kondisi ruang terbuka hijau yang ada ini sedapat mungkin dipertahankan agar tidak beralih fungsi.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelayanan pada urusan Perumahan Rakyat terkait dengan ketersediaan rumah layak huni, air bersih, sanitasi dan lingkungan. Gambaran kondisi capaian layanan sebagaimana disajikan sebagai berikut.

1. **Persentase KK Korban Bencana Alam atau Relokasi yang memperoleh Rumah Layak Huni**
   Formula indikator yang digunakan adalah Jumlah KK Korban Bencana atau Relokasi yang Memperoleh RLH/Jumlah Total Rumah Layak Huni . Pada Tahun 2023 Jumlah Rumah Layak Huni bagi korban Bencana oleh DPRKPP Kabupaten Ende adalah sebanyak 46.550 Unit dari Total Rumah Layak Huni sebanyak 64.628 unit (72,03%).
2. **Persentase Luasan Permukiman Kumuh Tertangani**
   Indikator ini diukur dengan menggunakan formula luas permukiman kumuh yang tertangani dibagi luas permukiman kumuh seluruhnya. Sampai dengan Tahun 2022 dilakukan penanganan kawasan kumuh seluas 14.11 Ha atau 11.92% dari total luas permukiman kumuh 118.41 Ha. Tahun 2023, belum dilakukan penanganan kawasan kumuh dikarenakan keterbatasan dana sehingga total kawasan kumuh tertangani masih sama dengan tahun sebelumnya yakni 14.11 Ha (11.92%).
3. **Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**
   Formula indikator yang digunakan jumlah rumah tinggal bersanitasi dibagi jumlah rumah seluruhnya pada tahun n. Pada tahun 2023, jumlah rumah tinggal bersanitasi 33.614 buah dari total jumlah seluruh rumah 64.628 (52,01%).
4. **Persentase Meningkatnya Rumah Layak Huni**
   Indikator ini diukur dengan menggunakan formula jumlah rumah layak huni tahun n dibagi jumlah rumah seluruhnya pada tahun n. Pada tahun 2023, jumlah rumah layak huni 46.529 buah dari total jumlah seluruh rumah 64.628 (72%). Peningkatan jumlah.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Capaian indikator-indikator kinerja utama Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Kelima Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu: "Menciptakan Pemerintahan yang Bersih,Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat" yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1) Jumlah **Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa**
   Pada tahun 2023 ditargetkan Jumlah Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang dilakukan sebanyak 10 Kegiatan yang menghasilkan 8 Dokumen diantaranya:
   1. Kegiatan Hari Lahir Pancasila (1 Juni) Tahun 2023
   2. Kegiatan Hari Proklamasi 17 Agustus 2023
   3. Kegiatan Apel Kesadaran 17 Bulan Berjalan
   4. Kegiatan Hari Pahlawan 10 Nopember 2023
   5. Kegiatan Bela Negara
   6. Kegiatan UP2WK
   7. Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan
   8. Kegiatan Paskibraka

   Namun karena keterbatasan anggaran, makanya realisasi untuk kegiatan tersebut hanya mencapai 6 kegiatan atau 62,50 % yaitu Kegiatan Hari Lahir Pancasila (1 Juni), Kegiatan Hari Proklamasi 17 Agustus, Kegiatan Apel Kesadaran 17 bulan Berjalan, Kegiatan Hari Pahlawan 10 Nopember, Kegiatan Paskibraka, Kegiatan Bela Negara.

2) **Jumlah Parpol yang dibina**

Jumlah partai politik yang dibina adalah jumlah parpol yang tercatat dan berhak untuk menerima bantuan keuangan yaitu sebanyak 12 (dua belas) partai politik yang merupakan jumlah partai yang memperoleh kursi pada Pemilu tahun 2019 – 2024 . Regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan partai politik diatur dalam Permendagri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata cara perhitungan, penganggaran dalam Ang_ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

3) **Presentase Ormas yang dibina**

Tercatat dari periode bulan Desember 2019 sampai dengan Desember 2023 sudah terhimpun sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan dan agama, pendidikan, teknologi dan lain-lain.jumlah Ormas yang dibina sebanyak 30 ormas sehingga capaiannya sebesar 38,96%

4) **Cakupan Pembinaan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi**

Pembinaan Kemasyarakatan melalui Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial melakukan penyelesaian konflik sosial yang terjadi. Selama tahun 2023 ada 3 konflik sosial yang terjadi di tahun 2023 adalah:

1. Konflik Perkelahian antara pemuda di Desa Kotabaru Kecamatan Kotabaru
2. Konflik Hak Ulayat tanah di Desa Detupera Kecamatan Lio Timur
3. Konflik Tawuran antar pelajar antara siswa SMK 1 dan siswa SMK 2 Ende di Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur

Dari ketiga konflik yang terjadi ada 2 konflik yang sudah diselesaikan yaitu konflik Hak ulayat tanah di Desa Detupera dan Konflik Tawuran antar pelajar di kecamatan Ende Timur. Sehingga Prosentase untuk Cakupan pembinaan Agama, kemasyarakatan dan ekonomi adalah sebesar 66,67%.

5) **Persentase Deteksi Dini dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**

Pada tahun 2022 target Porsentase Deteksi Dini dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial 100% . capaian terhadap indikator ini adalah 166,67% dimana jumlah deteksi dini sebanyak 5 kasus dibagi Jumlah Penanganan konflik sosial sebanyak 3 kasus.

1. **Satuan Polisi Pamong Praja**

Layanan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan dengan indikator Cakupan Kegiatan Antisipasi Penanganan Konflik Sosial, Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan), Menurunnya Kasus Konflik Sosial Sosial yang Terjadi, Cakupan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas), Presentase Penegakan Perda, Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran WMK).

1) **Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)**

Target Capaian Kinerja yang ditetapkan di tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi capaian kinerja sebesar 100% dimana sebanyak 7 kasus pelanggaran K3 yang tertangani dari 7 Kasus Pelanggaran K3 yang terjadi.

2) **Persentase Pelayanan Pemadaman dan penyelamatan kebakaran sesuai standar**

Pada tahun 2023 Jumlah Kasus di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)yang tertangani sebanyak 13 kasus dari 13 kasus kebakaran dalam jangkauan waktu WMK sehingga capaiannya 100 % .

3) **Presentase Penegakan Perda**

Pada tahun 2023 capaian kinerja jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan sebesar 100% dimana sebanyak 3 kasus pelanggaran perda dapat diselesaikan.

4) **Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate)* Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran WMK)**

Pada tahun 2023 capaian kinerja sebesar 100 % dimana dalam penanganan masalah kebakaran yang terjadi dilakukan secara cepat dan tepat dengan durasi waktu tanggap dibawah 15 menit..

2. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk mendukung

tercapainya sasaran-sasaran Misi Kelima yaitu; "Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat" yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1) **Persentase Desa Tangguh bencana pada kawasan rawan bencana**
   Pada tahun 2023 target Persentase Desa Tangguh bencana pada kawasan rawan bencana sebesar 30,57%. Capaian terhadap indikator ini adalah 50,87 % dimana Jumlah Desa Siaga Bencana yang aktif pada tahun 2023 sebanyak 88 Desa/Kelurahan dari 173 Desa Rawan Bencana di Kabupaten Ende.

6. Sosial

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama Urusan Sosial dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja Misi Kelima yaitu ; "Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat" yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi:

1) **Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan**
   Pada tahun 2023 jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebanyak 137 jiwa (Pendamping PKH 74 jiwa, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 21 orang dan Taruna Siaga Bencana 42 orang) semuanya diberdayakan sehingga capaiannya 100%.
2) **Persentase Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani/ diberdayakan**
   Pada tahun 2023 jumlah PPKS yang tertangani sebanyak 18.897 jiwa dengan total PPKS sebanyak 35.920 jiwa sehingga realisasi sebesar 52,61 %. Penurunan jumlah jiwa PPKS yang tertangani disebabkan bantuan cadangan pangan yang bersumber dari APBN (Kementrian Sosial) sudah dialihkan ke Badan Pangan Nasional (Bappanas) dan berkurangnya data kemiskinan melalui Verifikasi dan Validasi Data DTKS Desa/Kelurahan (Aplikasi SIKS NG Desa/Kelurahan). Permasalahan yang dialami pada urusan Sosial di Kabupaten Ende adalah masih banyak Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdaftar dalam DTKS belum terintervensi bantuan sosial.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Tenaga Kerja** mendukung pencapaian sasaran kinerja Misi Ketiga yaitu: "Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1. **Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi.**
   Pada Tahun 2023 Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi belum mencapai target 54,39 %. dengan realisasinya 52,98 % . Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar sebanyak 168 orang sedangkan Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan sebanyak 89 orang.
2. **Meningkatnya kesempatan Kerja**
   Pada tahun 2023 di targetkan 82,51 % dengan realisasi belum mencapai target sebesar 52,98% dikarenakan ada Pencari Kerja yang melakukan pendaftaran untuk di data secara terdaftar sebanyak 137 orang secara online. Data pencari kerja tersebut tidak semua mereka datang untuk melaporkan diri sebagai pencari kerja yang di tempatkan sehingga yang terdaftar untuk di tempatkan yang terlapor dan tercatat adalah mencari kerja yang hendak berangkat ke Dalam Daerah dan Keluar Daerah hanya 40 orang. Ada Pencari kerja yang di tempatkan yaitu Antar Kerja Antar Negara 10 orang dan Antar Kerja Antar Daerah 30 Orang sedangkan Antar Kerja Lokal tidak di ketahui karena tidat dilaporkan setelah mendapatkan pekerjaan.
3. **Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan**
   pada tahun 2023 bisa melebihi target 81,82 %, Jumlah kasus yang dilaporkan tertulis ada 11 kasus namun dapat di selesaikan hanya 9 kasus 2 kasus diselesaikan pada tahun berikutnya karena pekerja dan pemberi kerja masih menyelesaikan kesepakatan bersama. Jumlah Kasus

ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama di target 58,33 % namun pada tahun 2023 bisa melebihi target 81,82 %, Jumlah kasus yang dilaporkan tertulis ada 11 kasus namun dapat di selesaikan hanya 9 kasus 2 kasus diselesaikan pada tahun berikutnya karena pekerja dan pemberi kerja masih menyelesaikan kesepakatan bersama.

4. **Jumlah Kepesertaan Program Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan**
   Jumlah pekerja yang menjadi Peserta BPJS ketenagakerjaan sudah mencapai target 84,27 dari target yang direncanakan 77,05%. Di mana ada sebanyak 5.375 pekerja yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagekerjaan dari jumlah seluruh pekerja yang tercatat 6.378 orang.
5. **Besaran Perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi(UMP**
   Besaran Perusahaan yang menerapkan Upah minimum Propinsi (UMP) adalah 60 Perusahaan dari 540 Perusahaan yang terdaftar. Indikator ini mencapai target 11,11 % dari yang di targetkan 9,60 % di tahun 2022. Walaupun belum semua perusahaan bisa menerapkan UMP namun sudah sebagian Perusahaan yang sudah bisa menerapkan UMP secara baik sesuai dengan Pendapatan yang diterima.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukan dengan indikator Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Partisipasi angkatan kerja perempuan, Cakupan Data Gender, Presentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan, Cakupan Lembaga Pemenuhan Hak Anak dan Cakupan Perlindungan Khusus Anak.

1. **Rasio KDRT**
   Pada Tahun 2023 jumlah kasus KDRT yang terlayani di Kabupaten Ende sebanyak 23 kasus dari jumlah Seluruh Rumah Tangga yang ada yaitu 143.464 jiwa sehingga capaian kinerja sebesar 0,02 % Pencapaian tersebut karena adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam rangka penurunan kasus KDRT.
2. **Partisipasi angkatan kerja perempuan**
   Pada Tahun 2023 jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan yang terlayani di Kabupaten Ende sebanyak 76.276 jiwa dari jumlah Angkatan Kerja Perempuan yang ada yaitu 77.842 jiwa sehingga realisasi kinerja sebesar 97,99%. Pencapaian tersebut karena adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam rangka meningkatkan program kesetaraan Gender dalam pembangunan guna mendukung perekonomian keluarga.
3. **Cakupan Data Gender dan Anak yang tersedia**
   Jumlah Dokumen Penyajian Data Gender dan anak yang tersedia adalah sebanyak 2 Dokumen yaitu Dokumen Data Gender dan Dokumen Data Anak
4. **Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan**
   Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap korban kekerasan adalah sebesar 100 % , atau 1 lembaga yang melaksanakan layanan terhadap korban kekerasan dari jumlah keseluruhan lembaga yang berjumlah 1 UPTD layanan terhadap korban kekerasan, yang mana layanan UPTD PPA sebanyak hanya 1 UPTD yang ada di Kabupaten Ende.
5. **Cakupan Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA)**
   Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak anak yang aktif sebanyak 18 lembaga dari jumlah seluruhnya lembaga pemenuhan Hak Anak yaitu sebanyak 18 lembaga pemenuhan hak anak. Dari Jumlah seluruh lembaga pemenuhan hak anak semuanya aktif dalam hal pemenuhan hak anak yang ada di Kabupaten Ende.
6. **Cakupan Perlindungan Khusus Anak**
   Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap anak adalah sebanyak 32 kasus dari jumlah total pengaduan kekerasan terhadap anak yang ada di Kabupaten Ende pada tahun 2023 yaitu 32 pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yaitu sebesar 100%.

3. Pangan

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan** Pangan mendukung pencapaian sasaran kinerja Misi Ketiga yaitu: "Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang kompetitif dan Berkelanjutan", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1. **Jumlah lumbung pangan masyarakat yang aktif**
   Pada tahun 2023 target lumbung pangan masyarakat yang aktif sebanyak 33 unit Realisasi sebesar 31 unit sehingga Capaiannya sebesar 93,94%. Sasaran kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat adalah kegiatan yang tergabung dalam kelompok tani (Poktan) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang telah membangun fisik Lumbung Pangan dan desa - desa

yang mengalami Rawan Pangan Berat, Rawan Pangan Sedang dan desa – desa yang mengalami Stunting, dengan tujuan :

- Meningkatkan keberdayaan Kelompok Tani dalam pengelolaan dan pengembangan usaha lumbung pangan secara berkelanjutan;
- Meningkatkan peran kelembagaan Lumbung Pangan selain berperan sebagai fungsi sosial dalam penyediaan Cadangan Pangan Masyarakat, diharapkan juga berperan sebagai fungsi ekonomi bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitar desa sasaran;
- Meningkatkan volume stok cadangan pangan dikelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupana pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan;
- Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan;
- Meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

2. **Peningkatan jumlah Kelompok tani pengelola pemanfaatan pekarangan**

Target tahun 2023 sebanyak 51 kelompok Realisasinya sebanyak 1 Kelompok sehingga capaiannya sebesar 1,96%. Pemberdayaan Kelompok Tani/ Dasa Wisma dalam penyediaan sumber pangan dan gizi melalui Pemanfaatan Pekarangan disekitar rumah sangat dibutuhkan selain itu, dapat menunjang pendapatan kelompok tani melalui penghematan pengeluaran untuk konsumsi pangan rumah tangga, menekan perkembangan gagal tumbuh (stunting) pada anak – anak dengan meningkatnya frekuensi konsumsi sayur buah dan protein hewani.

3. **Penanganan Desa/Kelurahan Rawan Pangan**

Target tahun 2023 sebanyak 50 desa/kelurahan Realisasi 70 desa sehingga capaiannya 140 %. Dalam pengambilan data desa/kelurahan yang rawan pangan oleh petugas / staf pengambil data yang bertugas ke lapangan atau desa sasaran, juga diambil data pada desa / kelurahan yang dilewati pada saat menuju desa sasaran, sehingga dari target 50 desa /kelurahan sasaran data yang terkumpul dari 70 desa / kelurahan. Tersedianya data Laporan Pemantauan Situasi Pangan masyarakat Kabupaten Ende Tahun 2023, yang memuat kondisi desa/kelurahan yang terindikasi Rawan Berat (RB), sebanyak 71 desa, Rawan Ringan (RR) sebanyak 30 Desa, Rawan Sedang (RS) sebanyak 46 desa dan Tidak Rawan (TR) sebanyak 131 desa.

4. **Persentase Pangan Segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan**

Tahun 2023 Target Pangan Segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sebesar 76 % realisasinya sebesar 93,75%. Kegiatan yang dilakukan berupa pengawasan Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan baik di pasar maupun di petani, yakni melakukan pemeriksaan uji cepat dengan menggunakan Rapid Test Kit dengan jumlah sampel sebanyak 80 sampel sayuran dari target total sampel yang wajib diuji sebanyak 180 sampel sehingga realisasi indikator pembinaan dan pengawasan keamanan pangan pada Pelaku Utama dan Pelaku sayuran dari hasil uji cepat tesebut, sebayak 75 sampel yang aman dan bebas residu sedangkan 5 sampel sayuran yang terpapar residu pestisida

Faktor Keberhasilan : 1. Hasil Pengujian menunjukan bahwa jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang aman lebih banyak daripada sampel pangal segar asal tumbuhan yang tidak aman; 2. Pelaku Usaha (Petani) telah menerapkan budidaya yang baik / Good Agriculture Practice; 3. Penggunaan pestisida oleh pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang mendapat pelayanan/ penyusuhan telah sesuai anjuran.

Faktor Kegagalan: Meningkatnya populasi hama sehingga frekuensi penggunaan pestisida akan meningkat dan berpengaruh pada keamanan PSAT, Masih terbatasnya sistem Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah

4. **Pertanahan**

Capaian kinerja Program Urusan Pertanahan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Perubahan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, sebagai berikut:

1) **Persentase Bidang Tanah Pemda yang Tersertifikat**

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula indikator Jumlah luas tanah PEMDA yang disertifikat dibagi Jumlah luas tanah PEMDA seluruhnya. Pada Tahun 2023 luas tanah pemda yang disertifikat sebesar 2.115.376 m2 (20,59%) dari total luas tanah PEMDA seluruhnya

sebesar 10.273.760 m2 . Kondisi ini masih kurang dari target yang ditetapkan sebesar 78,21%. Capaian Kinerja Tahun 2023 adalah merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target kinerja tahun 2023 pada perubahan RPJMD yaitu: (20,59/78,21) x 100%= 26,33 %.

5. Lingkungan Hidup

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Lingkungan Hidup** mendukung pencapaian sasaran kinerja Misi Keempat yaitu: "Membangun, Manata dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi:

1) Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH
2) Persentase Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditangani
3) Persentase B3 dan Limbah B3 yang ditangani
4) Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH
5) Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat di Kabupaten
6) Persentase lembaga pendidikan/dunia usaha yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH
7) Persentase penanganan pengaduan Lingkungan Hidup
8) Persentase Pengurangan Sampah
9) Persentase Penanganan Sampah

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Adminsitrasi Kependudukan dan Capil** mendukung pencapaian sasaran kinerja Misi Kelima yaitu: "Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat "yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1. **Persentase Penduduk berKartu Keluarga**

   Pada Tahun 2023 target Persentase Penduduk berKartu Keluarga 43,97%, capaian kinerja sebesar 81,05% atau sebanyak 75.754 orang yang telah memiliki KK (kartu Keluarga) dari 93.471 kepala keluarga pada tahun 2023.

2. **Persentase Penduduk ber KTP-el**

   Pada Tahun 2023 target Persentase Penduduk ber KTP-el sebesar 99,30% , capaian kinerja sebesar 99,30% atau sebanyak 207.331 Orang yang telah memiliki KTP dari 208.792 orang Yang wajib memiliki KTP Elektronik pada tahun 2023.

3. **Persentase anak memiliki KIA**

   Pada Tahun 2023 target Persentase anak memiliki KIA sebesar 68,58% , capaian kinerja sebesar 63,88% atau sebanyak 47.256 orang yang telah memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) pada Tahun 2023 dari 68.911 orang yang Wajib memiliki KIA.

4. **Persentase penduduk usia 0-18 th ber akta kelahiran**

   Pada Tahun 2023 target Persentase penduduk usia 0-18 th ber akta kelahiran sebesar 70,58%, capaian kinerja sebesar 92,34 % atau sebanyak 73.785 orang yang telah memiliki Akta Kelahiran pada Tahun 2023 dari 79.904 orang yang berusia 0 s/d 17 tahun.

5. **Cakupan ketersediaan profil kependudukan**

   Pada Tahun 2023 target Cakupan ketersediaan profil kependudukan sebanyak 1 dokumen capaian kinerja sebsar 100 % atau sebanyak 7 dokumen profil kependudukan yang diterbitkan.

6. **Prosentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dilaksanakan**

   Pada Tahun 2023 target Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) sebanyak 23 Inovasi. Jumlah Inovasi serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dilaksanakan 23 inovasi sehingga capaian Kinerja sebesar 100 % pada Tahun 2023.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa ditunjukan dengan 5 indikator dengan gambaran tingkat capaian sampai dengan keadaan tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. **Persentase Penataan Desa**
   Pada Tahun 2023 pada Program Penataan Desa Jumlah Desa yang terealisasi Penataan Desa sebanyak 9 Desa dari target 9 Desa yang diusulkan untuk Penataan Desa sehingga capaiannya sebesar 100 %.
2. **Persentase Peningkatan Kerjasama Pedesaan**
   Tahun 2023 pada Program Peningkatan Kerja Sama Desa, Jumlah Desa yang didampingi 8 Desa dari Jumlah seluruh Desa yang melakukan kerja sama 91 Desa sehingga capaiannya sebesar 8,79 %.
3. **Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang tertib administrasi**
   Tahun 2023 pada Program Administrasi Pemerintah Desa Jumlah Desa yang tertib Administrasi sebanyak 150 Desa dari Jumlah 255 Desa sehingga capaiannya sebesar 58,82 %.
4. **Persentase BUMDes Berkembang**
   Tahun 2023 pada Program Administrasi Pemerintah Desa Jumlah BUMDes berkembang sebanyak 10 BUMDes dari Jumlah 96 BUMDes terbentuk sehingga capaiannya sebesar 10,42 %.
5. **Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat**
   Tahun 2023 pada Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang terlibat didalam Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 2.905 lembaga dari Jumlah 3.706 Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat sehingga capaiannya sebesar 78,39 % dari target Kinerja 80,95 %.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan program dan kegiatan KB berkaitan dengan upaya untuk mengendalikan angka kelahiran serta membentuk keluarga yang berkualitas. Beberapa indikator yang dapat mengukur kinerja dari pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain:

1) **Meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk**
   Persentase pemanfaatan kebijakan bangga kencana, diukur dengan rumusan jumlah kebijakan bangga kencana provinsi yang dilaksanakan di kabupaten dibagi dengan jumlah kebijakan bangga kencana provinsi. Target yang ditetapkan sebesar 85,5%, realisasi 100%, menunjukan bahwa semua kebijakan bangga kencana provinsi telah dilaksanakan kabupaten. kebijakan tersebut terkait distribusi alat dan obat kontrasepsi, tribina, usaha peningkatan pendapatan kelompok akseptor (UPPKA), PIK R, Pendataan Keluarga 21, Aplikasi New Siga, Komunikasi dan Informasi (KIE) dan Penanganan Stunting.
2) **Presentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**
   Untuk tahun 2023, persentase penggunaan KB metode kontrasepsi jangka panjang sebanyak 45,31% (6015 peserka KB MKJP dari 13276 peserta KB aktif) lebih besar dari target yang ditetapkan 45,31%.
3) **Menurunnya tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/ DO)**
   Indikator ini menunjukan perbandingan antara jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi dengan jumlah peserta KB aktif. jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi sebanyak 1.790 jiwa sedangkan Jumlah akseptor KB sebanyak 13.276 jiwa sehingga Capaian kinerjanya 13,48%, masih sangat jauh dari target yang diharapkan sebesar 10,5%.
4) **Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan**
   Tahun 2023 target rata-rata usia kawin pertama perempuan adalah 24 tahun sedangkan realisasinya adalah 27 tahun. Masih ada anggapan tentang tidak pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan persiapan kehidupan berkeluarga dari berbagai aspek sehingga dinas berupaya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja (PKBR)..

9. Perhubungan

Pelayanan perhubungan terkait erat dengan keselamatan pengguna dan pelayanan penumpang, serta dukungan distribusi arus barang dan jasa. Capaian Indikator kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Indeks pelayanan transportasi darat**
   Indeks Pelayanan Transportasi Darat dengan realisasi 46,55 % dari target 88,82%.

2. **Persentase Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Layanan Angkutan Laut.**
   Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Layanan Angkutan Laut dengan realisasi 100% target 100%.

10. Komunikasi dan Informasi

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika** mendukung pencapaian sasaran kinerja Misi Kelima yaitu: Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat",, yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi:

1. **Persentase diseminasi informasi publik**
   Pada Tahun 2023 Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menjalankan Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan capaian kinerja sebesar 107,08% dari target 100%. Capaian kinerja yang diperoleh melebihi target yang sudah ditentukan, hal ini disebabkan oleh terpublikasinya hampir setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan di semua channel resmi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende, baik itu yang dirilis dan diupdate melalui Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Ende dengan domain : www.endekab.go.id dan beberapa platform media sosial yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende yaitu Channel Youtube: "Tiwu Telu Media", Facebook dan Instragram.
2. **Persentase layanan publik secara online dan terintegrasi yang berfungsi baik**
   Pengukuran Indikator Kinerja Persentase layanan publik secara online dan terintegrasi yang berfungsi baik meliputi Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota dilaksanakan oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah telah terhubung atau terkoneksinya jaringan intra Pemerintah Daerah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende sebanyak 19 (limabelas) OPD dan 16 (enambelas) bukan OPD (Kantor desa dan Fasilitas Umum). Target kinerja yang ditetapkan adalah 53 opd atau 100%, baru dapat direalisasikan sebesar 66,03%, dengan demikian capaian kinerja baru mencapai 66,03%.
3. **Persentase Sistem Informasi yang Tercover NOC dan Data Center**
   Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Sistem Informasi yang Tercover NOC dan Data Center meliputi Kegiatan Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota dilaksanakan oleh Bidang Layanan Elektronik Government. Pada tahun 2023 melaksanakan 1 (satu) sub kegiatan Yaitu Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan melakukan pengembangan aplikasi dan pengelolaan website OPD Lingkup Pemkab Ende. Target kinerja pengelolaan website adalah untuk 32 (tiga puluh dua) OPD Lingkup Pemkab Ende dan sudah direalisasikan untuk ke 32 (tiga puluh dua) OPD tersebut. Sedangkan untuk pengembangan aplikasi telah dikembangkan 2 (dua) aplikasi yaitu Aplikasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dan Aplikasi Trans Ende (Aplikasi untuk Taksi Online) dengan demikian realisasi capaian kinerja adalah 100%.
4. **Persentase Penyediaan Data Statistik Sektoral**
   Pada Tahun 2023, telah dilaksanakan kegiatan penyediaan data statistik sektoral lingkup Pemerintah Kabupaten Ende. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan Sosialisasi Satu Data Indonesia. Target Kinerja dari Penyediaan data statistik sektoral adalah tersedianya data statistik sektoral pada OPD Lingkup Pemkab Ende sebanyak 20 (dua puluh) OPD Lingkup Pemkab Ende. Pelaksanaan kegiatan tersebut menunjukan hasil tersedianya data statistik sektoral oleh 8 (delapan) OPD di lingkup Pemda Kabupaten Ende. Dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40,00%.

11. Koperasi dan UMKM

Layanan Urusan Koperasi dan UMKM diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas koperasi dan kemandirian UMKM. Capaian indikator kinerja Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Ende Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. **Jumlah Koperasi Yang Diterbitkan izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang**
   Pada tahun 2023 target Jumlah Koperasi Yang Diterbitkan izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang adalah 125 koperasi realisasinya sebanyak 3 koperasi yang diterbitkan izin usaha simpan pinjam dan 2 kantor cabang sehingga capaiannya 0,040 %.
2. **Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa**
   Pada tahun 2023 target Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa adalah 15 koperasi realisasinya sebanyak 25 koperasi sehingga capaiannya 167 %.
3. **Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Standar Kesehatan**
   Pada tahun 2023 target Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Standar Kesehatan adalah 28 koperasi realisasinya sebanyak 28 koperasi sehingga capaiannya 100 %
4. **Jumlah SDM Pengurus Koperasi yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian**
   Pada tahun 2023 target Jumlah SDM Pengurus Koperasi yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian adalah 109 orang realisasinya sebanyak 152 orang sehingga capaiannya 139 %.
5. **Jumlah Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan dan Perlindungan**
   Pada tahun 2023 target Jumlah Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan dan Perlindungan adalah 14 koperasi realisasinya sebanyak 21 koperasi sehingga capaiannya 150 %.
6. **Presentase UMKM yang difasilitasi dan berdayasaing**
   Pada tahun 2023 target UMKM yang difasilitasi dan berdayasaing adalah 22,33%. UMKM yang difasilitasi dan berdayasaing sebanyak 55 UMKM dibanding dengan UMKM yang terdata sebanyak 5.039 UMKM sehingga capaiannya 1,09 %.

12. Penanaman Modal

Pelayanan Urusan Penanaman Modal dan Investasi di Kabupaten Ende ditunjukan dengan penyediaan regulasi yang mendukung investasi di daerah dan perkembangan investasi di bidang industri, perdagangan, pariwisata serta kerjasama dengan pihak ketiga terkait kegiatan *Coorporate Social Responsibility* (CSR).

1) **Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti**
2) **Jumlah investor baru**

Untuk Indikator Kinerja Peningkatan investor (PMDN/ PMA), capaian pada tahun 2022 sebesar 30% dari target yang telah ditetapkan. Capaian Jumlah Investor PMDN/PMA sebanyak 3 Perusahaan dari target sebanyak 10 Perusahaan (kurang dari target sebanyak 80%).

3) **Persentase Jumiah Permohonan izin yang terlayani**
4) **Persentase pengaduan yang terselesaikan tepat waktu**
5) **Persentase Peningkatan investasi di Kabupaten Ende**

Pada tahun 2023 angka realisasi penanaman modal sebesar Rp. 537.262.834.284 atau 53.726,2834244%. Sedangkan realisasi penanaman modal pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.430.323.869.187, atau 243.032,3869187%. Untuk nilai realisasinya tidak mengalami penurunan dari target realisasi investasi yang ditetapkan sebesar 1 Milyar tiap tahunnya sebelum perubahan indikator sasaran. Untuk capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan sebesar sebesar 189.306,1034943% dari tahun 2022.

6) **Persentase izin yang terselesaikan**

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pelayanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga ditujukan untuk melaksanakan pembinaan Kepemudaan dan Olahraga. Capaian Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Persentase Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan**
   Indikator ini menunjukan Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan yang aktif pada tahun 2023 sebanyak 84 dibanding dengan Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan seluruhnya sebanyak 88 dikalikan dengan seratus persen. Capaian terhadap indikator ini sebesar 95,45%.

2. **Persentase Wirausaha Muda**
   Indikator ini menunjukan Jumlah Wirausaha Muda pada tahun 2023 sebanyak 150 dibanding dengan Jumlah seluruh Wirausaha sebanyak 222 dikalikan dengan seratus persen. Capaian terhadap indikator ini sebesar 67,57%. Tujuan dari indikator ini adalah membangkitkan kewirausahaan pemuda untuk melahirkan wirausaha-wirausaha muda yang mampu membuka lapangan kerja sendiri, sehingga dapat membangkitkan partisipasi pemuda dalam kegiatan wirausaha pemuda, yang berdampak pada meningkatnya prosentase pemuda yang berpartisipasi dalam wirausaha pemuda serta meningkatnya prosentase pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan.
3. **Jumlah Atlet Yang Memperoleh Medali Dalam,Olahraga Prestasi, Olahraga Masyarakat dan olahraga Pendidikan pada Kejuaraan Tingkat Provinsi dan Nasional**
   Indikator ini menunjukan Jumlah Atlet yang Memperoleh Medali Dalam Kejuaraan pada tahun 2023 sebanyak 147 orang dibanding dengan Jumlah Atlet Yang Mengikuti Kejuaraan Seluruhnya sebanyak 371 orang dikalikan dengan seratus persen. Capaian terhadap indikator ini sebesar 39,62%. Partisipasi atlit Kabupaten Ende dalam setiap kejuaraan yang dilaksanakan di Tingkat Propinsi seperti olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan olahraga masyarakat ditandai dengan perolehan medali sbb : Olahraga Pendidikan : POPDA yang mendapat medali 20 orang, POPROV yang mendapat medali 59 orang, ETMC Lembata yang mendapat medali Juara I 25 orang, Soeratin CUP yang mendapat medali Juara II 35 orang, Kejuaraan Atletik yang mendapat medali 5 orang, Kejuaraan Karate yang mendapat medali 3 orang.
4. **Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Yang Dilaksanakan**
   Indikator ini menunjukan Jumlah Kegiatan Kepramukaan yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak 2 kegiatan dibanding dengan rencana Kegiatan Kepramukaan sebanyak 12 kegiatan dikalikan dengan seratus persen. Capaian terhadap indikator ini sebesar 16,67%. Pelaksanaan kegiatan pramuka seperti Jambore Nasional dan Jambore Daerah dapat meningkatkan kualitas diri dan keterampilan generasi muda Indonesia.

14. Persandian

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama Urusan Persandian mendukung pencapaian sasaran kinerja Misi Kelima yaitu: Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat",, yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :.

1) **Persentase pengamanan data dan informasi daerah**
   Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Kemanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi. Target Kinerja dari Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi adalah 4 (empat) produk hukum. Dari target 4 (empat) produk hukum tersebut telah dihasilkan 1 (satu) produk hukum yaitu SK Bupati Ende Nomor : 81 / KEP / HK / 2023 Tentang Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende, dan Pada tahun 2023 telah dilakukan sosialisasi tentang Peran PPID Utama dan PPID Pembantu ke semua OPD Lingkup Pemkab Ende. Dari target 4 (empat) Produk Hukum tersebut telah terealisasi 1 (satu) Produk Hukum, sehingga realisasi dari target capaian kinerja tersebut adalah 25%.

15. Perpustakaan dan Kearsipan

Pelayanan Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, menunjukan capaian yang cukup baik. Capaian Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) **Persentase Pembinaan Perpustakaan Daerah, Kelurahan dan Desa**
   Tahun 2023 Target Persentase Pembinaan Perpustakaan Daerah, Kelurahan dan Desa sebesar 90% realisasi sebesar 37,36% dimana Jumlah Perpustakaan yang dibina sebanyak 89.478 dari jumlah perpustakaan yang ada sebanyak 239.471 perpustakaan.
2) **Persentase Pengelolaan Arsip secara baku di tingkat Perangkat Daerah dan Desa**
   Tahun 2023 Target Persentase Pengelolaan Arsip secara baku di tingkat Perangkat Daerah dan Desa sebesar 55% realisasi sebesar 44,16 % dimana Jumlah PD dan Desa yg mengelola arsip secara baku sebanyak 136 Perpustakaan dari total Perangkat Daerah dan Desa sebanyak 308 Perpustakaan.

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Pelayanan Urusan Kelautan dan Perikanan diarahkan dalam mencapai pelaksanaan program dan

kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan mendukung tercapainya sasaransasaran Misi Ketiga yaitu: "Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan", yang diukur melalui capaian indikator program yang meliputi:

1) **Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap**

   Produksi hasil Perikanan Tangkap pada Tahun 2023 sebesar 11.780,213 Ton dibagi dengan Potensi Lestari Perikanan Tangkap sebesar 19.299,4 Ton (61,04%) sehingga realisasinya mengalami penurunan produksi sebesar 0,05% dari target pada Perubahan RPJMD Kab. Ende Tahun 2019-2024 sebesar 61,09 % yang berpengaruh pada produktivitas hasil tangkapan.

2) **Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**

   Produksi hasil Perikanan Budidaya pada Tahun 2023 sebesar 9.593 Ton (76,68%) dari target Produksi budidaya sebesar 12,35 ton, namun target realisasi capaian Target Perubahan RPJMD tahun 2029-2024 sebesar 83,40% . Dimana produksi ikan budidaya tahun 2023 mengalami penurunan produksi sebesar 6,62 % dari target yang ditetapkan yang berpengaruh pada produktivitas hasil budidaya.

2. Pariwisata

Pelayanan Urusan Pariwisata diarahkan untuk pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama Urusan Pariwisata demi mendukung tercapainya sasaran pada Misi Ketiga yaitu: "Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi:

1) Meningkatnya Jumlah Destinasi Wisata di Kab. Ende;
2) Prosentase Promosi / Pemasaran Pariwisata;
3) Meningkatnya Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif;
4) Meningkatnya Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan.

3. Pertanian

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Pilihan Pertanian** mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Ketiga, yaitu : **"Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan"** yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi:

1) **Meningkatnya Produktivitas Padi dan Bahan Utama Pangan Lainnya**

   a. Padi Sawah

   Capaian indikator produktivitas padi sawah adalah sebesar 6.48 ton/ha dari target 7,02 ton per/ha. Tidak tercapainya produktivitas ini dapat disebabkan beberapa faktor yaitu : adanya anomali iklim elnino yaitu memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum yang menyebabkan kemarau panjang sehingga debit air menurun, Minimnya bantuan benih padi unggul (benih label biru) serta pupuk pada tingkat petani sawah, untuk diketahui bantuan benih hanya bersumber dari APBN untuk 760 hektar dari total luas tanam seluas 6.100,22 hektar, sekitrar 5.340,22 hektar petani tidak menggunakan benih label unggul, yang digunakan adalah benih yang disiapkan oleh petani sendiri, Berkurannya luas tanam, tahun 2022 luas tanam seluas 7.871 hektar sedangkan tahun 2023 seluas 6.100,22 hektar ada selisi 1.770,78 hektar yang tidak dilakukan penanaman. Sebagian besar bantuan Sarana dan Prasarana budidaya komiditi tanaman padi bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2023.

   b. Padi Ladang

   Capaian indikator kinerja produktivitas padi ladang adalah 3,01 ton/ha dari target 3,02 ton/ha. Jika dibandingkan dengan produktivitas padi ladang pada tahun 2022 yaitu sebesar 3,01 ton/ha maka tidak terjadi peningkatan produktivitas. Tidak terjadi peningkatan target tapi produktivitas disebabkan beberapa faktor yaitu : adanya anomali iklim elnino yaitu memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum yang menyebabkan kemarau panjang / curah hujan sedikit. Tidak adanya bantuan benih padi unggul (benih label biru) serta pupuk pada tingkat petani, dari total luas tanam seluas 2.235,70 hektar petani tidak menggunakan benih label unggul, yang digunakan adalah benih yang disiapkan oleh petani sendiri atau benih lokal. Akibat dari anomali iklim (elnino) sehingga Berkurannya luas tanam,

tahun 2022 luas tanam seluas 2.810 hektar sedangkan tahun 2023 seluas 2.235,70 hektar.

c. Jangung

Capaian indikator produktivitas jagung adalah sebesar 3,89 ton/ha dari target 4,03 ton/ha atau,Jika dibandingkan dengan produktivitas jagung pada tahun 2022 yang sebesar 4,01 ton/ha, maka terjadi penurunan produktivitas sebesar 0,12 ton/ha.Adanya Penurunan produktifitas dibandingkan dengan tahun lalu dikarena adanya anomali iklim elnino yaitu memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum yang menyebabkan kemarau panjang / curah hujan sedikit pada musim tanam Oktober – Maret, Minimnya bantuan benih jagung unggul (benih label biru) serta pupuk pada tingkat petani, untuk diketahui bantuan benih bersumber dari APBN untuk 500 hektar dan APBD ii Seluas 20 Hektar. dari total luas tanam seluas 4.825 hektar, sekitrar 4.305 hektar petani tidak menggunakan benih label unggul, yang digunakan adalah benih yang disiapkan oleh petani sendiri, Berkurannya luas tanam, tahun 2022 luas tanam seluas 4.825 hektar sedangkan tahun 2023 seluas 2.881,8 hektar. ada selisi 1.943,2 hektar.

d. Ubi Kayu

Capaian indikatorproduktivitas ubi kayu sebesar 25.47 ton/ha dari target 26.00 ton/ha atau tidak mencapai target dengan selisi sebesar 0.53 ton/ha. Adanya penurunan target kinerja produktivitas tersebut disebabkan oleh: adanya anomali iklim elnino yaitu memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum yang menyebabkan kemarau panjang / curah hujan sedikit pada musim tanam Oktober – Maret, Minimnya bantuan bibit ubi yang unggul, bibit ubi kayu selama ini yang diusahakan oleh petani adalah bibit lokal yang dihasilkan secara turun temurun karena tidak ada intervensi anggaran untuk pemulihan bibit tanaman ubi kayu di kabupaten Ende. Dominan ubi kayu yaitu ubi kayu nuabosi yang didominasi ubi terigu sebagai ubi unggul sedangkan ada juga ubi kayu tana ai dan thoko Reko yang tersebar dikawasan Nuabosi. Untuk luas tanam ubi kayu di Kecamatan Ende seluas 128 hektar.

e. Ubi Jalar

Capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 8,91 ton/ha dari target 10,40 ton/ha. Jika dibandingkan dengan produktivitas ubi jalar pada tahun 2022 sebesar 10,00 ton/ha, maka produktivitas mengalami penurunan di tahun 2023. Tidak tercapai target ini disebapkan hampir sama dengan komoditi ubi kayu. Luas tanama terbesar ada di Kecamatan Kelimutu yaitu seluas 27 hektar.

f. Kacang Kedelai

Capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 1.50 ton/ha dari target 1,70 ton/ha. Jika dibandingkan dengan produktivitas kacang kedelai pada tahun 2021 sebesar 1,70 ton/ha. minimnya produksi pada tahun 2022 disebabkan karena selama tahun 2022 jumlah tanam hanya 2 hektar, hal ini disebapkan karena tidak adanya bantuan benih baik yang bersumber dari APBN, APBD I maupun APBD II serta minat petani untuk menanam kedelai masih rendah.

g. Kacang Tanah

Capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 1,39 ton/ ha dari target 1,70 ton/ha. Jika dibandingkan dengan produktivitas kacang tanah pada tahun 2022 sebesar 1,39 ton/ha, maka tidak ada kenaikan atau penurunan produktivitas. Belum Tercapainya target produktivitas kacang tanah sangat dipengaruhi oleh penggunaan dan dukungan sarana produksi. Selama ini untuk komoditi kacang tanah tidak ada intervensi dari Pemerintah, Petani melakukan budidaya kacang tanah secara mandiri dengan di damping oleh PPL.

h. Kacang Hjau

Capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 1,54 ton/ ha dari target 1,70 ton/ha. Jika dibandingkan dengan produktivitas kacang hijau pada tahun 2022 sebesar 1,70 ton/ha, maka terjadi penurunan produktivitas sebesar 0,16 Ton/Ha. Tidak Tercapainya target produksi kacang hijau sangat dipengaruhi oleh kualitas benih dan ketersediaan air, selama ini pertanaman kacang hijau dilakukan secara mandiri oleh petani tanpa adanya intervensi dari Pemerintah.

i. Sorghum

Capaian indikator kinerja sorghum adalah sebesar 0,54 ton/ ha dari target 2.10 ton/ha, Jika dibandingkan dengan produktivitas sorghum pada tahun 2022 sebesar 1.98 ton/ha maka ada Penurunan produktivitas sebesar 1,44 ton/ha. Tidak Tercapainya target produksi sorghum sangat dipengaruhi pada saat proses budidaya sorgum terutama pemilihan varietas dan proses panen dimana mininmya alat prosesing yang ada ditingkat petani sehingga kehilangan bulir sorgum cukup tinggi pada saat panen, hal ini dilihat dari menurunya produtifitas sorgum, serta factor iklim yang tidak menentu dan penggunaan bibit lokal. 2 kecamatan tebesar yang masih membudidaya sorgum yaitu Kecamatan Lepembusu Kelisoke dan kotabaru seluas 35 Hektar.

2) **Meningkatnya Produksi Tanaman Holtikultura**

a. Cabe Rawit

Capaian indikator komoditi cabe rawit yaitu produktivitas sebesar 1,40 ton/ha dari target peningkatan produktivitas per tahun sebesar 1,39 ton/ha atau meningkat 0.01%.

b. Cabe Besar

Capaian indikator komoditi Cabe Besar tahun 2023 yaitu produktivitas sebesar 1,73 ton/ha dari target produktivitas tahun 2023 sebesar 1,59 ton/ha, meningkat 0.14% dari target yang ditetapkan.

c. Bawang Merah

Capaian indikator Komoditi Bawang Merah yaitu produktivitas sebesar 2,66 ton/ha dari target tahun 2023 sebesar 2,45 ton/ha atau meningkat 0,21 ton/ha dari target yang ditetapkan

d. Bawang Putih

Capaian indikator Komoditi Bawang Putih yaitu produktivitas sebesar 2,60 ton/ha dari target peningkatan produksi per tahun sebesar 2,29 ton/haatau meningkat 0,31 ton/ha dari target yang ditetapkan.

e. Wortel

Capaian indikator komoditi Wortel yaitu produktivitas sebesar 0,92 ton/ha dari target ini dapat disebabkan beberapa faktor seperti adanya pendampingan rutin dari PPL dilapangan untuk budidaya wortel ditingkat kelompok tani/ petani.

f. Kentang

Capaian indikator komoditi Kentang produktivitas sebesar 9,74 ton/ha dari target tahun 2023 sebesar 8,92 ton/ha atau meningkat 0,82 ton/ha.

g. Kubis/Kol

Capaian indikator komoditi Kubis/Kol tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 1,65 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 1,49 ton/haatau meningkat 0,16 ton/ha.

h. Petsai/Sawi

Capaian indikator komoditi Petsai/Sawi tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 1,83 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 1,70 ton/ha atau meningkat 0,13 ton/ha dari target yang tetapkan.

i. Tomat

Capaian indikator komoditi Tomat tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 2,58 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 2,55 ton/ha, atau meningkat 0,03 ton/ha dari target yang tetapkan.

j. Pisang

Capaian indikator komoditi Pisangtahun 2023 berupa produktivitas sebesar 8,56 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 8,55 ton/ha,atau meningkat 0,01 ton/ha dari target yang tetapkan.

k. Mangga

Capaian indikator komoditi Manggatahun 2023 berupa produktivitas sebesar 6,99 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 6,99 ton/ha.

l. Pepaya

Capaian indikator komoditi pepaya tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 9,83 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 8,75 ton/ha.atau menurun 1,08 ton/ha.

m. Jahe

Capaian indikator komoditi Biofarmaka dalam hal ini jahe tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 13,51 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 12,75 ton/haatau menurun 0,76 ton/ha dari target yang tetapkan.

n. Kunyit

Capaian indikator komoditi Biofarmaka dalam hal ini kunyit tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 7,70 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 7,70 ton/ha.

o. Kencur

Capaian indikator komoditi Biofarmaka dalam hal ini kencur tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 8,15 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 8,15.

3) **Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan (7 komoditi unggulan daerah)**

a. Kelapa

Capaian indikator produksi komoditi Kelapa tahun 2023 sebesar 1,04 % dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 1.20% atau kurang 0,16% dari target yang tetapkan.

b. Kakao

Capaian indikator produksi komoditi kakao tahun 2023 sebesar 0,83% dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 1,78% atau kurang 0,95% dari target yang tetapkan.

c. Jambu Mente

Capaian indikator produksi komoditi Jambu Mete tahun 2023 sebesar 0,26 % dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 0,80%, atau kurang 0,54% dari target yang tetapkan.

d. Kopi

Capaian indikator produksi komoditi Kopi tahun 2023 sebesar -0,98% dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 0,90% atau kurang 1,88% dari target yang tetapkan.

e. Kemiri

Capaian indikator produksi komoditi Kemiri tahun 2023 sebesar 0,04% dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 1,85% atau kurang 1,81% dari target yang tetapkan.

f. Cengkeh

Capaian indikator produksi komoditi Cengkeh tahun 2023 sebesar 0,39% dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 1,30% atau kurang 0,91% dari target yang tetapkan. Produksi Cengkeh pada tahun 2023 sebesar 448,59 ton dan tahun 2022 sebesar 449,85 ton, maka terjadi penurunan produksi sebesar 1,26 ton.

g. Pala

Capaian indikator produksi komoditi Cengkeh tahun 2023 sebesar -0,02% dari target RPJMD tahun 2022 sebesar 0,60%.atau menurun sebesar 0,62% dari target yang ditetapkan. Produksi pala pada tahun 2023 sebesar 259,30 ton dan tahun 2021 sebesar 262,55 ton, maka terjadi penurunan produksi sebesar 3,25 ton.

4) **Meningkatnya Produksi Hasil Ternak**

a. **Sapi**

Capaian indikator produksi daging sapi tahun 2023 sebesar 2,01% dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 2,50%. atau menurun sebesar 0,49 % dari target yang tetapkan

b. **Kerbau**

Capaian indikator kinerja produksi daging untuk ternak kambing sebesar 0,40 % dari target sebesar 1%. Menurun sebesar 0,60% dengan produksi daging sebanyak 44.961 Kg menurun jika dibandingka dengan produksi tahun 2022 sebanyak 45.322 kg atau menurun 361 Kg.

c. **Babi**

Capaian indikator kinerja produksi daging ternak babi sebesar 2,09 % lebih tinggi dari target RPJMD sebesar 2.00%, ada peningkatan dari target yang ditetapkan hal ini disebapkan tingkat konsumsi daging cukup tinggi di tingkat konsumen. Untuk diketahui pada tahun 2023 tingkat konsumsi daging mencapai 693.486 kg. populasi ternak babi di kabupaten Ende sebanyak 73.665 ekor yang tersebar di 21 kecamatan, dengan pupulasi tertinggi ada di Kecamatan Detusoko dengan populasi ternak babi sebanyak 5.112 ekor.

d. **Kambing**

Capaian indikator kinerja produksi daging untuk ternak kambing sebesar 0,40 % dari target sebesar 1%. Menurun sebesar 0,60% dengan produksi daging sebanyak 44.961 Kg menurun jika dibandingka dengan produksi tahun 2022 sebanyak 45.322 kg atau menurun 361 Kg.

e. **Ayam**

Capaian indikator kinerja produksi daging untuk ternak ayam sebesar 3,16 % lebih rendah dari target yaitu 3%, atau meningkat 0,16% dengan produksi daging sebanyak 220.602 Kg, adanya peningkatan ini dikarenakan tingginya tingkat konsumsi daging ayam ditingkat konsumen/masyarakat.

f. **Telur**

Capaian indikator kinerja untuk produksi telur adalah 2,79 % , capaian ini melebihi mencapai target RPJMD Tahun 2023 sebesar 2,75% dengan produksi telur pada tahun 2023 sebanyak 277.664 Kg Peningkatan capaian indikator ini disebapkan beberapa hal antara lain tinggi konsumsi telur serta Adanya peningkatan populasi ternak ayam petelur di tingkat pengusaha ternak ayam di Kab. Ende.

b. Perdagangan dan Perindustrian

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Perdagangan** mendukung tercapainya sasaran- sasaran Misi Ketiga yaitu: "Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1) Jumlah Rekomendasi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan
2) Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Memenuhi Persyaratan
3) Tersedianya Dokumen Pembinaan Pengelolaan Distribusi Perdagangan
4) Jumlah Laporan Stabilisasi Harga Barang dan Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
5) Persentase Kegiatan Promosi Dagang Ekspor Yang difasilitasi
6) Terlaksananya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Perindustrian** mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Ketiga yaitu : "Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan ", sebagai berikut:

1) Jumlah dokumen perencanaan dan pembangunan industrl
2) Jumlah Dokumen Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
3) Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi

c. Transmigrasi

Indikator Capaian kinerja Program dan kegiatan urusan Transmigrasi adalah:

1) **Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)**
   Pada tahun 2023 ada 1 Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi yang disiapkan dengan untuk menjadi pedoman penyusunan Satuan Pemukiman Baru.
2) **Jumlah Kawvasan Transmigrasi Yang Dibangun/kembangkan**
   Pada tahun 2023 Jumlah Kawasan transmigrasi yang dibangun/kembangkan ada 1 Lokasi di kembangkan lagi di Tugasoki. Lokasi tersebut dilakukan pendekatan untuk persiapan pemukiman baru.
3) **Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang dikembangkan**
   Pada tahun 2023 ada 10 Kepala Keluarga di lokasi Kawasan transmigrasi aimuri di berikan pembinaan untuk meningkatkan usaha sesuai hasil pelatihan di tahun 2020 untuk mengembangkan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat transmigrasi lokal.

2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Capaian indikator-indikator kinerja utama Urusan Perencanaan, untuk mendukung tercapainya sasaran- sasaran Misi Kelima yaitu : "Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi:

1) **Indeks capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
   Tahun 2023 target Indeks capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah 100 % realisasi capaiannya sebesar 96,71%. Pencapaian indikator ini menggambarkan capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dari beberapa kegiatan yang mendukung yakni Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

2) **Tersedianya data dan informasi kajian litbang yang dapat digunakan dalam perumusan rencana pembangunan**
Pencapaian indikator ini menggambarkan ketersediaan data dan informasi kajian litbang yang dapat digunakan dalam perumusan rencana pembangunan yaitu tidak dilakukannya penelitian karena keterbatasan anggaran sehingga capaiannya 0%.

3) **Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**
Tahun 2023 target Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah 100 % realisasi capaiannya sebesar 96,69%. Pencapaian indikator ini menggambarkan capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dari beberapa kegiatan yang mendukung yakni Koordinasi Perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

2) Urusan Administrasi Pemerintahan, Keuangan, Pengawasan, Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan

Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum secara umum, meliputi: Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Pengawasan, dan Kepegawaian. Gambaran capaian kinerja pelayanan pemerintahan umum disajikan sebagai berikut:

1. **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

   1) **Persentase Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan**

   Target Persentase Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan pada tahun 2023 sebesar 75%. Jumlah Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan pada Tahun 2023 sebanyak 4 sub kegiatan dibagi dengan Jumlah Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan yang seharusnya dilaksanakan pada Tahun 2023 sebanyak 8 sub kegiatan, sehingga capaian indikatornya sebanyak 50%. Adapun alasan mendasar sehingga tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ende pada Tahun Anggaran 2023.

   2) **Persentase Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dan DPRD**

   Target Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dan DPRD pada tahun 2023 sebesar 100%. Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang Dibahas dan Disetujui Bersama Tahun 2023 sebanyak 6 dokumen dibagi dengan Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang seharusnya Dibahas dan Disetujui sebanyak 6 dokumen, sehingga capaian indikatornya sebanyak 100% sesuai target.

   3) **Persentase ranperda dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) yang dibahas**
   Pada Tahun 2023 Target Persentase Ranperda dalam propemperda yang dibahas sebesar 60%. Jumlah Ranperda dalam Propemperda yang Dibahas pada Tahun 2023 sebanyak 7 perda dibagi dengan Jumlah Raperda dalam Propemperda yang seharusnya Dibahas pada Tahun 2023 sebanyak 16 perda, sehingga capaian indikatornya 43,75%.

2. **Sekretariat Daerah (Setda)**
Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Fungsi Penunjang** untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Kelima yaitu : Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

   1) **Penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu**
   Indikator ini diukur berdasarkan penyerahan LPPD Pemerintah Kabupaten Ende yang dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada tahun 2023 LPPD Pemerintah Kabupaten Ende telah dikirimkan pada bulan Maret 2023 sehingga capaian kinerja atas indikator ini memenuhi target yang ditetapkan.

   2) **Persentase kerjasama yang aktif**
   Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah perjanjian kerja sama yang diselenggarakan dengan jumlah perjanjian kerja sama yang direncanakan. Pada tahun 2023 jumlah perjanjian kerja sama yang diselenggarakan sebanyak 13 PKS sedangkan jumlah perjanjian kerja sama yang direncanakan sebanyak 20 PKS dengan target sebesar

100%. Sehingga realisasi atas indikator ini diperoleh sebesar 65% dengan capaian kinerja sebesar 65%.

3) **Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat**
Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah dokumen dan laporan koordinasi bidang fasilitasi bina mental, kesejahteraan sosial dan masyarakat yang dihasilkan dengan jumlah dokumen dan laporan koordinasi bidang fasilitasi bina mental, kesejahteraan sosial dan masyarakat yang direncanakan. Pada tahun 2023 jumlah dokumen dan laporan koordinasi bidang fasilitasi bina mental, kesejahteraan sosial dan masyarakat yang dihasilkan sebanyak 91 dokumen sedangkan jumlah dokumen dan laporan koordinasi bidang fasilitasi bina mental, kesejahteraan sosial dan masyarakat yang direncanakan sebanyak 91 dokumen dengan target sebesar 100%. Indikator ini mencapai target dengan kata lain, terealisasi secara keseluruhan sebesar 100% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%.

4) **Persentase ranperda yang diundangkan menjadi peraturan daerah**
Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang direncanakan. Pada tahun 2023 jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan sebanyak 5 Perda sedangkan jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang direncanakan sebanyak 7 Ranperda dengan target sebesar 100%. Sehingga realisasi atas indikator ini diperoleh sebesar 71,43% dengan capaian kinerja sebesar 71,43%. Capaian atas indikator ini belum memenuhi target yang ditetapkan. Salah satu faktor penghambat adalah dukungan dari Perangkat Daerah penginisiasi dan koordinasi yang belum optimal dengan instansi terkait baik instansi vertikal (pusat) maupun dengan Perangkat Daerah lainnya.

5) **Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan**
Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik pembangunan yang dihasilkan dengan jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik pembangunan yang direncanakan. Pada tahun 2023 jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik pembangunan yang dihasilkan sebanyak 24 laporan sedangkan jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik pembangunan yang direncanakan juga sebanyak 24 laporan dengan target sebesar 100%. Sehingga realisasi atas indikator ini diperoleh sebesar 100% dengan capaian kinerja yang memenuhi target sebesar 100%.

6) **Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian**
Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi dan monitoring BUMD, BLUD, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang dihasilkan dengan jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi dan monitoring BUMD, BLUD, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang direncanakan. Pada tahun 2023 jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi dan monitoring BUMD, BLUD, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang dihasilkan sebanyak 16 dokumen sedangkan jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi dan monitoring BUMD, BLUD, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang direncanakan juga sebanyak 16 dokumen dengan target sebesar 100%. Sehingga realisasi atas indikator ini diperoleh sebesar 100% dengan capaian kinerja yang memenuhi target sebesar 100%.

7) **Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang SDA**
Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan bidang SDA yang dihasilkan dengan jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan bidang SDA yang direncanakan. Pada tahun 2022 jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan bidang SDA yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen sedangkan jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan bidang SDA yang direncanakan juga sebanyak 1 dokumen dengan target sebesar 100%. Sehingga realisasi atas indikator ini diperoleh sebesar 100% dengan capaian kinerja yang memenuhi target sebesar 100%.

8) **persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik**
Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah OPD yang menginput dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam aplikasi SPSE dengan jumlah OPD yang wajib menginput dan mengumumkan RUP dalam aplikasi SPSE. Pada tahun

2023 berdasarkan data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende jumlah OPD yang menginput dan mengumumkan RUP dalam aplikasi SPSE sejumlah 52 OPD dari target sejumlah 54 OPD. Sehingga realisasi kinerja atas indikator ini sebesar 96,30% dengan besaran capaian kinerja sebesar 96,30%.

9) **Indeks Tata Kelola Pengadaan**
Nilai berupa bobot pada indikator ini diperoleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian oleh LKPP besaran Indeks Tata Kelola Pengadaan untuk Pemerintah Kabupaten Ende sebesar 32,44 dengan kategori "Kurang". Capaian indikator ini belum memenuhi target yang ditetapkan. Rendahnya hasil penilaian oleh LKPP dikarenakan rendahnya nilai e-purchasing (katalog elektronik) dan ketersediaan SDM UKPBJ (Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa) yang masih jauh dari target yang ditentukan oleh LKPP-RI.

10) **Presentase Capaian Kinerja bidang Administrasi Umum serta layanan dinas kepada pimpinan (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda)**
Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah capaian realisasi kegiatan administrasi umum dan pelayanan kedinasan KDH, WKDH, dan Sekda yang dilaksanakan dengan jumlah kegiatan administrasi umum dan pelayanan kedinasan KDH, WKDH, dan Sekda yang direncanakan. Pada tahun 2023 jumlah capaian realisasi kegiatan administrasi umum dan pelayanan kedinasan KDH, WKDH, dan Sekda yang dilaksanakan sebanyak 22 kegiatan dengan jumlah kegiatan administrasi umum dan pelayanan kedinasan KDH, WKDH, dan Sekda yang direncanakan sebanyak 22 kegiatan dengan target sebesar 100%. Sehingga realisasi atas indikator ini diperoleh sebesar 100% dengan capaian kinerja yang memenuhi target sebesar 100%.

3. Inspektorat

1) Presentase Tindaklanjut terhadap Rekomendasi Temuan BPK

Pada Tahun 2023 Jumlah Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti sebanyak 593 temuan dari Jumlah Rekomendasi BPK sebanyak 957 temuan sehingga capaian indikatornya sebesar 61,96% sudah mencapai target dari RPJMD Perubahan sebesar 36,76%.

2) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan APIP

Pada Tahun 2023 Jumlah Rekomendasi APIP Yang Ditindaklanjuti sebanyak 1689 rekomendasi dari Jumlah Rekomendasi APIP sebanyak 2874 rekomendasi sehingga capaian indikator ini sebesar 58,77% belum mencapai target dari RPJMD Perubahan sebesar 100%.

Tabel 2.30. Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja di tahun 2021			
			Target	Realisasi		
				Formula	Angka	%
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efektif dsn Efisien	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK	Persen	100%	Jumlah Rekomendasi BPK Yang Ditindaklanjuti / Jumlah Rekomendasi BPK	593/957x 100%	61,96%
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan APIP	Persen	100%	Jumlah Rekomendasi APIP Yang Ditindaklanjuti / Jumlah Rekomendasi APIP	1689/287 4x100%	58,77%

4. Badan Pendapatan Daerah

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Fungsi Keuangan** mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi ketiga, yaitu : "Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi:

1) **Persentase Pendapatan dari Retribusi dan Pajak Daerah terhadap PAD**
Target Presentase Pendapatan dari Retribusi dan Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2023 dengan Target Kinerja 32 % dengan Realisasi 25,37 % dimana Capaian Kinerja diperoleh dari Perbandingan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Target Kinerja sehingga

Capaian Kinerja pada Tahun 2032 dengan nilai 79,28 % Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende secara makro pada tahun 2023 menetapkan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 84.672.842.400 dengan relaisasi Rp. 77.432.038.029,33 atau 91,45 %. Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah diperoleh dari Presentase Pendapatan Dari Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD, dimana Tahun 2023 Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 17.458.041.828,86 dengan Target sebesar Rp. 34.158.224.500 dan Realisasi Retribusi Daerah Rp. 4.023.416.163 dengan Target sebesar Rp. 6.515.400.000. Capaian Kinerja diperoleh dari akumulasi realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 21.481.457.991,86. dibandingkan dengan Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 84.672.842.400 maka capaian kinerja adalah 25,37 %.

5. **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Fungsi Keuangan** mendukung tercapainya sasaran-sasaran kinerja Misi kelima, yaitu : "Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1) **Terwujudnya Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penetapan APBD**
   Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja penyusunan dan penetapan APBD di lakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2) **Meningkatnya Opini BPK**
   Capaian indikator meningkatnya opini BPK pada tahun 2023 target dan capaian realisasinya yaitu WTP, sedangkan untuk tahun 2023 targetnya WTP dan capaian realisasinya tidak ada karena belum di audit oleh BPK.
3) **Terwujudnya Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah**
   Pada tahun 2023 capaian indikator penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah tepat waktu karena penyampaian dokumen RKBMD pengadaan disampaikan ke pengguna barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni dan di tahun 2023 dokumen RKBMD dari SKPD dilaporkan pada minggu kedua bulan Juni.

6. **Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Fungsi Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia** mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Kelima yaitu :"Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1) **Persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi**
   Tahun 2023 target untuk indikator ini sebesar 9,3%. Jumlah ASN yang mengikuti diklat sebanyak 474 dari Total ASN sebanyak 6.150 sehingga realisasinya sebesar 7,71%, dan capaiannya 82,87%. Indikator ini belum sampai pada target yang diharapkan karena pada tahun 2023 jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya melalui tugas belajar, ijin belajar, pelatihan dasar, diklat teknis fungsional dan uji kompetensi tidak banyak jumlahnya.
2) **Persentase Pelayanan Kepegawaian**
   Target indikator Persentase Pelayanan kepegawaian tahun 2023 sebesar 80,2%. Jumlah pelayanan kepegawaian kepada ASN sebanyak 6.150 dari total ASN pada akhir tahun 2023 sebanyak 6.150. Sehingga realisasinya sebesar 100%, dan capaiannya 124,69%. Pada tahun 2023 selain pelayanan kepegawaian rutin, juga ada kegiatan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi data ASN yang menyebabkan seluruh ASN terlayani terkait pemutakhiran data. Hal ini menyebabkan persentase pelayanan kepegawaian sebesar 100%.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Tingkat Komsumsi Rumah Tangga

Persentase pengeluaran makanan dari suatu rumah tangga terhadap pengeluaran total mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga. Semakin tinggi persentasenya maka semakin rendah tingkat kesejahteraan atau semakin miskin rumah tangga tersebut. Data rata-rata pengeluaran untuk konsumsi penduduk Kabupaten Ende selama periode Tahun 2017-

2023 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran kelompok makanan cenderung menurun dari 62,39% pada Tahun 2017 menjadi 53,89% pada Tahun 2023. Sebaliknya, rata-rata pengeluaran untuk kelompok bukan makanan cenderung meningkat dari 37,61% menjadi 46,11% dalam periode tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan rumah tangga atau penduduk di Kabupaten Ende semakin meningkat.

Tabel 2.31. Rata-rata Pengeluaran Perkapita per bulan (Rp) di Kabupaten Ende Tahun 2009-2023

Tahun	Makanan	Bukan Makanan	Seluruh Pengeluaran
2009	188.771 (61,35%)	118.938 (38,65%)	307.709
2010	212.714 (61,33%)	134.139 (38,67%)	346.853
2011	231.248 (59,99%)	154.223 (40,01 %)	385.471
2012	295.873 (56,94 %)	223.715 (43,06 %)	519.588
2013	216.823 (57,91 %)	216.823 (42,09 %)	515.147
2014	327.976 (56,99 %)	247.544 (43,01 %)	575.520
2015	338.518 (57,67 %)	248.472 (42,33%)	586.990
2016	352.019 (56,63 %)	269.533 (43,36%)	621.533
2017	436.895 (62,39 %)	263.331 (37,61 %)	700.226
2018	429.670 (59.44%)	293.210 (40.56%)	722.880
2019	423.685 (58,84%)	296.403 (41.16%)	720.088
2020	468,612 (54,28%)	394,683 (45,72%)	863,295
2021	501,016 (55,53%)	401,293 (44,47%)	902,309
2022	560,519 (55,58%)	447,930 (44,42%)	1.008,449
2023	604.521 (53,89%)	517.312 (46,11%)	1.121.834

Sumber: Susenas 2009-2023 PDRB

a. **Potensi Ekonomi Kabupaten Ende**

Menggunakan empat metode analisis yakni Analisis *Location Qoutient (LQ)*, Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Analisis *Shift Share*, dan Analisis Tipologi Klassen. Hasilnya akan disandingkan antara keempat metode analisis tersebut untuk menunjukan lapangan usaha apa saja yang menjadi keunggulan maupun potensial di Kabupaten Ende.

- **Analisis LQ**

Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif (*comparative advantage*) suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah referensi.Dalam analisis ini wilayah referensi yang digunakan adalah Provinsi Nusa tenggara Timur (NTT). Analisis LQ dilakukan terhadap dua variabel, yaitu analisis terhadap jumlah usaha dan analisis terhadap jumlah tenaga kerja. *Berdasarkan jumlah usaha* diperoleh beberapa kategori lapangan usaha potensial yang dapat dilakukan di Kabupaten Ende diantaranya: Pertambangan dan Penggalian (B); Industri Pengolahan (C); Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin (D); dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I). Sedangkan *berdasarkan analisis LQ terhadap jumlah tenaga kerja* dihasilkan kategori lapangan usaha potensial antara lain: kategori Pertambangan dan Penggalian (B); Industri Pengolahan (C); Pengangkutan dan Pergudangan (H); dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I).

- **Analisis Model Ratio Pertumbuhan**

Tujuan analisis MRP adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB (competitive advantage). Hasil analisis Listing SE2016 yang dilaksanakan BPS menunjukan bahwa terdapat beberapa sektor yang berpotensi untuk Kabupaten Ende dan NTT yaitu Pengadaan Listrik dan Gas (D); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (G); Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (I); dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Sementara sektor yang berpotensi untuk dikembangkan dalam level Kabupaten Ende namun tidak dalam konteks NTT antara lain: Industri Pengolahan (C); Pengangkutan dan Pergudangan (H); Jasa Perusahaan (M,N) dan Pendidikan (P).

- **Analisis Shift Share**

Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* tersebut dapat disimpulkan bahwa kategori lapangan

usaha yang potensial adalah Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (I) yang memiliki pertumbuhan pesat dan memiliki daya saing yang tinggi di Kabupaten Ende bila disandingkan dengan wilayah referensi Provinsi NTT. Selain itu, terdapat beberapa kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan yang pesat namun di lain sisi tidak berdaya saing atau sebaliknya memiliki daya saing namun tidak cukup cepat dalam pertumbuhannya dan bahkan terdapat kategori lapangan usaha yang tidak memenuhi kedua kriteria tersebut.

Tabel 2.32. Hasil Analis *Shift Share (SS)* Kabupaten Ende dengan Wilayah Referensi Provinsi NTT (2016)

Kategori	Regional Share (RS)	Proporsional Shift (PS)	Differential Shift (DS)	Shift Share(SS)	Kesimpulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	1368,645	(112,711)	(166,721)	789,210	Hanya kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (I) yang potensial (nilai PS dan DS sama-sama bernilai positif)
C	1313,439	(27120.4)	132,478	1174713	
D	54781	77,846	(49,913)	82,714	
E	81,373	(21,622)	(29,489)	30,262	
F	9905,710	244,453	(2,717,538)	7832,625	
G	14745224	619,712	(1,3[illegible],74)	14048,762	
H	5760,562	(287,761)	502,906	5,765,708	
I	268.219	9,190	1,547	278,956	
J	4,894,379	724,300	(2,196,290)	3320389	
K	3,382,057	1,929,645	(2,194,018)	3117,665	
L	2,741837	(771,288)	189,492	2210.040	
M,N	384283	(43,455)	697	341,525	
P	8491685	(865,028)	177386 7	8,900,524	
Q	1,67[illegible]64	(736,980)	(340,921)	1,093,763	
R,S,U	2256,912	(1,019,353)	451,735	1689,321	

Sumber : BPS, Hasil Olah PDRB menurut Lapangan Usaha 2016

- **Analisis Tipologi Klasen**

Analisis Tipologi Klassen mendasarkan pengelompokkan suatu kategori/sektor, subsektor, usaha atau komoditi daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah referensi yang menjadi acuan dan membandingkan kontribusi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi suatu daerah dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih tinggi (daerah acuan atau nasional). Adapun hasil potensi ekonomi Kabupaten Ende berdasarkan Analisis Tipologi Klasen diuraikan sebagai berikut:

1. *Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (kuadran I)* meliputi Industri Pengolahan (C), Pengangkutan dan Pergudangan (H), Real Estate (L), Jasa Perusahaan (M;N), dan Pendidikan (P).
2. *Sektor Maju tapi tertekan (kuadran II)* meliputi Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah; Limbah dan Daur Ulang (E), dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (G).
3. *Sektor Potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (kuadran II)*, meliputi kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (I) dan kategori Jasa Lainnya (R,S,U).
4. *Sektoryang relatif tertinggal (kuadran IV)* meliputi sektor B, D, F, J,K dan Q.

- **Hasil Overlay**

Pada tahap akhir analisis potensi kategori lapangan usaha dilakukan analisis *Overlay* yang merupakan rangkuman empat alat analisis yang sebelumnya telah diterapkan.Penyandingan ini ditujukan agar pemilihan kategori lapangan usaha yang unggulan maupun potensial menjadi lebih akurat karena mempertimbangkan tidak hanya dari satu namun beberapa kriteria analisis. Berdasarkan hasil *Overlay* yang dilakukan, menunjukkan Kabupaten Ende memiliki 2 (dua) kategori lapangan usaha yang bersifat unggulan, yakni **kategori lapangan usaha Industri Pengolahan (C) dan kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (I).**

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. **Sarana Transportasi**

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Guna mendukung transportasi darat, di kabupaten Ende telah dibangun jalan sepanjang 1.453,9 km yang terdiri dari jalan Negara sepanjang dan 130,30 km, jalan provinsi 160,30 km, jalan kabupaten 824,60 km dan jalan poros desa sepanjang 338,70 km.

Tabel 2.33 Kondisi Jalan dan Alat Transportasi di Kabupaten Ende

Uraian	2020	2021	2022
Kondisi Jalan (km)			
Baik	291,33	328,31	342,80
Sedang	5,90	82,95	62,50
Rusak	21,72	41,01	38,07
Rusak Berat	496,05	362,73	371,63
Kendaraan (Unit)			
Mobil Penumpang	11.189	11.325	11.485
Mobil Barang	3.120	3.270	3.451
Mobil Bus	203	207	212
Kendaraan Khusus	52	52	53
Sepeda Motor	54.955	56.411	58.590

Sumber: Ende Dalam Angka 2021-2023

Bila dilihat dari sisi alat angkutan, angkutan darat masih didominasi oleh sepeda motor dengan jumlah pada Tahun 2021 sebanyak 56.411 sepeda motor yang terus mengalami peningkatan selama kurun waktu tiga tahun terakhir.

b. **Sarana Telekomunikasi**

Data Susenas menunjukkan peningkatan penggunaan alat komunikasi tertinggi pada telepon seluler sejalan dengan penggunaan telepon rumah yang semakin berkurang. Masyarakat saat ini lebih memilih menggunakan telepon seluler dari sisi kepraktisan, dapat dibawa ke mana-mana dan lebih bersifat pribadi. Selain itu, telepon seluler memiliki beragam fungsi dan dapat melakukan berbagai tugas (multitasking) seperti untuk mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, gambar atau foto, video atau film, GPS, serta dilengkapi berbagai fitur lain yang menarik.

Pada tahun 2021, sebanyak 81,24 persen penduduk di Kabupaten Ende menggunakan telepon seluler sedangkan sisanya tidak menggunakan. Namun dari angka tersebut, hanya terdapat sebanyak 46,31 persen dari total pengguna telepon seluler yang menggunakan telepon seluler milik sendiri. Sisanya yaitu sebanyak 53,69 persen tidak memiliki telepon seluler atau meminjam orang lain untuk sekadar bermain game atau mencari informasi.

Selengkapnya banyaknya penduduk di Kabupaten Ende menurut kepemilikan telepon seluler sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

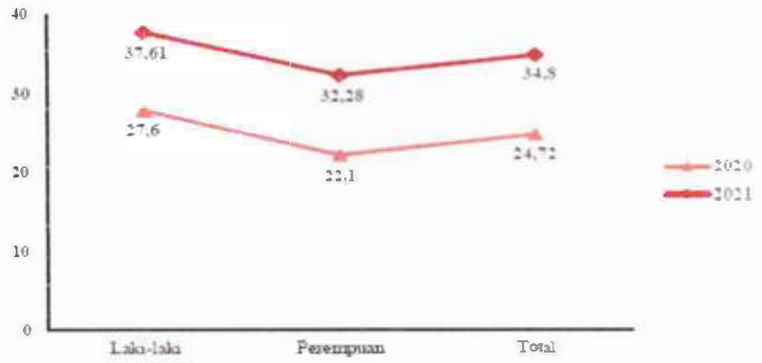
Tabel 2.34 Persentase Penduduk Menurut Penggunaan dan Kepemilikan Telpon Selular Tahun 2021

No	Kepemilikan SaranaKomunikasi	2021
1	Menggunakan Telpon Selular	81,24
2	• Memiliki Telepon Selular	46,31
3	• Tidak Memiliki Telepon Selular	53,69
4	Tidak Menggunakan Telpon Selular	18,76

Sumber data: BPS, Inkesra Kabupaten Ende Tahun 2021 (Susenas 2021)

Persentase penduduk berusia 5 tahun ke atas yang mengakses internet meningkat hingga sepuluh persen, dibandingkan pada tahun 2020 yaitu 24,72 persen. Penduduk berjenis kelamin laki-laki yang mengakses internet pada tahun 2021 sebanyak 37,61 persen sedangkan penduduk perempuan sebanyak 32,28 persen.

Grafik 2. 1Persentase Penduduk Usia 5 Tahun keatas yang Mengakses Internet Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2021



Sumber: BPS, Susenas 2020-2021

c. Perbankan

Perkembangan sektor perbankan di Kabupaten Ende selama periode 2013-2015 mengalami peningkatan jumlah simpanan. Tabungan menyumbang jumlah tertinggi dari total dana bank yang tersimpan pada Tahun 2015 dengan jumlah 371.379,3 miliar rupiah, selanjutnya simpanan berjangka sebanyak 88.776,1 miliar rupiah, mengalami peningkatan dari Tahun 2014. Dana Giro yang disimpan di bank pada Tahun 2015 mencapai 67.033,9 miliar rupiah meningkat dari 49.206,9 miliar rupiah pada Tahun 2014. Sementara itu, posisi tabungan ONH pada tahun 2015 sebanyak 2.774,6 juta rupiah, masih sama dengan Tahun 2014.



Posisi pinjaman yang diberikan beberapa Bank di Kabupaten Ende dalam kurun waktu 2013- 2015 terus meningkat. Pada tahun 2013 posisi pinjaman bank sebanyak 479.686 miliar meningkat menjadi 527,234 miliar rupiah pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 668.652 miliar. Dilihat menurut sektor ekonomi, posisi pinjaman, yaitu: pertanian (0,18%), pertambangan (0.03) industri (0,69%), perdagangan (29,24%), dan lain-lain (69,86%).

d. Jumlah Perusahaan

Jumlah Perusahaan yang teridentifikasi sebanyak 13 perusahaan, yaitu: 1) PT. Alfa Mart yang berlokasi di beberapa wilayah di Kabupaten Ende dengan nilai investasi masing-masing >Rp.500.000.000,-; 2) PT. Krisna Pratama Teknik dengan nilai investasi sebesar ± Rp.4,1 milyar;3) Toko Kembang dengan nilai investasi sebesar ± Rp. 2 milyar; 4) Toko Gloria dengan nilai investasi sebesar ± Rp.4 milyar; 5) PT.Nusa Bunga dengan nilai investasi sebesar ±Rp.1,3 Milyar; 6) PT. Beta Tirta dengan nilai investasi sebesar ± Rp.900 juta; 7) PT. Gempar Cahaya Perkasa dengan nilai investasi sebesar ± Rp. 800 juta; 8) PT. Firma Diva dengan nilai investasi sebesar ± Rp. 2,7 milyar; 9) CV. Rahmat Raya dengan nilai investasi sebesar ± Rp. 550 juta; 10) CV. Armando Jaya dengan nilai investasi sebesar ± Rp.1 milyar; 11) CV.Bintang Utama dengan nilai investasi sebesar ± Rp.2,3 milyar; 12) CV. Tifa Putra Mandiri dengan nilai investasi sebesar ± Rp. 600 juta; dan 13) CV. Leon dengan nilai investasi sebesar ± Rp.1 Milyar.

e. Fasilitas Penginapan (Hotel)

Pada Tahun 2018 terdapat 58 usaha akomodasi di Kabupaten Ende, Sementara jumlah kamar yang tersedia 576 kamar dengan penambahan 111 kamar dari Tahun 2017, dan tempat tidur yang tersedia menjadi 939 tempat tidur yang tahun sebelumnya berjumlah 796 tempat tidur.

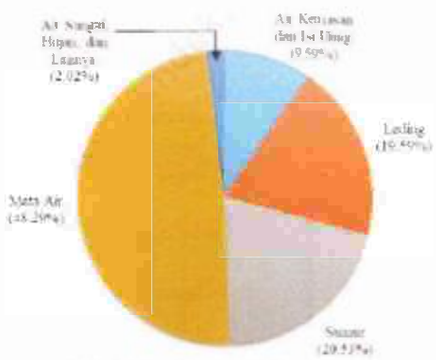
Tabel 2.35 Banyaknya Penginapan, Kamar dan Tempat Tidur di Kabupaten Ende
Tahun 2016-2018

Kecamatan dan Jumlah	Banyaknya Unit Penginapan, Kamar dan Tempat Tidur								
	Tempat Tidur			Kamar			Unit		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Nangapanda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pulau Ende	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maukaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ende	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ende Selatan	110,00	97,00	142,00	58,00	52,00	82,00	5,00	4,00	5,00
Ende Timur	78,00	125,00	183,00	52,00	78,00	114,00	4,00	5,00	7,00
Ende Tengah	393,00	306,00	208,00	224,00	176,00	118,00	7,00	6,00	7,00
Ende Utara	119,00	87,00	114,00	64,00	47,00	69,00	3,00	2,00	4,00
Ndona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ndona Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wolowaru	16,00	10,00	12,00	8,00	5,00	6,00	1,00	1,00	1,00
Wolojita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lio Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kelimutu	174,00	171,00	180,00	116,00	110,00	125,00	22,00	22,00	24,00
Ndori	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maurole	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kotabaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detukeli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepembusu Kelisoke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detusoko	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wewaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	890,00	796,00	939,00	522,00	465,00	574,00	42,00	40,00	48,00

F. Air Bersih

Di antara sekian banyak jenis sumber air, mata air merupakan sumber air yang paling banyak digunakan sebagai air minum oleh rumah tangga di Kabupaten Ende. Pada tahun 2021, rumah tangga yang memenuhi keperluan air minumnya berasal dari sumber mata air sebesar 48,29 persen, diikuti sumber air leding sebesar 20,53 persen. Selain mata air dan sumur, leding juga banyak digunakan di Kabupaten Ende sebesar 19,59 persen; air kemasan dan isi ulang sebesar 9,59 persen dan persentase terkecil adalah air sungai, hujan dan lainnya sebesar 2,02 persen.

Gambar 2. 9 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2021



Sumber data: BPS Ende, Inkesra Kab. Ende Tahun 2019

g. Listrik

Sebagai sumber penerangan dan energi lain baik di sektor rumah tangga maupun industri, listrik memegang peranan yang sangat vital. Produksi listrik di Kabupaten Ende berfluktuasi selama periode Tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada Tahun 2019 jumlah listrik yang dibangkitkan sebesar 6.859 juta KWh, meningkat pada Tahun 2020 menjadi sebesar 79.828 juta kWh, dan kembali menurun pada Tahun 2021 menjadi 66.335 juta KWh.

Tabel 2. 36 Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik di Kabupaten Ende Tahun 2019-2021

Tahun Year	Daya Terpasang Installed Electricity Power (KW)	Produksi Listrik Electricity Production (KWh)	Listrik Terjual Electricity Sold (KWh)	Dipakai Sendiri Own Used (KWh)	Susut/ Hilang Shrinkage/ Lost (KWh)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2019	54 431282	6 858 560	55 959125	...	6387 135
2020	63653010	79828 379	61622814	6 487	3245 424
2021	70789223	66 335 064,51	63 738 490,339	6 906,115	53157 52,004

Catatan / Note: ...
Sumber/Source: PT. PLN (Persero) ULP Ende

Sementara itu bila dilihat dari jumlah pelanggan di Kabupaten Ende, terjadi peningkatan yang signifikan selama Tahun 2017 sampai Tahun 2021, jumlah pelanggan pada PT. PLN ULP Ende pada tahun 2017 tercatat sebanyak 43.075 pelanggan, meningkat menjadi 48.545 pelanggan pada Tahun 2018, dan terus meningkat menjadi 51.403 pelanggan pada Tahun 2019, meningkat lagi menjadi 55.284 pelanggan pada Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 pelanggan listrik di Kabupaten Ende sedikit menurun menjadi sebanyak 54.998 pelanggan.

Tabel 2. 37 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan Subdistrict	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nangapanda	2940	2790	2794	2942	2825
Pulau Ende	1375	1625	1625	1628	1597
Maukaro	2125	1502	1508	1707	1704
Ende, Ende Selatan, Ende Timur, Ende Tengah, Ende Utara	28 125	25624	28355	31220	29621
Ndona		977	986	1063	927
Wolowaru, Wolojita Kelimut u, Detukeli, Ndona Timur	5046	6668	6706	6738	7182
Ndori, Io Timur	985	1010	1018	1022	1005
Maurole	1 110	1295	1316	1374	1598
Kotabaru	-	-	-	-	-
Detu soko, Lepembusu Kelisoke	2838	3532	3541	3549	4496
Wewaria	1830	3 522	3554	4041	4043
Kabupaten Ende	46 375	48645	51 403	55284	54 998

Sumber data: BPS, Kabupaten Ende Dalam Angka 2024

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1) Angka Kriminalitas

Data menunjukan angka kriminal yang terjadi di Kabupaten Ende secara khusus belum mengancam iklim investasi. Kondisi riil menunjukan jenis kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Ende perkara biasa dan pelanggaran. Data BPS dalam Ende Dalam Angka Tahun 2023, menunjukan bahwa pada Tahun 2020 terdapat sebanyak 2.983 kasus, menurun pada tahun 2021 menjadi sebanyak 2.077 kasus, dan menurun drastis pada tahun 2022 menjadi sebanyak 237 kasus.

2) Demonstrasi / Unjuk Rasa

Jumlah demonstrasi/unjuk rasa damai yang terjadi Pada Tahun 2022 terdapat sebanyak 8 (delapan) kasus, yang dapat terdekteksi dini dan difasilitasi penyelesaiannya oleh Badan Kesbangpollinmas Kabupaten Ende.

3) Kemudahan Investasi

Iklim investasi di Kabupaten Ende cukup menjanjikan, Dalam tataran kebijakan pemerintah Kabupaten Ende sangat terbuka dengan investor, Permasalahan klasik terkait status lahan telah menjadi perhatian, dengan menempatkan pemangku kepentingan (pemilik lahan/penguasa ulayat) dalam konsep LIKA MBOKO TELU sebagai kekuatan utama membangun Ende. Pada tataran normatif, pelaksanaan perijinan mulai dibenahi dengan peningkatan kualitas layanan perijinan. Untuk memberikan kemudahan pelayanan perijinan bagi inevestor maupun masyarakat yang membutuhkannya, telah dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, dapat dilihat dari hasil pelayanan perijinan kepada masyarakat yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah pelayanan perijinan yang diperoleh sebesar 100 persen, dimana dari 2.300 permohonan perijinan, semuanya terlayani.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1) Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja sebagai ukuran daya saing daerah ditunjukan dengan kondisi tingkat pendidikan masyarakat. Data menunjukan bahwa sampai dengan tahun 2022, jumlah penduduk usia 15 tahun keatas sebagian besar mempunyai Ijazah tertinggi adalah Sekolah Dasar, yaitu sebesar 45,31%, diikuti yang menamatkan pendidikan SMA/SMK sebesar 27,26%.

Tabel 2.38 Persentase Penduduk Kabupaten Ende 15 tahun ke atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2019-2022

NO	Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	2019	2020	2021	2022
1	Tidak Punya	25,00	-	-	-
2	Sekolah Dasar	27,70	50,03	47,21	45,31
3	SMP	13,52	11,92	12,10	13,29
4	SMA dan SMK	23,02	25,57	26,75	27,26
5	Diploma I/II	02,59	12,46	13,94	14,18
6	Diploma IV,Sarjana S1/S2/S3	08,15			

Sumber data: BPS, Ende Dalam Angka Tahun 2020-2023

2) Tingkat Ketergantungan

Beban Ketergantungan adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif (15-64 tahun) yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda (0-14 tahun) dan umur tua (> 65 tahun/ golongan umur tidak produktif). Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah apakah tergolong wilayah maju atau wilayah yang sedang berkembang, Rasio ketergantungan memiliki dua fungsi utama, yaitu: 1) Sebagai indikator demografi artinya : perhitungan rasio ketergantungan bisa digunakan untuk mencari tahu tingkat beban ketergantungan penduduk di suatu wilayah. Apabila dependency ratio tinggi, beban ketergantungan penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, terhadap usia produktif akan semakin tinggi. Sedangkan jika rasio ketergantungannya rendah, beban ketergantungannya akan semakin rendah pula, dan 2) Indikator keadaan ekonomi suatu negara artinya bisa diketahui apakah suatu negara sudah tergolong maju atau masih di tahap negara berkembang.

Selama periode 2020-2022, terlihat angka beban ketergantungan di Kabupaten Ende mengalami penurunan dari 32,50 persen pada tahun 2020 menurun menjadi 32,49 persen pada tahun 2021, dan kembali menurun menjadi 26,28 persen pada tahun 2022.

Tabel 2. 39 Ratio Beban Ketergantungan di Kabupaten Ende Tahun 2020-2022

Tahun	Ratio Beban Ketergantungan		Total
	Anak (0–14 Tahun	Lanjut Usia (> 65 Tahun)	
2020	25,80	6,70	32,50
2021	25,67	6,82	32,49
2022	25,55	0,74	26,28

Sumber: BPS, Ende Dalam Angka (data olahan Bappeda)

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD sampai dengan 2023

1. Capaian Target Makro RPJMD 2019-2024

Mengacu pada target makro yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2019-2024 dan kondisi capaian kinerja sampai Tahun 2023, dirumuskan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.40. Target Makro Perubahan RPJMD 2019-2024 dan Capaian sampai dengan Tahun 2023

No	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2019	Capaian Kinerja				Target 2024
			2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	67,20	67,04	67,04	67,30	67,97	68,63
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,08	-1,33	-1,33	2,13	3,09	3,87

3	Angka Kemiskinan (%)	23,18 (63,450 jiwa)	23,76 (65.220 jiwa)	23,76 (65.220 jiwa)	24,13 (66.380 jiwa)	23,00 (63.400 jiwa)	22,86 (63.100 jiwa)
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,98	2,95	2,95	2,61	2,06	2,59
5	Gini Ratio (Angka)	0,304	0,341	0,341	0,298	0,306	0,273
6	Laju Inflasi (%)	5	4,98	4,98	4,98	4,96	3,27%
7	Nilai Investasi (Trilyun)	1	3,1	3,1	0,6	4,12	-
8	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	C	-	C	C	CC
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95.44	-	95.64	95.81	95,64	88.81
10	Ratio PAD (%)	6,29	9,86	9,86	7,72	6,38	
11	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	22,29	22,13	22,44	23,21	24,83	26,47
12	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (TonCO2)	-	-	-	-	17.248.829	34,09c)
13	Prevalensi Stunting (%)	14,30	17,40	17,40	14,30	8,90	6,80

2. Capaian Pelaksanaan Program

a. Capaian Visi dan Misi RPJMD 2019-2024

RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi pembangunan Kabupaten Ende, yaitu: "Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan", dengan mengemban 5 (lima) misi yang diukur dari pencapaian 273 target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian target kinerja dimaksud, dapat disimpulkan bahwa **Pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Ende, sebesar 79,35% atau dalam Kategori TINGGI,** sementara untuk ringkasan capaian kinerja dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Ende dapat dilihat pada Tabel 2.43.

Grafik 2.2. Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (kondisi s/d tahun 2023)



Tabel 2.41 Capaian Kinerja Masing-masing Misi RPJMD 2019-2024 (kondisi s/d tahun 2023)

Uraian		Capaian Kinerja	Kategori	Keterangan
Visi	MEWUJUDKAN KARAKTERISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN	79,35%	Tinggi	Capaian Kinerja 273 Indikator Kinerja yang ditetapkan, kondisi sampai dengan tahun 2023

Uraian		Capaian Kinerja	Kategori	Keterangan
Misi1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	73,00%	Sedang	MISI1:32Indikator Kinerja • 3 Indikator Melampaui Target • 8 Indikator Mencapai Target • 18 Indikator Belum Mencapai Target • 3 Indikator Masih Jauh Dibawah Target
Misi 2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat	80,38%	Tinggi	MISI 2 : 64 Indikator Kinerja • 22 Indikator Melampaui Target • 12 Indikator Mencapai Target • 22 Indikator Belum Mencapai Target • 8 Indikator Masih Jauh Dibawah Target
Misi 3	Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan	79,78%	Tinggi	MISI3:82 Indikator Kinerja • 31 Indikator Melampaui Target • 12 Indikator Mencapai Target • 25 Indikator Belum Mencapai Target • 14 Indikator Masih Jauh Dibawah Target
Misi 4	Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan	77,28%	Tinggi	MISI 4 : 24 Indikator Kinerja • 9 Indikator Melampaui Target • 2 Indikator Mencapai Target • 7 Indikator Belum Mencapai Target • 6 Indikator Masih Jauh Dibawah Target
Misi5	Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat	86,33%	Tinggi	MISI5 : 71 Indikator Kinerja • 11 Indikator Melampaui Target • 36 Indikator Mencapai Target • 18 Indikator Belum Mencapai Target • 6 Indikator Masih Jauh Dibawah Target

b. Capaian Sasaran RPJMD 2019-2024

Capaian sasaran RPJMD 2019-2024 merupakan akumulasi hasil (*outcomes*) program/ kegiatan dan keluaran (*output*) sub kegiatan, Evaluasi dilakukan dalam 2 (dua) bagian, yaitu: berdasarkan capaian masing-masing Perangkat Daerah dan masing-masing sasaran setiap misi.

Berdasarkan Perangkat Daerah diketahui bahwa terdapat 2 (dua) Perangkat Daerah dengan capaian kinerja SANGAT RENDAH , 3 (tiga) Perangkat Daerah dengan capaian kinerja RENDAH, 7 (tujuh) Perangkat Daerah dengan capaian kinerja SEDANG, 12 (dua belas) Perangkat Daerah dengan capaian kinerja TINGGI dan 10 (sepuluh) Perangkat Daerah dengan capaian kinerja SANGAT TINGGI.

Gambaran capaian kinerja berdasarkan perangkat daerah dan sasaran selengkapnya sebagaimana disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.42. Capaian Kinerja masing-masing Misi RPJMD 2019-2024 menurut Perangkat Daerah kondisi sampai dengan Tahun 2023

VISI / MISI / SKPD			Evaluasi Kinerja SKPD terhadap Target RPJMD 2019-2024										
			Jumlah				Jumlah indikator Kinerja	Masih jauh dibawah target	Belum Mencapai Target	Mencapai Target	Melampaui Target	% capaian kinerja	Kriteria
			Program		Kegiatan								
			Rutin	Urusan	Rutin	Urusan							
"Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan, Menuju Masyarakat yang Mandiri Sejahtera dan Berkeadilan"			54	182	613	396	273	37	90	70	76	79,35%	TINGGI
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi		3	7	15	15	32	3	18	8	3	73,00%	SEDANG
	1)	DINASP &K	1	3	5	8	27	2	16	8	1	73,73%	SEDANG
	2)	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH	1	1	5	2	1	0	1	0	0	39,33%	SANGAT RENDAH
	3)	DISPORA	1	3	5	5	4	1	1	0	2	76,49%	TINGGI
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat		3	9	12	19	64	8	22	12	22	80,38%	TINGGI
	1)	DINKES	1	4	6	9	52	7	17	11	17	84,26%	TINGGI
	2)	RSUD	1	2	1	4	8	1	4	0	3	59,12%	RENDAH
	3)	DPPKB	1	3	5	6	4	0	1	1	2	72,42%	SEDANG
3	Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan		9	41	54	50	82	14	25	12	31	79,78%	TINGGI
	1)	DISPAR	1	3	4	3	4	0	1	0	3	91,75%	SANGAT TINGGI
	2)	BAPENDA	1	1	4	1	1	0	1	0	0	86,69%	TINGGI
	3)	DINKOP & UKM	1	6	6	6	7	1	1	2	3	84,87%	TINGGI

	VISI / MISI / SKPD	Evaluasi Kinerja SKPD terhadap Target RPJMD 2019-2024										
		Jumlah				Jumlah indikator Kinerja	Masih Jauh dibawah target	Belum Mencapai Target	Mencapai Target	Melampaui Target	% capaian kinerja	Kriteria
		Program		Kegiatan								
		Rutin	Urusan	Rutin	Urusan							
	4) DISPERDAGIN	1	7	7	8	9	2	3	1	3	77,04%	TINGGI
	5) DPMPTSP	1	5	8	6	6	2	1	1	2	77,72%	TINGGI
	6) DINAS KETAHANAN PANGAN	1	4	6	6	4	1	1	0	2	73,98%	SEDANG
	7) DINAS PERIKANAN	1	4	6	6	2	0	2	0	0	99,96%	SANGAT TINGGI
	8) DINAS PERTANIAN	1	5	6	7	41	7	13	4	17	76,75%	TINGGI
	9) DISTRANSNAKER	1	6	7	7	8	1	2	4	1	86,48%	TINGGI
4	**Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan**	4	20	26	26	24	6	7	2	9	77,28%	TINGGI
	1) Dinas PUPR	1	7	5	9	8	1	5	0	2	91,97%	SANGAT TINGGI
	2) DISHUB	1	2	7	4	2	1	0	1	0	65,17%	RENDAH
	3) DLH	1	7	7	8	9	3	0	1	5	73,18%	SEDANG
	4) DINAS PERUMAHAN RAKYAT	1	4	7	5	5	1	2	0	2	65,99%	SEDANG
5	**Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat**	35	105	506	286	71	6	18	36	11	86,33%	TINGGI
	1) DINAS/BADAN	0	0	0	0	1	0	0	1	0	100,00%	SANGAT TINGGI

	VISI / MISI / SKPD	Evaluasi Kinerja SKPD terhadap Target RPJMD 2019-2024										
		Jumlah				Jumlah Indikator Kinerja	Masih jauh dibawah target	Belum Mencapai Target	Mencapai Target	Melampaui Target	% capaian kinerja	Kriteria
		Program		Kegiatan								
		Rutin	Urusan	Rutin	Urusan							
2)	KECAMATAN	21	63	420	210	7	0	0	7	0	100,00%	SANGAT TINGGI
3)	DISPENDUK & CAPIL	1	4	4	8	6	0	1	0	5	96,89%	SANGAT TINGGI
4)	DISKOMINFO	1	4	5	5	5	2	1	1	1	66,21%	SEDANG
5)	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH	0	1	0	2	1	0	1	0	0	73,59%	SEDANG
6)	BAPPEDA	1	3	7	7	3	1	2	0	0	64,47%	RENDAH
7)	SEKRETARIAT DPRD	1	1	7	6	3	0	2	1	0	79,86%	TINGGI
8)	SETDA	1	2	12	8	8	0	3	5	0	94,57%	SANGAT TINGGI
9)	BPKAD	1	2	7	5	3	0	0	3	0	0,00%	SANGAT RENDAH
10)	INSPEKTORAT DAERAH	1	2	6	3	2	0	1	0	1	79,38%	TINGGI
11)	BKPSDM	1	2	6	5	2	0	1	0	1	91,44%	SANGAT TINGGI
12)	BadanKesbangpolda	1	4	5	4	5	0	3	1	1	85,33%	TINGGI
13)	SATPOL PP	1	2	5	4	5	0	0	5	0	100,00%	SANGAT TINGGI
14)	BPBD	1	1	6	3	1	0	0	0	1	100,00%	SANGAT TINGGI
15)	DINAS SOSIAL	1	5	7	6	8	1	2	5	0	91,83%	SANGAT TINGGI
16)	DPMD	1	3	5	3	5	2	1	2	0	72,88%	SEDANG
17)	DINAS PPPA	1	6	4	7	6	0	0	5	1	83,33%	TINGGI

Tabel 2.44 Capaian Kinerja Sasaran masing-masing Misi RPJMD 2019-2024

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
MISI 1 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING TINGGI								
Sasaran	Indikator Kinerja							
Meningkatnya Derajad Pendidikan Masyarakat	Persentase Siswa yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	60,86%	94,20%	91,20%	50,65%	55,54%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Rasio Guru Berbanding Murid SD/MI	978	977,94	977,93	593,86	60,73%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Rasio Guru Berbanding Murid SMP/MTs	917	746,93	746,93	563,37	75,42%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Rata-rata Kompetensi Literasi SD	n/a	1,91	44,42	44,62	100,45%	Mencapai Target	Dinas P dan K
	Rata-rata Kompetensi Numerasi SD	n/a	1,74	33,85	35,56	105,05%	Mencapai Target	Dinas P dan K
	Rata-rata Kompetensi Karakter SD	n/a	2,39	2,29	1,51	65,94%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Rata-rata Kompetensi Literasi SMP	n/a	2,05	60,08	58,51	97,39%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP	n/a	2,06	59,51	52,89	88,88%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Rata-rata Kompetensi Karakter SMP	n/a	2,38	2,28	1,61	70,61%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SD/M	110	107,53	107,53%	107,59%	100,06%	Mencapai Target	Dinas P dan K

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
	Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SMP/MTs	54	50,11	50,11%	52,85%	105,48%	Mencapai Target	Dinas P dan K
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	104%	108,00%	109,00%	100,30%	92,02%	Mencapai Target	Dinas P dan K
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	87,00%	84,63%	85,40%	84,33%	98,75%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	90,86%	98,59%	98,17%	89,39%	91,06%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	66,41%	75,70%	73,21%	66,78%	91,21%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	93,55%	96,91	96,86%	93,65%	96,69%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B	79,87%	91,69	85,84%	74,23%	86,48%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	89,36%	100%	100,00%	92,38%	92,38%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00%	0%	0,00%	0,12%	0,00%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,00%	0%	0,00%	0,12%	0,00%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Guru SD/MI yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	70,99%	60,45%	80,99%	83,74%	103,40%	Mencapai Target	Dinas P dan K
	Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	82,42%	71,81%	92,42%	92,76%	100,37%	Mencapai Target	Dinas P dan K
	Tenaga Pendidik SD/MI yang Mengikuti Diklat Kompentensi	14,50%	47,61%	40,99%	0,00%	0,00%	Masih Jauh Dibawah Target	Dinas P dan K

Misi /Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
	Tenaga Pendidik SMP yang Mengikuti Diklat Kompentensi	8,49%	37,18%	31,18%	0,00%	0,00%	Masih Jauh Dibawah Target	Dinas P dan K
	Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan	4,23%	25,35%	18,31%	44,52%	243,15%	Mencapai Target	Dinas P dan K
	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	39,13%	78,26%	65,22%	100,00%	153,33%	Melampaui Target	Dinas P dan K
	Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan	95,24%	100,00%	100,00%	21,74%	21,74%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Persentase Pembinaan Perpustakan Daerah, Kel dan Desa	86,00%	100,00%	95,00%	37,36%	39,33%	Belum Mencapai Target	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Persentase Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	25,00%	40,00%	45,00%	95,51%	212,23%	Melampaui Target	Dispora
	Persentase Wirausaha Muda	15,97%	63,21%	54,81%	68,47%	124,92%	Melampaui Target	Dispora
	Jumlah Atlet Yang Memperoleh Medali Dalam,Olahraga Prestasi ,Olahraga Masyarakat dan olahraga Pendidikan pada Kejuaraan Tingkat Provinsi dan Nasional	50,00%	80,00%	70,00%	59,18%	84,55%	Belum Mencapai Target	Dispora
	Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Yang Dilaksanakan	100,00%	100,00%	100,00%	21,43%	21,43%	Masih Jauh Dibawah Target	Dispora
MISI2 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG MERATA DAN TERJANGKAU BAGI SELURUH MASYARAKAT								
Sasaran	Indikator Kinerja							

Misi/ Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	100%	100,00%	100,00%	86,43%	86,43%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Siswa SD dan setingkat	100%	100,00%	100,00%	57,58%	57,58%	Masih Jauh Dibawah Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Kepesertaan JKN	77,63%	95,00%	93,00%	77,49%	83,33%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Faskes Terakreditasi	100,00%	100,00%	100,00%	96,15%	96,15%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar Pekerja	70,00%	100,00%	95,00%	100,00%	105,26%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Jumlah Pos UKK di setiap Wilayah Puskesmas	1,09%	11,15%	9,35%	9,35%	100%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar Kelompok Olahraga	50,00%	80,00%	75,00%	100,00%	133%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Presentase Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi (Obat, Makanan, Kosmetik)	50,00%	80,00%	75,00%	52,70%	70,27%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Rumah Tangga yang ber-PHBS	27,15	48,09%	43,72%	48,75%	111,50%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan SDM yang Mempromosikan Kesehatan	60,00%	100,00%	97,70%	96,25%	98,52%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100,00%	100,00%	100,00%	96,26%	96,26%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Persentase Balita Gizi Buruk	0,61%	0,43%	0,46%	3,91%	11,76%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Balita Gizi Kurang	14,20%	14,07%	14,09%	7,39%	190,64%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Dua Tahun/Baduta	42,04%	6,80%	9,20%	10,28%	90,46%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sanga Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita	19,59%	6,80%	9,30%	1,44%	645,0291	Masih Jauh Dibawah Target	Dinas Kesehatan
	Persentase Desa yang Melaksanakan STBM	67,63%	93,53%	92,81%	98,57%	106,20%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Sarana Air Minum yang Memenuhi Syarat	44,20%	68,32%	64,30%	50,00%	77,76%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Sarana Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan/Minuman yang Memenuhi Syarat	67,03%	100,00%	97,48%	100,00%	102,59%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	78,78%	100,00%	99,00%	71,94%	72,67%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam	100,00%	100,00%	100,00%	0%(Tidak ada kasus KLB)	100,00%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	25,68%	39,88%	37,51%	53,16%	141,71%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
	Persentase Anak Usia 1 tahun yang Diimunisasi Campak Rubella	77,60%	100,00%	98,00%	80,25%	81,88%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	295,23	488,46	466,91	2560,52	548,40%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar	100%	100,00%	100,00%	74,31%	74,31%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk	9.083,00	33.083	29.083	0,00%	0,00%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	28,00%	100,00%	88,00%	93,07%	105,76%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Angka Kejadian Malaria	0,80	0,38	0,45	2,15%	2096,94%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	37,19%	100,00%	90,00%	96,61%	107,34%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penderita Diare yang Ditangani	40,46%	48,44%	47,11%	32,50%	68,99%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	52,42%	100,00%	92,00%	100,00%	108,70%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Rasio Dokter per satuan Penduduk	0,08	0,20	0,21	0,20	99,45%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Rasio Tenaga Para Medis	2,24	2,45	2,42	2,66	110,11%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Rasio Puskesmas per satuan Penduduk	0,0898	0,01	0,01	0,09	929,93%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Rasio Pustu per satuan Penduduk	0,0646	0,01000	0,01	0,20	200292%	Melampaui Target	Dinas

Misi/Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
								Kesehatan
	Operasionalisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama	-	Ya	Ya	Ya	100,00%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Anak Balita	89,00%	100,00%	99,00%	78,13%	78,92%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	47,00%	100,00%	98,00%	56,52%	57,68%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Kualitas Hygiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan/Minuman	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Menurunnya Kasus Kematian Ibu	146,092	18,26	36,52	0,22%	1680833,00%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Pertolongan Persalinan di Faskes oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	100,00%	100,00%	100,00%	73,01%	73,01%	Masih Jauh Dibawah Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan K4	63,52%	89,74%	87,72%	56,01%	63,85%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Nifas	95,01%	100,00%	100,00%	73,09%	73,09%	Masih Jauh Dibawah Target	Dinas Kesehatan
	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	10,74	2,28	3,43	11,97	28,66%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Neonatus	9,37	2,28	3,43	4,68	73,25%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Neonatus	68,06%	100,00%	98,00%	57,19%	58,36%	Masih Jauh Dibawah Target	Dinas Kesehatan

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
	Cakupan Kunjungan Bayi	100,00%	100,00%	100,00%	95,52%	95,52%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Neonatal Komplikasi yang Ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS)	86,21%	100,00%	98,28%	96,85%	98,55%	Belum Mencapai Target	RSUD
	Pde yang Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	84,57%	100,00%	97,43%	89,16%	91,51%	Belum Mencapai Target	RSUD
	Bed Occupancy Rate (BOR)	68,76%	69,96%	69,76%	45,67%	65,47%	Belum Mencapai Target	RSUD
	Average Length of Stay (ALOS)	3,58	4,06	3,98	3,26	81,99%	Belum Mencapai Target	RSUD
	Bed Turn Over (BTO)	70,61	67,61	68,11	25,63	37,64%	Masih Jauh Dibawah Target	RSUD
	Turn Over Interval (TOI)	1,61	1,55	1,56	14,43	10,81%	Melampaui Target	RSUD
	Gross Death Rate (GDR)	41,02	38,02	38,52	82,91	46,46%	Melampaui Target	RSUD
	Net Death Rate (NDR)	21,34	20,34	20,84	51,38	40,56%	Melampaui Target	RSUD
	Meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk	83,33%	84,50%	85,50%	100%	116,96%	Melampaui Target	DPPKB
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	42,91%	46,51%	45,31%	45,31%	100%	Mencapai Target	DPPKB
	Menurunnya tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/ DO)	20,50%	5,50%	10,50%	13,48%	0,78%	Melampaui Target	DPPKB

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan	28	23	24	27	88,89%	Belum Mencapai Target	DPPKB
Misi 3:PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN PARIWISATA YANG KOMPETITIF DAN BERKELANJUTAN								
Sasaran	**Indikator Kinerja**							
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (Prime Mover)	Meningkatnya Jumlah Destinasi Wisata di Kab. Ende	-	1 lokasi	2lokasi	3 lokasi	150%	Melampaui Target	Dinas Pariwisata
	Prosentase Promosi / Pemasaran Pariwisata	100%	100%	100%	67%	66,99%	Belum Mencapai Target	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	-	5 unit	5 unit	18 unit	360%	Melampaui Target	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	172 orang	437 orang	352 orang	505 orang	143,47%	Melampaui Target	Dinas Pariwisata
	Persentase Pendapatan dan Retribusi dan Pajak Daerah terhadap PAD	28,84%	34%	32%	27,74%	86,69%	Belum Mencapai Target	Bapenda
Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan (Pengolahan) dan Sektor Potensial (Perdagangan, Transportasi dan Pergudangan)	Jumlah Koperasi Yang Diterbitkan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang	121 koperasi	133koperasi	129 koperasi	134 koperasi	103,88%	Melampaui Target	Dinkop, UKM
	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa	10 koperasi	20 koperasi	17 koperasi	17koperasi	100,00%	Mencapai Target	Dinkop, UKM
	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Standar Kesehatan	26 Koperasi	32 Koperasi	30 Koperasi	27 koperasi	90,00%	Belum Mencapai Target	Dinkop, UKM

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
	Jumlah SDM Pengurus Koperasi yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	66 orang	195 orang	152 orang	152 orang	139%	Mencapai Target	Dinkop, UKM
	Jumlah Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan dan Perlindungan	10 Koperasi	22Koperasi	18 Koperasi	21 Koperasi	150%	Melampaui Target	Dinkop, UKM
	Presentase UMKM yang difasilitasi dan berdaya saing	18,61%	30,56%	26,67%	1,09%	4,88%	Belum Mencapai Target	Dinkop, UKM
	Jumlah Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	4.465 unit usaha	2unit usaha	2 unit usaha	292 unit usaha	146,00%	Melampaui Target	Dinkop, UKM
	Jumlah Rekomendasi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	8 dokumen	25 dokumen	24 dokumen	217 dokumen	493%	Melampaui Target	Disperdagin
	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Memenuhi Persyaratan	599 unit	635 unit	630 unit	570 unit	91%	Belum Mencapai Target	Disperdagin
	Tersedianya Dokumen Pembinaan Pengelolaan Distribusi Perdagangan	13 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	100%	Mencapai Target	Disperdagin
	Jumlah Laporan Stabilisasi Harga Barang dan Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	170 laporan	495 laporan	495 laporan	356 laporan	72%	Belum Mencapai Target	Disperdagin
	Persentase Kegiatan Promosi Dagang Ekspor Yang difasilitasi	42,00%	100,00%	100,00%	1,00%	1,00%	Belum Mencapai Target	Disperdagin
	Terlaksananya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	1laporan	3 laporan	3 laporan	4 laporan	133%	Melampaui Target	Disperdagin

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
	Jumlah dokumen perencanaan dan pembangunan industri	267 dokumen	49 dokumen	49 dokumen	60 dokumen	122%	Melampaui Target	Disperdagin
	Jumlah Dokumen Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	6 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	8 dokumen	80%	Belum Mencapai Target	Disperdagin
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi	-	27 dokumen	18 dokumen	9dokumen	100%	Belum Mencapai Target	Disperdagin
Meningkatnya Investasi	Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti	-	80%	80%	8,57%	10,71%	Belum Mencapai Target	DPM, PPTSP
	Jumlah investor baru	-	80%	80%	30,00%	37,50%	Belum Mencapai Target	DPM, PPTSP
	Persentase Jumlah Permohonan izin yang terlayani	-	80%	80%	100,00%	125,00%	Melampaui Target	DPM, PPTSP
	Persentase pengaduan yang terselesaikan tepat waktu	-	80%	80%	53.85%	67,31%	Belum Mencapai Target	DPM, PPTSP
	Persentase Peningkatan investasi di Kabupaten Ende	-	100%	100%	537,26%	537,26%	Melampaui Target	DPM, PPTSP
	Persentase izin yang terselesaikan	-	100%	101%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	DPM, PPTSP

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
Meningkatnya Produktifitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Kelautan sebagai Sektor Dominan dan Penunjang Pangan Utama	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang aktif	33 unit	33 unit	33 unit	31 unit	93,94%	Belum Mencapai Target	Dinas Ketahanan Pangan (DKP)
	Peningkatan jumlah Kelompok tani pengelola pemanfaatan pekarangan	47 kelompok	53kelompok	51 kelompok	1kelompok	1,96%	Masih Jauh Dibawah Target	Dinas Ketahanan Pangan (DKP)
	Penanganan Desa/kel Rawan Pangan	0 Desa/Kelurahan	70 Desa/Kelurahan	60 Desa/Kelurahan	70 Desa/Kelurahan	233,33%	Melampaui Target	Dinas Ketahanan Pangan (DKP)
	Persentase Pangan Segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	70%	80%	76%	93,75%	123,36%	Melampaui Target	Dinas Ketahanan Pangan (DKP)
	Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap	48,50%	66,58%	61,09%	61,04%	99,92%	Belum Mencapai Target	Dinas Perikanan
	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	67,21%	100,90%	83,40%	86,67%	93,13%	Belum Mencapai Target	Dinas Perikanan
	Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Holtikultural (Ton / ha)(Cabe Rawit, Cabe besar, Bawang merah, Bawang Putih, wortel, Kentang, Kubis /Kol, Petsa /Sawi, Labu siam, tomat, pisang, mangga, pepaya, Alpukat, Jeruk, bioformaahe, kunyit, dll)							Dinas Pertanian
	a. Cabe Rawit	1,39 Ton/Ha	1,39 Ton/Ha	1,39 Ton/Ha	1,40 Ton/Ha	100,72%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	b. Cabe Besar	1,50 Ton/Ha	1,60 Ton/Ha	1,59 Ton/Ha	1,73 Ton/Ha	108,93%	Melampaui Target	Dinas Pertanian

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
	c. Bawang Merah	2,42 Ton/Ha	2,46 Ton/Ha	2,45 Ton/Ha	2,66 Ton/Ha	108,38%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	d. Bawang Putih	2,36 Ton/Ha	2,31 Ton/Ha	2,29 Ton/Ha	2,60 Ton/Ha	113,54%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	e. Wortel	0.82 Ton/Ha	0,84 Ton/Ha	0.83 Ton/Ha	0.92 Ton/Ha	110,79 %	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	f. Kentang	8,92 Ton/Ha	8,94 Ton/Ha	8,92 Ton/Ha	9,74 Ton/Ha	109,23%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	g. Kubis/ kol	1,49 Ton/Ha	1,49 Ton/Ha	1,49 Ton/Ha	1,65 Ton/Ha	110,77%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	h. Petsai/ Sawi	1,61 Ton/Ha	1,71 Ton/Ha	1,7 Ton/Ha	1,83 Ton/Ha	108,12%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	j.Tomat	2,33 Ton/Ha	2,81 Ton/Ha	2,55 Ton/Ha	2,58 Ton/Ha	101,28%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	k. Pisang	7,78 Ton/Ha	9,41 Ton/Ha	8,55 Ton/Ha	8,56 Ton/Ha	100,09%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	l. Mangga	6,54 Ton/Ha	7,69 Ton/Ha	6,99 Ton/Ha	6,99 Ton/Ha	100,00%	Mencapai Target	Dinas Pertanian
	m. Pepaya	8,38 Ton/Ha	9Ton/Ha	8,75 Ton/Ha	9,83 Ton/Ha	112,33%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	m. Jahe	12,65 Ton/Ha	12,80 Ton/Ha	12,75 Ton/Ha	13,51 Ton/Ha	105,97%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	n. Kunyit	7,56 Ton/Ha	7,75 Ton/Ha	7,70 Ton/Ha	7,70 Ton/Ha	99,97%	Mencapai Target	Dinas Pertanian
	o. Kencur	8,05 Ton/Ha	8,20Ton/Ha	8,15 Ton/Ha	8,15 Ton/Ha	100,04%	Mencapai Target	Dinas Pertanian

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
	Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Pangan (Ton / ha)Padi sawah, Padi Ladang,Jagung,Ubi Kayu,Ubi Jalar,Kacang Kedelai,Kacang Tanah,Kacang Hijau,Shorgum:							Dinas Pertanian
	a. Padi Sawah	7,10 Ton/Ha	7,02 Ton/Ha	7,02 Ton/Ha	6,48 Ton/Ha	92,33%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
	b. Padi Ladang	3Ton/Ha	3,02 Ton/Ha	3,02 Ton/Ha	3,01 Ton/Ha	99,62%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
	c. Jagung	4,02 Ton/Ha	4,03 Ton/Ha	4,03 Ton/Ha	3,89 Ton/Ha	96,55%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
	d. UbiKayu	14,61 Ton/Ha	27Ton/Ha	26 Ton/Ha	25,47 Ton/Ha	97,97%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
	e. Ubi Jalar	10 Ton/Ha	10,50 Ton/Ha	10,4 Ton/Ha	8,91 Ton/Ha	85,70%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
	f.Kacang Kedelai	1,70 Ton/Ha	1,70 Ton/Ha	1,70 Ton/Ha	1,50 Ton/Ha	88,24%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
	g. Kacang Tanah	1,70 Ton/Ha	1,70 Ton/Ha	1,70 Ton/Ha	1,39 Ton/Ha	81,91%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
	h. Kacang Hijau	1,75 Ton/Ha	1,70 Ton/Ha	1,70 Ton/Ha	1,54 Ton/Ha	90,34%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
	i. Shorgum	2,09 Ton/Ha	2,40 Ton/Ha	2,20 Ton/Ha	0,54 Ton/Ha	24,64%	Masih Jauh Dibawah Target	Dinas Pertanian
	Cakupan Nilai produksi Tanaman Perkebunan(%)(Kelapa, Kopi, kakao, Jambu Mente, Kemiri, Cengkeh, Pala)							Dinas Pertanian
	a. Kelapa	0,98%	1,40%	1,20%	0,94%	77,93%	Masih Jauh Dibawah Target	Dinas Pertanian

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
	b. Kakao	0,70%	1,00%	1,78%	0,83%	46,35%	Masih Jauh Dibawah Target	Dinas Pertanian
	c. Jambu Mete	1,77%	1,80%	0,80%	0,25%	31,70%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
	d. Kopi	0,80%	0,80%	0,90%	-0,98%	-108,52	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
	e. Kemiri	1,76%	1,90%	1,85%	0,04%	1,94%	Masih Jauh Dibawah Target	Dinas Pertanian
	f. Cengkeh	1,23%	1,50%	1,40%	0,39%	27,81%	Masih Jauh Dibawah Target	Dinas Pertanian
	g. Pala	0,51%	0,65%	0,60%	-0,02%	-3,86	Masih Jauh Dibawah Target	Dinas Pertanian
	Cakupan Nilai Produksi Peternakan (%) (Sapi, Kerbau, Babi, Kambing, Ayam, Telur)							Dinas Pertanian
	a. Sapi	2,21%	2,50%	2,50%	2,01%	80,52%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
	b. Kerbau	0,98%	1,00%	1,00%	1,12%	111,86%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	c. Babi	2,41%	2,00%	2,00%	2,09%	104,49%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	d. Kambing	1,27%	1,00%	1,00%	0,40%	39,91%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
	e. Ayam	2,69%	3,00%	3,00%	3,16%	105,23%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	f. Telur	2,47%	2,75%	2,75%	2,79%	101,32%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	Terbangunnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	36 unit	40 unit	38 unit	35 unit	92,11%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian

Misi/ Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
	Terlaksanannya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100,00%	100,00%	100,00%	140%	140,00%	Melampaui Target	D.nas Pertanian
	Terkendalinya Rencana Pertanian	100 Ton/Ha	100 Ton/Ha	100 Ton/Ha	0% (tidak ada bencana)	100,00%	Mencapai Target	Dinas Pertanian
	Cakupan Jumlah Kelp. Tani yang meningkat statusnya	2.014 kls kel	2.044 kls kel	2.034 kls kel	68 kls kel	3,34%	Masih Jauh Dibawah Target	D.nas Pertani.an
Menurunkan Tingkat Pengangguran	Besaran Pencari kerja yg mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	54,31%	54,41%	54,39%	52,98%	97,40%	Belum Mencapai Target	Distransnaker
	Meningkatnya kesempatan Kerja	6,15%	82,53%	82,51%	29,20%	35,39%	Masih Jauh Dibawah Target	Distransnaker
	Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan	58,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Distransnaker
	Jumlah Kepesertaan Program Jamsostek /BPJS Ketenagakerjaan	73,08%	89,69%	80,11%	91,00%	113,60%	Melampaui Target	Distransnaker
	Besaran Perusahaan yang mefaksanakan Upah Minimum Provinsi(UMP)	9,60%	9,60%	9,60%	5,67%	59,07%	Belum Mencapai Target	Distransnaker
	Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Mencapai Target	D.stransnaker
	Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun/kembangkan	0 Dokumen	1Dokumen	1 Dokumen	1Dokumen	100,00%	Mencapai Target	Distransnaker
	Jumlah Kawasan TransmigrasiYang dikembangkan	1Lokasi	1Lokasi	1Lokasi	1Lokasi	100,00%	Mencapai Target	D.stransnaker
Meningkatnya Pengendalian Inflasi								

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
Misi 4: MEMBANGUN, MENATA, DAN MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG SECARA KUANTITATIF MAUPUN KUALITATIF SESUAI POTENSI DAN KEBUTUHAN DAERAH YANG RAMAH LINGKUNGAN								
Sasaran	**Indikator Kinerja**							
Meningkatnya Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/h..m)	32,42%	55,40%	51,80%	49,95%	96,44%	Belum Mencapai Target	Dinas PUPR
	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	50,55%	52,88%	52,88%	55,53%	105,01%	Melampaui Target	Dinas PUPR
	Prosentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Permukiman	26,08%	26,70%	26,34%	51,17%	194,26%	Melampaui Target	Dinas PUPR
	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	38,66%	60,00%	56,09%	53,75%	95,83%	Belum Mencapai Target	Dinas PUPR
	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	90,83%	95,08%	94,66%	56,68%	59,88%	Masih jauh Dibawah Target	Dinas PUPR
	Presentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	61,11%	77,70%	72,20%	67,01%	92,81%	Belum Mencapai Target	Dinas PUPR
	Prosentase perencanaan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang sesuai regulasi yang berlaku	100,00%	100,00%	100,00%	94,19%	94,19%	Belum Mencapai Target	Dinas PUPR

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	1,20%	1,45%	1,45%	1,40%	96,64%	Belum Mencapai Target	Dinas PUPR
	Persentase KK Korban Bencana Alam atau Relokasi yang memperoleh Rumah Layak Huni	n/a	100%	100,00%	72,03%	72,03%	Belum Mencapai Target	Dispera,KPP
	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Tertangani	11,92%	45,19%	38,14%	11,92%	31,24%	Belum Mencapai Target	Dispera,KPP
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	49,26%	52,51%	51,42%	52,01%	101,15%	Melampaui Target	Dispera,KPP
	Persentase Meningkatnya Rumah Layak Huni	71,13%	71,91%	71,75%	72,00%	100,34%	Melampaui Target	Dispera,KPP
	Persentase Bidang Tanah Pemda yang Tersertifikat	70,62%	79,11%	78,21%	20,59%	26,33%	Belum Mencapai Target	Dispera,KPP
	Persentase Pemantauan dokumen Perencanaan LH	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	300,00%	300,00%	Melampaui Target	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase B3 dan Limbah B3 yang ditangani	50,00%	75,00%	65,00%	7,93%	12,20%	Belum Mencapai Target	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	60,00%	100%	80,00%	100,00%	125,00%	Melampaui Target	Dinas Lingkungan Hidup

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat di Kabupaten	20,00%	40,00%	3,00%	0,00%	0,00%	Masih Jauh Dibawah Target	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase lembaga pendidikan/dunia usaha yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	500,00%	Melampaui Target	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	60,00%	100,00%	80,00%	100,00%	125,00%	Melampaui Target	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Pengurangan Sampah	24,00%	28,00%	27,00%	12,54%	46,45%	Masih Jauh Dibawah Target	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Penanganan Sampah	50,00%	70,00%	60,00%	86,03%	143,39%	Melampaui Target	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks pelayanan transportasi darat	76,36%	98,43%	88,82%	26,95%	30,34%	Masih Jauh Dibawah Target	Dinas Perhubungan
	Persentase koordinasi pembinaan dan pengawasan layanan angkutan laut	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas Perhubungan
Misi 5: MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN BERKUALITAS SERTA RASA AMAN, TERTIB DAN NYAMAN BAGI PENGEMBANGAN USAHA DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT								
Sasaran	**Indikator Kinerja**							

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
Meningkatnya Birokrasi yang **Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien**	Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	32 Dinas/Badan
	Persentase Kecamatan yang melaksanakan menyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dengan baik	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	21 Kecamatan
	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	21Kecamatan
	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	21Kecamatan
	Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat	100,00%	100%	1,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	21Kecamatan
	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	21Kecamatan
	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tepat Waktu	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	21Kecamatan
	Persentase Desa yang Menyampaikan Laporan Tepat Waktu	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	21Kecamatan
	Persentase Penduduk berKartu Keluarga	15,95%	100%	71,98%	99,90%	138,79%	Melampaui Target	Dispenduk, Capil

Misi/Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
	Persentase Penduduk ber KTP-el	73,00%	100%	91,00%	99,50%	109,34%	Melampaui Target	Dispenduk, Capil
	Persentase anak memiliki KIA	4,20%	100%	83,00%	67,54%	81,37%	Belum Mencapai Target	Dispenduk, Capil
	Persentase penduduk usia 0-18 th ber akta kelahiran	55,86%	100%	85,28%	98,90%	115,97%	Melampaui Target	Dispenduk, Capil
	Cakupan ketersediaan profil kependudukan	-	1 dokumen	100,00%	7 dokumen	100,00%	Melampaui Target	DiSpenduk, Capil
	Prosentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dilaksanakan	53,85%	100%	84,62%	100,00%	118,18%	Melampaui Target	Dispenduk, Capil
	Persentase diseminasi informasi publik	100,00%	100,00%	100,00%	107,55%	107,55%	Melampaui Target	Diskominfo
	Persentase layanan publik secara online dan terintegrasi yang berfungsi baik	100,00%	100,00%	100,00%	66,04%	66,04%	Belum Mencapai Target	Diskominfo
	Persentase Sistem informasi yang Tercover NOC dan Data Center	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Diskominfo
	Persentase Penyediaan Data Statistik Sektoral	100,00%	100,00%	100,00%	40,00%	40,00%	Belum Mencapai Target	Diskominfo
	Persentase pengamanan data dan informasi daerah	100,00%	100,00%	100,00%	25,00%	25,00%	Belum Mencapai Target	Diskominfo
	Persentase Pengelolaan Arsip secara baku di tingkat PD dan Desa	51,00%	65%	60,00%	44,16%	73,59%	Belum Mencapai Target	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Misi/Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
	Indeks capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	100%	100,00%	96,71%	96,71%	Belum Mencapai Target	Bappeda
	Tersedianya data dan informasi kajian litbang yang dapat digunakan dalam perumusan rencana pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	0,00%	0,00%	Masih Jauh Dibawah Target	Bappeda
	Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00%	100%	100,00%	96,69%	96,69%	Belum Mencapai Target	Bappeda
	Persentase Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	50,00%	87,50%	75,00%	50,00%	66,67%	Belum Mencapai Target	Sekretariat Dewan
	Persentase Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dan DPRD	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Sekretariat Dewan
	Persentase raperda dalam propemperda yang dibahas	29,41%	75%	60,00%	43,75%	72,92%	Belum Mencapai Target	Sekretariat Dewan
	Penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Mencapai Target	Sekretariat Daerah
	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	MencapaiTarget	Sekretariat Daerah
	Persentase raperda yang diundangkan menjadi peraturan daerah	61,64%	80%	75,00%	71,43%	95,24%	Belum Mencapai Target	Sekretariat Daerah
	Persentase kerjasama yang aktif	87,50%	100%	100,00%	65,00%	65,00%	Belum Mencapai Target	Sekretariat Daerah

Misi/ Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian	-	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Sekretariat Daerah
	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan	-	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Sekretariat Daerah
	persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	-	100%	100,00%	96,30%	96,30%	Belum Mencapai Target	Sekretariat Daerah
	Persentase penanganan permasalahan kebijakan SDA	-	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Mencapa Target	BPKAD
	Terwujudnyaketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP	WTP	Tepat Waktu	tepat waktu	Tepat Waktu	Mencapai Target	BPKAD
	Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	tepat waktu	tepat waktu	Tepat Waktu	tepat waktu	Tepat Waktu	Mencapai Target	BPKAD
	Menurunnya Jumlah Temuan BPK	12 temuan	5 temuan	100,00%	58,77%	58,77%	Belum Mencapai Target	Inspektorat
	Presentase Tindaklanjut terhadap Temuan	5,72%	55%	36,76%	61,96%	168,56%		Inspektorat
	Persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi	7,30%	9,50%	9,30%	7,71%	82,87%	Belum Mencapai Target	BKPSDM
	Persentase Pelayanan Kepegawaian	72,80%	81%	80,20%	100,00%	124,69%		BKP SDM
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan	Jumlah Pembinaan Ideologi, wawasan Kebangsaan dan karakter	n/a	7	10	6	60.00%	Belum Mencapai Target	Badan Kesbangpol

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
Sosial bagi Masyarakat	bangsa							
	Jumlah Parpol yang dibina	12 parpol	12 parpol	12 parpol	12 parpol	100,00%	Mencapai Target	Badan Kesbangpol
	Presentase Ormas yang dibina	69,00%	44,00%	44,00%	38,96%	112,93%	Belum Mencapai Target	Badan Kesbangpol
	Cakupan Pembinaan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	100,00%	100%	100,00%	66,67%	66,67%	Belum Mencapai Target	Badan Kesbangpol
	Porsentase Deteksi Dini dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100,00%	100%	100,00%	166,67%	166,67%	Melampaui Target	Badan Kesbangpol
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Satpol PP
	Menurunnya Kasus Konflik Sosial Yang Terjad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Satpol PP
	Cakupan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Satpol PP
	Persentase Penegakan PERDA	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Satpol PP
	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	62,50%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Satpol PP
	Persentase Desa Tangguh bencana pada kawasan rawan bencana	26,98%	32%	30,57%	50,87%	166,40%	Melampaui Target	BPBD
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang	100%	100%	100,00%	89,78%	89,78%	Belum Mencapai Target	Dinsos

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
	diberdayakan							
	Persentase Pemeriu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani/ diberdayakan			100,00%	52,61%	52,61%	Masih Jauh Dibawah Target	Dinsos
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan Penanganan	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinsos
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinsos
	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	41,13%	42,65%	42,14%	38,89%	92,28%	Belum Mencapai Target	Dinsos
	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinsos
	Persentase (%) Penanganan Korban Bencana alam dan sosial	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinsos
	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	100 ,00%	100%	100 ,00%	100 ,00%	100 ,00%	Mencapai Target	Dinsos
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	96,87%	97,49%	97,29%	97,99%	100,72%	Melampaui Target	Dinas PPPA
	Ratio KDRT	0,026%	0,02%	0,02%	0,02%	124,75%	Mencapai Target	Dinas PPPA

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
	Cakupan Data Gender dan Anak yang tersedia	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	Mencapai Target	Dinas PPPA
	Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan	71,43%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas PPPA
	Cakupan Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas PPPA
	Cakupan Perlindungan Khusus Anak	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas PPPA
	Persentase Penataan Desa	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	DPMD
	Persentase Peningkatan Kerjasama Pedesaan	100,00%	100,00%	100,00%	8,79%	8,79%	Masih Jauh Dibawah Target	DPMD
	Cakupan pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang tertib administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	58,82%	58,82%	Masih Jauh Dibawah Target	DPMD
	Persentase BUMDes Berkembang	3,13%	13,54%	10,42%	10,42%	99,97%	Mencapai Target	DPMD
	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat	67,46%	100%	80,95%	78,39%	96,83%	Belum Mencapai Target	DPMD

a. **Pencapaian Target Sustainability Development Goals (SDGs)**

SDGs merupakan sebuah pogram pembangunan berkelanjutan dimana menggantikan program sebelumnya yaitu MDGs (Millenium Development Goals) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 dalam Forum PBB. Sejalan dengan upaya percepatan pencapaian SDGs nasional sebagaimana yang tertuang dalam Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang harus diikuti rencana aksi daerah pada tataran perencanaan provinsi dan kabupaten/kota, maka dalam penyusunan RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 perlu dintegrasikan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs dengan jelas. Untuk itu evaluasi atas pencapaian target tujuan SDGs Kabupaten Ende sampai dengan kondisi sebelum tahun rencana menjadi hal penting, dalam satu kesatuan perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

Badan dunia PBB telah mengeluarkan 169 target dan 241 indikator yang menjadi panduan berbagai negara untuk mengukur pencapaian SDGs tersebut. Mengingat kondisi spesifik di Kabupaten Ende, maka tidak semua indikator yang dikeluarkan PBB tersebut dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu dalam evaluasi dilakukan melalui penyesuaian dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan indikator pembangunan Kabupaten Ende.



Ringkasan status pencapaian Tujuan SDGs di Kabupaten Ende yang menjadi perhatian dalam perumusan sasaran RPD tahun 2025-2026 adalah, sebagai berikut:

Tabel 2. 44 DATA CAPAIAN SDGs KABUPATEN ENDE TAHUN 2019-2023

KODE	DESKRIPSI	SUMBER	SUMBER_DETAIL	DISAGREGASI	CAPAIAN DATA TAHUN					SATUAN
					2019	2020	2021	2022	2023	
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	Sunsenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	Kabupaten	23,18	23,76	24,13	23,00	22,86	Persen
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (1) akses pada layanan air minum	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	41,44	39,99	43,89	48,67	98,45	Persen
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (2) akses pada layanan sanitasi dasar	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	91,49	89,59	86,63	88,09	88,45	Persen
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (3) akses pada fasilitas penyehatan dasar	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	52,19	70,65	63,62	62,82		Persen
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan: (1) Proporsi rumah tangga dengan rumah milik	K/L	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	88,00	87,45	82,01	89,99		Persen
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	K/L	Riskesdas 2013 dan 2018, \ SSGBI 2019, SSGI2021 dan 2022 (Kemenkes)	Kabupaten	35,76		27,20	0,00	1	Persen

KODE	DESKRIPSI	SUMBER	SUMBER_DETAIL	DISAGREGASI	CAPAIAN DATA TAHUN					SATUAN
					2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	K/L	Riskesdas 2013 dan 2018,\SSGBI 2019, SSGI 2021 dan 2022 (Kemenkes)	Kabupaten			13,00	0,01	8,10	Persen
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	89,65	94,93	96,22	95,95		Persen
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (b) di fasilitas kesehatan	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	88,95	93,22	96,22	93,79		Persen
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	K/L	Profil Kesehatan Indonesia (Kemenkes)	Kabupaten	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	Kasus per 1000 orang
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan: (b) Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati	K/L	Kemenkes	Kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	K/L	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	Kabupaten	78,76	94,88	93,77			Persen
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	24,72	25,23	26,05	29,04		Persen